

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

DOKUMEN NASIONAL
KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menyatakan tumpah darah yang satu, yaitu tanah air Indonesia menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sadar akan jati dirinya sebagai bangsa daratan dan lautan, bangsa petani dan pelaut, serta bangsa penakluk gunung dan samudera. Para pendiri bangsa menyadari sepenuhnya bahwa perairan, selat, dan lautan di antara pulau-pulau nusantara adalah satu kesatuan yang utuh. Perairan, selat, dan lautan adalah pemersatu dan bukan pemisah belasan ribu pulau-pulau Indonesia, dari Pulau Rondo hingga Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Deli, dari Pulau Sekatung hingga Pulau Ndana.

Dengan wilayah air yang jauh lebih luas dibanding daratan, serta posisi silang yang strategis, sudah sewajarnya apabila Indonesia memiliki kepentingan fundamental untuk menguasai dan memanfaatkan laut, memiliki identitas dan budaya maritim yang kuat, serta memanfaatkan posisi strategis untuk kemaslahatan bangsa dan menciptakan keamanan di kawasan sesuai dengan amanat konstitusi untuk “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Kekuatan Sriwijaya yang menguasai Selat Malaka dan menjalin hubungan setara dengan Chola Nalanda dari India dan Dinasti Tang dari Cina, serta kemenangan Sultan Fatahillah mengusir Portugis di Teluk Sunda Kelapa menunjukkan bahwa bangsa Indonesia juga memiliki budaya strategi maritim yang kuat.

Pasca-Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, kesatuan tanah air Indonesia menjadi semakin erat setelah Indonesia dengan diplomasi ulung dan tanpa menembakkan satu butir peluru pun berhasil mengubah laut lepas yang memisahkan pulau-pulau menjadi perairan yang berada di dalam kedaulatan Indonesia, dimana pelaksanaan hak-hak dan kewajibannya dijamin oleh hukum internasional, yaitu Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982). Konvensi tersebut telah disahkan dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations*

Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Kedaulatan atas perairan kepulauan tersebut diperoleh setelah melalui proses penolakan oleh beberapa negara terhadap Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 dan perundingan multilateral yang alot selama lebih dari satu dekade, masyarakat internasional akhirnya mengakui keinginan kuat Indonesia untuk mewujudkan kesatuan tanah air dengan melakukan inovasi hukum yang dilakukan melalui proklamasi unilateral negara kepulauan menjadi suatu prinsip hukum internasional.

Indonesia adalah satu-satunya negara yang mampu memperluas wilayah kedaulatan dan hak berdaulatnya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang mendapatkan pengakuan internasional tanpa kekuatan militer. Pengakuan internasional tersebut telah memperkuat cara pandang mendasar bangsa Indonesia dan wawasan nusantara, tidak hanya sebagai bangsa yang merdeka, tetapi juga dengan keutuhan wilayah tanah air yang berbentuk kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kemerdekaan dan keutuhan wilayah tersebut menjadi modal Indonesia dalam merencanakan strategi pembangunan nasional secara utuh dan menyeluruh.

Pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan telah menambah nilai strategis aspek geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masyarakat internasional harus berlayar melalui wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia untuk keperluan navigasi, komunikasi, penanaman dan peletakan kabel serat optik, pipa gas, perdagangan berbagai barang komoditas, manufaktur, serta ekspor energi dan jasa.

Posisi strategis Indonesia tidak hanya dilihat dari posisi di persilangan antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, tetapi juga di antara Laut China Selatan dan Laut Asia Timur dengan Samudera Hindia, antara individualisme liberal di selatan dengan komunisme di utara, antara penghasil komoditas di selatan dengan pengguna komoditas di utara, antara penghasil energi di selatan dengan pengguna energi di utara, antara *middle power* di selatan dengan *global power* di utara, antara *non-nuclear power* di selatan dengan *nuclear power* di utara, dan antara anggota tetap Dewan Keamanan PBB di utara dengan bukan anggota Dewan Keamanan PBB di selatan. Indonesia kini berada dalam lingkaran perebutan pengaruh antara

kekuatan dominan pasca-Perang Dunia II dengan kekuatan lama yang bangkit kembali.

Posisi strategis Indonesia, beserta faktor geografis dan kondisi sosial ekonominya, juga menempatkan Indonesia dalam posisi penting di lingkungan global, yaitu dalam mempengaruhi kestabilan politik, ekonomi, serta keamanan lingkungan regional dan internasional.

Alam Indonesia sendiri memiliki nilai strategis bagi planet bumi. Indonesia memiliki hutan tropis kedua terbesar di dunia, 20% terumbu karang dunia, 20% hutan bakau dunia, 3 juta hektar padang lamun, serta dilewati arus yang berasal dari Samudera Pasifik menuju Samudera Hindia sehingga menjadikan laut Indonesia kaya akan sumber makanan bagi kehidupan laut. Tidak hanya itu, hutan tropis, hutan bakau, dan padang lamun juga mampu menyerap emisi gas rumah kaca. Kemampuan ini harus menjadi pertimbangan dalam menghitung emisi dan serapan emisi Indonesia sebagai bagian dari solusi masalah pemanasan bumi dan perubahan iklim dunia.

Potensi sumber daya kelautan yang melimpah dan adanya sejarah kejayaan maritim di masa lalu, sehingga semangat membangkitkan kembali kejayaan maritim Indonesia adalah bukan hal yang mustahil. Deklarasi Djuanda Tahun 1957 telah memberikan harapan baru untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim. Langkah selanjutnya diperlukan penyesuaian terhadap pola pikir, pola sikap, dan pola tindak bangsa yang didasari oleh kesadaran ruang kelautan tempat bangsa Indonesia berada melalui pembangunan yang berorientasi kelautan. Untuk itu, visi kelautan menjadi tuntutan dan kebutuhan bagi bangsa Indonesia. Visi kelautan tersebut dituangkan dalam visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, yaitu Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.

Dalam langkah mengimplementasikan visi Poros Maritim Dunia, percepatan pembangunan kelautan merupakan keniscayaan yang harus diupayakan dalam kerangka menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Peran, potensi, dan peluang Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia perlu dirumuskan secara jelas. Unsur-unsur kemaritiman yang sangat luas, membutuhkan adanya diferensiasi, pemilihan terhadap aspek mana yang akan menjadi fokus untuk digarap.

Visi Poros Maritim Dunia juga perlu memperhatikan secara komprehensif konstelasi hubungan antarnegara di Asia serta berbagai inisiatif yang ada di kawasan seperti *ASEAN Community*, *One Belt One Road* (OBOR) Republik Rakyat Tiongkok (RRT), *Act East* dari India dan *Re-Balance* dari Amerika. Dalam kaitan ini, visi Poros Maritim Dunia dapat saja melakukan sinergi dengan berbagai inisiatif tersebut sesuai dengan kepentingan nasional dan dalam rangka memberikan sumbangan dan kontribusi positif bagi perdamaian.

Visi Poros Maritim Dunia bisa terwujud apabila ada kebijakan dan program pendukung yang tepat, efektif, dan kompetitif. Program-program pembangunan kelautan tersebar di berbagai kementerian/lembaga. Oleh karena itu, perlu disusun Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia yang menyinergikan dan menyelaraskan seluruh program pembangunan kelautan agar lebih terarah, tepat sasaran, serta capaian hasilnya dapat diukur.

Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia ini akan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan sektor kelautan, juga sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan sektor kelautan untuk bersama mewujudkan Poros Maritim Dunia. Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia menjadi instrumen yang menyinergikan gerak dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Pemilihan terminologi “kelautan”, bukan kemaritiman atau samudera, lebih pada pertimbangan memperhatikan satu dokumen global yang mengatur berbagai aspek kelautan dan kemaritiman secara komprehensif, yaitu Konvensi Hukum Laut 1982, konstitusi kelautan dunia yang mencakup semua aspek pengaturan laut.

BAB II

WILAYAH PERAIRAN, HAK BERDAULAT, KAWASAN YURISDIKSI, SERTA LAUT LEPAS, DAN KAWASAN DASAR LAUT INTERNASIONAL

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan nusantara, mempunyai kedaulatan mutlak atas wilayah, serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sebagai negara pihak dari UNCLOS 1982, Indonesia memiliki kedaulatan penuh terhadap wilayah perairan yang terdiri atas perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial. Di samping itu, kedaulatan Indonesia juga mencakup dasar laut dan seisinya, serta ruang udara di atas dari wilayah perairan tersebut, bahkan sampai seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Hak kedaulatan tersebut diikuti oleh kewajiban Pemerintah Indonesia untuk mengelola dengan baik dan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan sesuai dengan kepentingan nasional.

Selain hal tersebut, Indonesia juga memiliki hak berdaulat dan kewenangan tertentu di kawasan yurisdiksi Indonesia di luar laut teritorial yang terdiri atas Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen. Laut teritorial Indonesia adalah selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Dalam hal zona maritim tersebut berbatasan dengan negara tetangga, batas terluarnya ditetapkan melalui kesepakatan dengan negara tetangga, sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982.

Di kawasan yurisdiksi, Indonesia memiliki kewenangan tertentu sesuai dengan zona maritimnya. Di Zona Tambahan, Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di bidang kepabeanan, perpajakan (fiskal), imigrasi, karantina, dan kesehatan (sanitasi). Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melakukan pengelolaan sumber daya kolom air. Sementara itu, di landas kontinen, Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola dasar laut, dan kekayaan di bawahnya. Indonesia juga memiliki hak berdaulat di landas kontinen di luar 200 mil laut hingga maksimal 350 mil laut apabila Indonesia dapat membuktikan secara ilmiah, seperti halnya pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas submisi

ekstensi landas kontinen dengan luas 4.209 km² (kurang lebih seluas Pulau Madura) di sebelah barat Aceh.

Berbagai zona maritim Indonesia ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional. Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan Landas Kontinen Indonesia, jika tidak berbatasan dengan negara tetangga, Indonesia menetapkannya secara unilateral. Dalam hal berbatasan dengan negara tetangga, akan ditetapkan sesuai dengan prinsip hukum laut internasional. Sementara itu, untuk segmen-segmen batas yang belum selesai dirundingkan penetapannya dengan negara tetangga, batasnya digambarkan sesuai dengan klaim maksimal kepentingan Indonesia dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum laut, antara lain yang terkait dengan penetapan garis pangkal.

Pelaksanaan dari kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di berbagai zona maritim tersebut harus sejalan dengan hukum internasional, dan memperhatikan kepentingan strategis Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan usaha menjamin keutuhan wilayah negara, menjaga kedaulatan negara, dan kepentingan kesejahteraan segenap bangsa. Selain itu, aspek geostrategis dan geopolitik, baik kawasan regional maupun internasional harus menjadi salah satu elemen pertimbangan di dalam melaksanakan berbagai hal yang menjadi bagian dari penegakan kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di perairannya.

Selain kedaulatan dan hak berdaulat yang dimiliki Indonesia di zona-zona maritim tersebut, Indonesia juga memiliki kepentingan-kepentingan tertentu di luar kawasan yurisdiksi nasional dan laut lepas (*high seas*), serta dasar laut di perairan internasional untuk kepentingan nasional dan juga kepentingan umat manusia bersama. Pengelolaan perairan Indonesia tidak boleh melupakan potensi peran besar Indonesia untuk ikut serta mengelola laut lepas (*high seas*) dan dasar laut dalam (*deep seabed*). Berbagai negara, bahkan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, telah berlomba untuk ikut serta mengelola dasar laut di perairan internasional. Potensi sumber daya alam yang besar di dasar laut perairan internasional menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan Indonesia akan energi dan mineral.

Dalam rangka memenuhi kewajiban hukum UNCLOS 1982, Indonesia telah menyampaikan ke Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai titik-titik dasar, garis pangkal, dan batas-batas maritim dengan berbagai negara tetangga. Proses teknis lain seperti verifikasi jumlah

pulau dan panjang pantai merupakan suatu proses yang berjalan terus mengingat kondisi alam laut dan dasar laut yang terus berubah dengan cepat. Jumlah pulau yang hilang karena abrasi atau yang muncul pascatsunami perlu terus diverifikasi.

Langkah verifikasi ini penting untuk mengetahui berbagai fakta geografis Indonesia. Hal ini tidak terkait dengan persepsi bahwa masalah kepemilikan pulau-pulau terancam atau hilang karena jumlah pulau yang belum dihitung atau tidak bernama. Kedaulatan Indonesia atas pulau-pulau Indonesia yang terletak di dalam garis pangkal negara kepulauan yang ditarik dari titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar tidak perlu diragukan lagi karena tidak pernah ditentang negara manapun juga sejak penandatanganan Deklarasi Djuanda Tahun 1957 dan penetapan Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Keberatan negara-negara adalah terhadap cara penarikan garis pangkal dan penguasaan Indonesia atas perairan di belakang garis pangkal bukan terhadap kedaulatan atas pulau-pulau.

BAB III
TANTANGAN PEMBANGUNAN
KELAUTAN INDONESIA

Keutuhan tanah air kepulauan Indonesia sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan membawa berkah sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia. Puluhan ribu pulau yang membentang dari Asia Selatan, Asia Tenggara hingga Pasifik Barat dan menjangkau tiga zona waktu memberikan Indonesia ruang wilayah darat, laut, dan udara yang sangat masif dengan kedaulatan dan hak berdaulat di berbagai zona maritim dan udara yang sangat luas. Di sisi lain, Indonesia adalah negara "*ring of fire*" dengan lebih dari 150 gunung berapi, termasuk gunung berapi di dalam laut. Terdapat lebih dari 500 kelompok etnis dengan bahasa, serta agama dan kepercayaan yang berbeda, tinggal di Indonesia yang tersebar di pegunungan, perbukitan, dataran rendah, dan pesisir dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi.

Kondisi geografis dan demografis Indonesia membawa konsekuensi munculnya berbagai tantangan nyata bagi Indonesia yang harus dikelola secara komprehensif, yaitu:

1. Meneguhkan identitas atau jati diri bangsa yang menyatakan bertanah air satu, Indonesia. Tidak mudah menyatakan kepada masyarakat pegunungan bahwa mereka adalah bangsa pelaut atau sebaliknya, untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya inovatif dan konsisten guna meneguhkan kembali jati diri bangsa sebagai bangsa penakluk samudera. Usaha meneguhkan identitas sebagai bangsa samudera, perlu didukung melalui program pengembangan sumber daya manusia kelautan yang andal. Di masa depan, pelaut-pelaut Indonesia harus menjadi bagian penting yang mewarnai aktivitas pelayaran internasional.
2. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat terbuka dan posisi geostrategis yang memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan lima wilayah *choke points* (Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Ombai-Wetar) membuat Indonesia rentan terhadap berbagai bentuk ancaman, misalnya jalur pelayaran yang dapat dilalui kapal selam nuklir asing, tindakan kekerasan bersenjata di laut, penyelundupan senjata, perbudakan di laut, penyelundupan manusia, perdagangan manusia,

perusakan sumber daya kelautan, pencurian *underwater cultural heritage*, pencurian Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dan pencurian kekayaan laut. Selain itu, kondisi laut Indonesia yang sangat terbuka juga berpotensi mengalami dampak dari konflik regional di laut. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan dukungan sistem pertahanan dan keamanan laut yang kuat dengan postur yang proporsional sesuai dengan luas wilayah dan ancaman yang dihadapi.

3. Peningkatan pengawasan dan tantangan pengamanan di pulau-pulau kecil terdepan dan terisolasi, terutama pulau-pulau yang bertetangga dengan daerah konflik di luar wilayah Indonesia. Aspek pengawasan dan pengamanan ini tidak hanya terkait dengan pengamanan di dalam pulau-pulau tersebut, tetapi juga pengawasan dan pengamanan perairan di sekitarnya dari berbagai kegiatan ilegal.

Pengembangan keamanan maritim harus dilakukan secara integratif dengan memperkuat dan membangun sistem nasional untuk kapabilitas pengawasan maritim yang komprehensif agar mampu mengawasi dan menindaklanjuti secara seketika berbagai masalah keamanan maritim, termasuk ancaman pada seluruh wilayah kedaulatan dan yurisdiksi laut nasional.

4. Membangun infrastruktur dan konektivitas antarwilayah melalui optimalisasi perhubungan laut untuk menghilangkan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta untuk menjalankan berbagai kepentingan nasional yang strategis seperti pemerintahan, keamanan, perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan komunikasi. Konektivitas yang baik antarwilayah di Indonesia akan mampu memperlancar pergerakan orang, barang, jasa, dan modal. Kesenjangan kesejahteraan yang terjadi karena rendahnya komunikasi antar pulau dapat menciptakan ketegangan di berbagai kawasan Indonesia dan menghalangi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur maritim seperti pelabuhan-pelabuhan yang menjadi simpul aktivitas perdagangan dan penyediaan sarana perhubungan berstandar internasional, serta sarana jasa penunjang aktivitas perdagangan di kawasan pinggiran Indonesia, terutama di wilayah Indonesia Timur harus menjadi perhatian. Bitung dan Sorong sebaiknya dikembangkan menjadi pelabuhan hub yang penting di Indonesia Timur, sedangkan Saumlaki perlu diberi penguatan mengingat nilai geostrategisnya yang tinggi. Konektivitas harus menjadi

tulang punggung pembangunan yang Indonesiasentris, bukan Jawasentris.

5. Rentang wilayah yang sangat luas juga menuntut Indonesia untuk menyelesaikan batas maritim laut teritorial, ZEE, dan landas kontinen guna mendapatkan kepastian hukum wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia, selain penetapan perbatasan dalam konteks kepastian dan jaminan hukum internasional atas ruang maritim yang menjadi hak Indonesia.
6. Pengembangan wilayah dan peningkatan aktivitas ekonomi memerlukan tata ruang laut yang komprehensif. Sebagai sebuah negara kepulauan, keterpaduan antara wilayah darat, laut, dan udara di atasnya menjadi sangat penting. Tata ruang laut akan memberikan kepastian hukum dan alokasi ruang bagi pemanfaatan sumber daya kelautan sehingga tidak ada tumpang tindih pemanfaatan di lokasi yang sama. Adanya tata ruang laut juga akan mendukung pemanfaatan sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan karena penetapan zona kawasan telah memperhatikan potensi yang ada dalam kawasan tersebut.
7. Sumber daya alam hayati di laut Indonesia seperti perikanan perlu dijaga dengan baik dari praktik-praktik perikanan yang tidak lestari seperti *Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF)* dan *fisheries crimes* baik dilakukan asing maupun domestik. Selain itu, budi daya perikanan laut (*marine aquaculture*) termasuk juga rumput laut perlu dikembangkan secara maksimal. Kekayaan laut di bidang perikanan perlu dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, termasuk nelayan melalui kebijakan di bidang perikanan tangkap dan budi daya yang berkelanjutan dengan memberikan kemudahan akses dana dan modal insentif kerja kepada nelayan, serta tidak memberikan izin penangkapan ikan kepada investor asing.
8. Pemanfaatan minyak, gas, mineral, arus, dan ombak untuk keperluan energi dan mineral masa depan. Sumber daya alam nonhayati yang tidak terbarukan seperti minyak, gas, dan mineral, serta sumber daya alam nonhayati yang terbarukan seperti energi angin, arus, dan ombak masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh bangsa Indonesia. Sebagai contoh, belum ada pemanfaatan terhadap penambangan mineral (Nikel, Cobalt, Mangan, dan Platinum) di landas kontinen Indonesia. Dengan wilayah laut yang sangat luas, sekitar 5,8 juta km²

maka kebutuhan energi dan mineral Indonesia di masa depan dapat diusahakan bersumber dari laut. Untuk itu, pemanfaatan sumber daya nonhayati di laut harus menjadi prioritas utama pembangunan Indonesia di masa depan.

9. Hasil tambang energi dan mineral dasar laut, memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi bagi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus terus menyediakan data, baik secara tekstual maupun geospasial dalam bentuk peta geologi, oseanografi, hidrografi, dan keanekaragaman hayati, serta data tentang kandungan kekayaan perairan Indonesia, terutama di laut dalam Indonesia.
10. Indonesia juga menghadapi tantangan untuk menambah luas yurisdiksi landas kontinen di luar 200 mil laut dan mampu melakukan eksplorasi di wilayah "*The Area*" yang berada di luar perairan internasional. Usaha ini harus dilakukan bersama-sama dengan usaha mengembangkan kemampuan sumber daya manusia, kemampuan pendanaan, serta kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengelola sumber daya alam pada kawasan dasar laut internasional.
11. Pengembangan jasa logistik pelabuhan, galangan kapal, dan wisata bahari. Ekonomi maritim Indonesia tidak hanya dari kekayaan sumber daya alam hayati dan nonhayati, tetapi juga harus mengembangkan bidang jasa logistik pelabuhan kapal niaga, kapal perintis, dan kapal pesiar, wisata bahari, serta galangan kapal modern dan tradisional yang mencerminkan tradisi bahari, ahli navigasi, pelaut, dan awak kapal. Misalnya, untuk memanfaatkan lalu lintas pelayaran internasional di Selat Malaka, Selat Singapura, Selat Philips, dan Pantai Timur Sumatera diperlukan sebuah pelabuhan laut berstandar internasional dan mampu menjadi *hub* lalu lintas navigasi internasional yang penting. Pengembangan sektor jasa tersebut memerlukan upaya tersendiri, baik dari sisi teknologi, kapasitas sumber daya manusia maupun akses pendanaannya. Laut harus dimanfaatkan secara komprehensif dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan lingkungan hidup.
12. Kegiatan jasa kemaritiman dan eksploitasi sumber daya alam hayati dan nonhayati secara langsung dalam jangka pendek dan jangka panjang dapat membawa dampak pencemaran lingkungan hidup dan merusak keanekaragaman hayati. Luas laut Indonesia juga membawa

konsekuensi polusi dari wilayah negara lain, baik polusi darat, polusi kapal maupun anjungan dari kegiatan eksploitasi sumber daya alam.

13. Penghitungan ekonomi maritim pada tingkat nasional diperlukan untuk menilai secara objektif besaran ekonomi maritim Indonesia secara menyeluruh, termasuk kontribusi sektor maritim pada Produk Domestik Bruto (PDB). Perhitungan tersebut digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan kelautan.
14. Gerakan desentralisasi kelautan berawal dari era reformasi, dimana pemerintah daerah provinsi diberi kewenangan mengelola sumber daya kelautan, termasuk pulau-pulau kecil dalam radius 12 mil laut, serta kabupaten/kota diberikan hak bagi hasil laut dari pengelolaan sumber daya kelautan dalam wilayah 4 mil laut. Di samping itu, pemerintah daerah dan masyarakat secara terukur dilibatkan dalam pengawasan wilayah laut. Hal tersebut, perlu mendapatkan perhatian khusus dalam desain hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta masyarakat dalam kaitannya dengan rancang bangun kelembagaan pusat dan daerah.
15. Perkembangan lingkungan strategis Indonesia mengalami perubahan pesat yang tidak pernah terbayangkan satu dekade lalu. Kondisi geopolitik dan geostrategis di Asia Timur dan Asia Tenggara yang diwarnai oleh sejumlah ketegangan berpotensi berkembang menjadi sumber konflik baru yang dapat mengganggu ketahanan regional. Untuk itu, Indonesia harus mampu menunjukkan kepemimpinan (*leadership*) dalam bidang kelautan regional dan global, meningkatkan kerja sama bilateral dengan negara-negara strategis, serta memainkan peran kepemimpinan dalam menciptakan suatu arsitektur keamanan di Asia. Dimensi maritim yang kuat harus mampu mewakili implementasi politik luar negeri bebas aktif yang tercermin dalam sumber daya diplomasi yang memadai.
16. Kemampuan nasional dalam pendidikan maritim, serta penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, dimulai dari penyiapan SDM melalui pendidikan menengah dan tinggi yang diwujudkan dengan pemberian beasiswa sekolah teknis maritim sampai dengan peningkatan kapasitas riset dan pengembangan. Di samping itu, dalam rangka penyiapan sumber daya manusia bidang kelautan dan peningkatan kemampuan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan juga strategi untuk meningkatkan keseimbangan

kualitas sumber daya manusia sektor kelautan antarwilayah di Indonesia, terutama di wilayah pinggiran dan Indonesia Bagian Timur.

BAB IV

TUJUAN DAN PRINSIP KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

4.1 Tujuan Kebijakan Kelautan Indonesia

Visi Kelautan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, yaitu menjadi sebuah negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Kebijakan Kelautan Indonesia disusun dengan mengacu pada Visi Pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Guna mewujudkan visi Kelautan Indonesia perlu disusun sasaran sebagai misi dari Kebijakan Kelautan Indonesia, yaitu:

- a. terkelolanya sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan;
- b. terbangunnya kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan yang andal;
- c. terbangunnya pertahanan dan keamanan kelautan yang tangguh;
- d. terlaksananya penegakan kedaulatan, hukum, dan keselamatan di laut;
- e. terlaksananya tata kelola kelautan yang baik;
- f. terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang merata;
- g. terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan industri kelautan yang berdaya saing;
- h. terbangunnya infrastruktur kelautan yang andal;
- i. terselesaikannya aturan tentang tata ruang laut;
- j. terlaksananya perlindungan lingkungan laut;
- k. terlaksananya diplomasi maritim; dan
- l. terbentuknya wawasan identitas, dan budaya bahari.

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan, perlu disusun strategi pelaksanaan sebagai pedoman perencanaan pembangunan kelautan di berbagai bidang oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan kelautan.

4.2 Prinsip Kebijakan Kelautan Indonesia

Perwujudan visi dan misi kelautan Indonesia harus berpegang teguh pada kepentingan nasional, serta keadilan dan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebijakan Kelautan Indonesia disusun berdasarkan enam prinsip dasar, yaitu (1) wawasan nusantara; (2) pembangunan berkelanjutan; (3) ekonomi biru; (4) pengelolaan terintegrasi dan transparan; (5) partisipasi; dan (6) kesetaraan dan pemerataan.

4.2.1 Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara merupakan dasar penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan pembangunan yang sebelumnya pernah dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wawasan Nusantara mencakup perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

4.2.2 Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berbagai kegiatan ekonomi harus dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan kebutuhan generasi yang akan datang. Untuk itu, pembangunan ekonomi dilaksanakan berdasarkan asas pembangunan berkelanjutan agar (1) pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati (*renewable*) atau laju inovasi substitusi sumber daya nonhayati (*nonrenewable*), serta pemanfaatan sumber daya nonhayati tidak menghancurkan kelestarian sumber daya hayati; (2) pemanfaatan sumber daya saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang; dan (3) pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang

terpercaya. Prinsip pembangunan berkelanjutan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4.2.3 Ekonomi Biru

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan dengan prinsip ekonomi biru (*blue economy*). Ekonomi biru merupakan model pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan pembangunan darat dan laut dengan memperhitungkan daya dukung sumber daya dan lingkungan. Pada prinsipnya potensi darat, laut, dan udara harus disinergikan sehingga menjadi kekuatan Indonesia.

4.2.4 Pengelolaan Terintegrasi dan Transparan

Pengelolaan terintegrasi dilaksanakan secara multidisiplin, antarwilayah, antarsektor, dan lintas sektor. Terintegrasi dengan menempatkan semua aspek pengelolaan ke dalam satu sistem dan tidak sebagai komponen yang terpisah. Sistem pengelolaan bersifat integral dan harus ada keterkaitan antara satu aspek dengan aspek lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Pengelolaan juga perlu dilakukan dengan prinsip transparansi yang berarti menggunakan regulasi yang jelas, terbuka dalam penyusunan dan penerapannya, serta tersedia informasi yang cukup dan mudah dimengerti oleh berbagai pemangku kepentingan.

4.2.5 Partisipasi

Prinsip partisipasi penting karena (1) seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) diharapkan mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan peran masing-masing; (2) memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijakan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber

daya; (3) menjamin adanya representasi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan ikut menjadi aktor dalam mengidentifikasi ancaman dan peluang; serta (4) memanfaatkan sumber daya secara adil.

4.2.6 Kesenjangan dan Pemerataan

Prinsip dasar pemerataan di dalam pembangunan kelautan Indonesia adalah untuk memastikan individu atau kelompok individu diperlakukan secara adil, setara, dan saling menguntungkan, tanpa memandang suku, ras, agama atau kepercayaan, dan jenis kelamin dengan mengutamakan masyarakat Indonesia yang berada di kawasan terpencil atau yang belum terhubung dengan baik di luar Jawa, Bali, Lombok, dan Sumatera.

Oleh karena itu, konektivitas antara pusat perekonomian Indonesia saat ini dengan berbagai kawasan lainnya seperti Sabang, Natuna, Tarakan, Bitung, Miangas, Sorong, Merauke, Saumlaki, Ambon, Timor, dan Flores merupakan suatu hal yang sangat fundamental bagi pembangunan seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan Kelautan Indonesia masih berkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu, khususnya di sekitar Indonesia Bagian Barat (Jawa, Bali, dan Sumatera). Pembangunan kelautan Indonesia perlu dilakukan dengan pendekatan Indonesiasentris bukan Jawasentris, melalui pembangunan nyata di kawasan pulau terluar dan pinggiran, serta mengutamakan perbaikan nasib nelayan kecil dan mereka yang bekerja pada industri perikanan.

Kemajuan tanpa kesetaraan tidak saja berseberangan dengan konstitusi, tetapi juga tidak sejalan dengan esensi utama pembangunan, yaitu peningkatan kualitas hidup manusia. Ketimpangan ekonomi justru akan mengancam keberlanjutan kemajuan itu sendiri, bahkan dapat mengarah pada tindakan-tindakan yang dapat mengancam keamanan masyarakat.

BAB V

PILAR-PILAR KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

Kebijakan Kelautan Indonesia terdiri atas tujuh pilar sebagai berikut:

5.1 Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia

5.1.1 Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Kebijakan sumber daya kelautan bertujuan untuk mendorong pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan melalui penerapan prinsip ekonomi biru. Pertumbuhan ekonomi di bidang kelautan diwujudkan melalui pembangunan berkelanjutan yang efisien, bernilai tambah, inklusif, dan inovatif sebagai penunjang seluruh aktivitas ekonomi yang meliputi perdagangan barang, jasa, dan investasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Program-program utama dalam melaksanakan strategi pengelolaan sumber daya kelautan, sebagai berikut:

- a. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari;
- b. peningkatan pengolahan, pemasaran, nilai tambah, serta standar dan keselamatan produk kelautan dan perikanan;
- c. peningkatan perlindungan terhadap kelestarian keanekaragaman hayati laut melalui konservasi ekosistem, jenis, dan genetik;
- d. pengembangan dan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral sesuai dengan prinsip ekonomi biru dengan memperhatikan teknologi ramah lingkungan;
- e. pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya alam nonkonvensional berdasarkan prinsip kelestarian lingkungan;
- f. pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, kearifan tradisional, kawasan konservasi perairan, dan kelestarian lingkungan;
- g. pengembangan industri bioteknologi kelautan dan biofarmakologi laut dengan pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati;

- h. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara seimbang dan berkelanjutan; dan
- i. penguatan sistem data dan informasi kelautan, inventarisasi, dan evaluasi sumber daya kelautan.

5.1.2 Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kebijakan pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia di bidang kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu.

Program-program utama dalam melaksanakan strategi pengembangan sumber daya manusia, sebagai berikut:

- a. peningkatan jasa di bidang kelautan yang diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja;
- b. pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan;
- c. peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi kelautan;
- d. peningkatan gizi masyarakat kelautan;
- e. peningkatan perlindungan ketenagakerjaan;
- f. peningkatan pendidikan dan penyadaran masyarakat kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis, jenjang pendidikan;
- g. penyusunan kurikulum pendidikan yang berorientasi kelautan;
- h. peningkatan kualitas dan kuantitas perguruan tinggi bidang kelautan;
- i. penyediaan insentif dan bantuan pendidikan bidang kelautan dan riset strategis kelautan;
- j. pengembangan kualitas dan kuantitas sekolah pelayaran dan perikanan;
- k. peningkatan kolaborasi riset kelautan dan pengembangan pusat keunggulan kelautan; dan

1. peningkatan tata kelola ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, serta agenda riset kelautan strategis.

5.2 Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut

Kebijakan pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut bertujuan untuk menegakkan kedaulatan dan hukum, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di wilayah laut.

Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan pertahanan dan keamanan maritim, sebagai berikut:

- a. pembangunan pertahanan dan keamanan laut yang tangguh melalui postur pertahanan kelautan Indonesia yang proposional dengan luas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, serta mampu menanggulangi ancaman dan gangguan dari dalam dan luar negeri, ikut berperan dalam membangun perdamaian dan keamanan kawasan;
- b. peningkatan kemampuan dan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di seluruh wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, serta di luar wilayah yurisdiksi sesuai dengan hukum internasional;
- c. peningkatan pembangunan kawasan perbatasan di laut dan pulau-pulau kecil terluar;
- d. peningkatan peran aktif Indonesia dalam kerja sama pertahanan dan keamanan laut baik di tingkat regional maupun internasional;
- e. penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi;
- f. optimalisasi sistem komando, kendali, komunikasi, komputerisasi, intelijen, serta pengawasan dan pengintaian;
- g. pembangunan karakter bangsa yang berorientasi kelautan dalam upaya bela negara; dan
- h. meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayaran.

5.3 Tata Kelola dan Kelembagaan Laut

Kebijakan tata kelola dan kelembagaan laut bertujuan untuk menciptakan sistem tata kelola kelautan nasional yang komprehensif,

terintegrasi, efektif, dan efisien. Hal ini diperlukan untuk sinkronisasi dan implementasi efektif di berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan regional yang harus selaras dengan aturan internasional di bidang kelautan dan kemaritiman.

Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan tata kelola kelautan, sebagai berikut:

- a. penataan sistem hukum nasional di bidang kelautan;
- b. implementasi hukum internasional di bidang kelautan sesuai dengan kepentingan nasional; dan
- c. pembangunan sistem tata kelola kelautan nasional yang baik, transparan dan bertanggung jawab.

5.4 Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan

5.4.1 Ekonomi Kelautan

Kebijakan ekonomi kelautan bertujuan untuk menjadikan kelautan sebagai basis pembangunan ekonomi. Potensi ekonomi kelautan Indonesia tidak hanya berada di perairan nasional, tetapi juga di perairan yurisdiksi dan perairan internasional yang dapat dikelola sesuai dengan hukum internasional.

Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya kelautan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan menggerakkan sumber daya nasional melalui formulasi desain program kelautan nasional disertai berbagai kelengkapan instrumen fiskal, moneter, keuangan, serta mobilisasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan bidang kelautan.

Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan ekonomi kelautan, sebagai berikut:

- a. penyusunan dan pengembangan basis data dan informasi ekonomi kelautan;
- b. penciptaan iklim investasi usaha yang kondusif dan efisien;
- c. pengembangan dunia usaha di bidang kelautan nasional yang berdaya saing internasional;
- d. pembangunan kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip ekonomi biru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar, dan perairan laut Indonesia secara realistis;

- c. optimalisasi penyediaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan dunia usaha dan pelaku usaha kelautan, terutama nelayan;
- f. intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan penguatan mutu produk perikanan mulai dari proses praproduksi sampai dengan pemasaran;
- g. pengembangan kemitraan usaha di bidang kelautan yang saling menguntungkan antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar; dan
- h. pengembangan kerja sama ekonomi berkelanjutan dengan negara mitra strategis bidang kelautan.

5.4.2 Infrastruktur Kelautan

Dalam rangka menumbuhkan ekonomi kelautan, pemerintah membangun dan mengembangkan infrastruktur kelautan dan kemaritiman untuk peningkatan konektivitas dan pembangunan dengan pendekatan Indonesiasentris bukan Jawasentris.

Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan infrastruktur kelautan, sebagai berikut:

- a. sinergi kepentingan nasional strategis dalam menentukan kawasan pengembangan infrastruktur kelautan;
- b. pengembangan sistem konektivitas transportasi laut nasional;
- c. pengembangan kemampuan dan kapasitas badan usaha nasional di bidang pembangunan dan pengelolaan infrastruktur kelautan yang berdaya saing dan bertaraf internasional;
- d. peningkatan kemampuan sumber pendanaan nasional untuk pembangunan infrastruktur kelautan;
- e. penciptaan iklim investasi yang baik untuk pembangunan dan pengelolaan infrastruktur maritim;
- f. peningkatan kerja sama investasi pembangunan infrastruktur dengan negara-negara mitra; dan
- g. pengembangan dan pembangunan infrastruktur pelabuhan laut.

5.4.3 Peningkatan Kesejahteraan

Kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan kelautan yang bermanfaat bagi

kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan peningkatan kesejahteraan, sebagai berikut:

- a. pembangunan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam;
- b. peningkatan kemampuan dan kapasitas bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam;
- c. penyediaan kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, lahan, dan pembiayaan untuk kepentingan pengembangan usaha bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam;
- d. perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat di bidang kelautan, khususnya pada sektor perikanan, energi, dan pariwisata bahari; dan
- e. peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan untuk pariwisata bahari secara berkelanjutan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

5.5 Pengelolaan Ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut

5.5.1 Pengelolaan Ruang Laut

Kebijakan pengelolaan ruang laut bertujuan untuk melindungi sumber daya dan lingkungan dengan berdasar pada daya dukung lingkungan dan kearifan lokal, memanfaatkan potensi sumber daya dan/atau kegiatan di wilayah laut yang berskala nasional dan internasional, serta mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan jasa.

Pemangku kepentingan terhadap pengelolaan dan penggunaan ruang laut Indonesia yang beragam membutuhkan rujukan bersama mengenai pembagian penggunaan ruang laut yang terintegrasi dan sinkron dengan penataan ruang darat, sehingga dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan yang ada tanpa menimbulkan konflik pemanfaatan ruang.

Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan pengelolaan ruang laut, sebagai berikut:

- a. penciptaan keterpaduan lintas program antarsektor di wilayah laut;
- b. percepatan penetapan rencana tata ruang laut nasional;
- c. percepatan penetapan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. percepatan penyelesaian rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah;
- e. penyediaan data informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik terpadu dalam kerangka kebijakan satu peta untuk penyusunan tata ruang laut; dan
- f. penyederhanaan perizinan pemanfaatan ruang laut.

5.5.2 Pelindungan Lingkungan Laut

Kebijakan pelindungan lingkungan laut bertujuan untuk melestarikan sumber daya kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di laut. Indonesia juga perlu melihat kemampuan scrap emisi gas rumah kaca ekosistem pesisir sehingga emisi yang dihasilkan kegiatan di darat, khususnya perkebunan dan industri dapat dikurangi oleh kemampuan "*blue carbon*" Indonesia.

Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan pelindungan lingkungan laut, sebagai berikut:

- a. penguatan pengelolaan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil melalui manajemen terpadu dan berkelanjutan;
- b. penguatan konservasi ekosistem, jenis, dan genetik;
- c. pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan laut;
- d. penanggulangan bencana kelautan;
- e. pengembangan tata guna dan infrastruktur pesisir dan laut yang berkelanjutan; dan
- f. pengembangan kerja sama bilateral, regional, dan global di bidang pengelolaan lingkungan laut.

5.6 Budaya Bahari

Kebijakan budaya bahari bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh terhadap wawasan bahari di seluruh lapisan masyarakat guna mengoptimalkan pembangunan kelautan nasional yang berkesinambungan dan lestari.

Budaya bahari memiliki peran penting dalam membangun bangsa yang berorientasi kelautan. Dengan budaya bahari, masyarakat Indonesia akan belajar keuletan, kerja keras, *enterpreunership*, gotong royong, menghargai perbedaan, dan cinta akan lingkungan. Budaya bahari yang kuat akan menjadikan laut sebagai ruang hidup dan ruang juang, tempat belajar, berkarya, bekerja, berolah raga, dan berekreasi, serta mendidik masyarakat.

Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan budaya bahari, sebagai berikut:

- a. meningkatkan pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan yang diwujudkan melalui semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- b. mengidentifikasi dan menginventarisasi nilai budaya dan sistem sosial kelautan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bagian dari sistem kebudayaan nasional;
- c. membangkitkan pemahaman wawasan dan budaya bahari;
- d. melakukan harmonisasi dan pengembangan unsur kearifan lokal ke dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang lestari; dan
- e. mempertahankan, mengembangkan, dan meningkatkan peran kota-kota pelabuhan bersejarah.

5.7 Diplomasi Maritim

Diplomasi maritim merupakan pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan guna memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum internasional.

Diplomasi maritim Indonesia tidak dapat hanya diartikan secara sempit dalam bentuk perundingan internasional di bidang kelautan, penetapan perbatasan atau diplomasi angkatan laut. Diplomasi maritim Indonesia adalah pelaksanaan politik luar negeri yang tidak hanya terkait dengan berbagai aspek kelautan pada tingkat bilateral, regional,

dan global tetapi juga yang menggunakan aset kelautan, baik sipil maupun militer untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional.

Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan diplomasi maritim, sebagai berikut:

- a. peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerja sama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral;
- b. peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia di bidang kelautan;
- c. kepemimpinan atau peran aktif dalam penyusunan berbagai norma internasional bidang kelautan;
- d. percepatan perundingan penetapan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga;
- e. percepatan submisi penetapan ekstensi landas kontinen sesuai dengan hukum internasional;
- f. peningkatan penempatan warga negara Indonesia di dalam berbagai organisasi internasional bidang kelautan; dan
- g. pembakuan nama pulau.

BAB VI

KAIDAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan kebijakan yang dimuat dalam Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan diwujudkan dalam kerangka pendanaan, regulasi, kelembagaan, evaluasi, dan rencana aksi.

6.1 Kerangka Pendanaan

Pendanaan bagi program-program spesifik yang disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta lembaga negara yang lain dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kelautan Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Optimalisasi terhadap sumber-sumber pembiayaan pembangunan kelautan yang ada antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kontribusi swasta, perbankan, dan lembaga keuangan nonbank dengan meningkatkan kualitas dan efisiensi pemanfaatan pembiayaan pembangunan kelautan dilakukan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan, peningkatan persiapan perencanaan kegiatan, serta penguatan pemantauan dan evaluasi.

Pengembangan potensi pembiayaan pembangunan kelautan dapat dilakukan dengan meningkatkan pemanfaatan skema *Public Private Partnership* (PPP) atau kerja sama pemerintah dan swasta/organisasi nonpemerintah, *Corporate Social Responsibility* (CSR), pinjaman langsung (*direct lending*) dari mitra pembangunan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan *Municipal Development Fund* (MDF). Kerja sama dimaksud dilaksanakan dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran Kebijakan Kelautan Indonesia dengan melibatkan swasta dalam penyediaan infrastruktur publik. Selain itu, dari kerja sama tersebut diharapkan agar keahlian dan aset (sumber daya) setiap pihak (pemerintah dan swasta) dapat digunakan secara bersama untuk menyediakan jasa dan/atau fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

6.2 Kerangka Regulasi

Pelaksanaan Kebijakan Kelautan Indonesia harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

6.3 Kerangka Kelembagaan

Pelaksanaan Kebijakan Kelautan Indonesia dilakukan oleh kementerian dan lembaga sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Pelaksanaan dan pemantauan Kebijakan Kelautan Indonesia dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Laporan pelaksanaan program dan kegiatan Kebijakan Kelautan Indonesia secara berkala kepada Presiden disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman setelah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perencanaan, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

6.4 Kerangka Evaluasi

Evaluasi terhadap Kebijakan Kelautan Indonesia dilakukan untuk menjaga relevansi dan konteks kekinian yang dilakukan melalui mekanisme peninjauan kembali secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan dinamika internasional.

Peninjauan kembali Kebijakan Kelautan Indonesia dilakukan oleh kementerian/lembaga dan dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Hasil peninjauan kembali tersebut dapat dijadikan dasar penyesuaian Kebijakan Kelautan Indonesia.

6.5 Kerangka Rencana Aksi

Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia merupakan penjabaran dari 7 (tujuh) pilar Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia yang didetailkan dalam beberapa program prioritas. Rencana aksi yang dimaksud disusun untuk menyinergikan program dan kegiatan kementerian/lembaga dalam melaksanakan pembangunan kelautan, yang dirinci dalam strategi, kegiatan, sasaran, target/*output*,

jangka waktu, penanggung jawab, instansi terkait, dan sumber pendanaan.

Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia tersebut juga disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 guna mengelaborasi target-target besar program pembangunan kemaritiman dan kelautan bagi kesejahteraan rakyat, sebagai bagian dari upaya memperkuat jati diri sebagai negara maritim (Nawacita kesatu), dan pengembangan ekonomi maritim dan kelautan (Nawacita ketujuh). Selain itu, RPJMN 2015-2019 menegaskan bahwa perlu percepatan pembangunan kelautan untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2016-2019 terdiri atas 5 (lima) kluster program prioritas, yaitu: (1) Batas Maritim, Ruang Laut, dan Diplomasi Maritim; (2) Industri Maritim dan Konktivitas Laut; (3) Industri Sumber Daya Alam dan Jasa Kelautan Serta Pengelolaan Lingkungan Laut; (4) Pertahanan dan Keamanan Laut; dan (5) Budaya Bahari.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

RENCANA AKSI
KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA
2016-2019

RENCANA AKSI

KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA 2016-2019

Kebijakan Kelautan Indonesia mencakup aspek yang sangat luas dan kompleks yang saling terkait satu sama lain. Terdapat banyak pelaku yang terlibat dalam implementasi program kelautan dan kemaritiman. Pengembangan program kelautan dan kemaritiman perlu dilaksanakan secara holistik, integratif, tematik, dan sinergis menuju terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Pembangunan Poros Maritim meliputi: (1) Membangun budaya maritim Indonesia; (2) Menjaga laut dan sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama; (3) Memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, *deep seaport*, logistik dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim; (4) Memperkuat diplomasi maritim, kerja sama di bidang kelautan, menghilangkan sumber konflik di laut seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut; serta (5) Membangun kekuatan pertahanan maritim untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim serta bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Untuk itu Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia dijabarkan ke dalam 5 (lima) klaster program prioritas, yaitu: (1) Batas Maritim, Ruang Laut, dan Diplomasi Maritim; (2) Industri Maritim dan Konektivitas Laut; (3) Industri Sumber Daya Alam dan Jasa Kelautan serta Pengelolaan Lingkungan Laut; (4) Pertahanan dan Keamanan Laut; dan (5) Budaya Bahari.

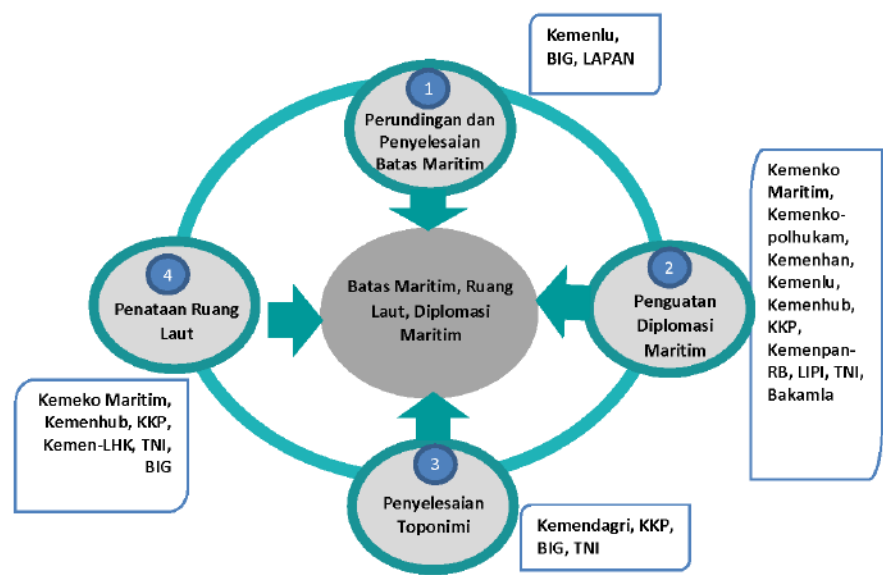
Secara skematik, 5 (lima) klaster program prioritas tersebut digambarkan sebagai berikut:



PROGRAM PRIORITAS A
BATAS MARITIM, RUANG LAUT,
DAN DIPLOMASI MARITIM

PROGRAM PRIORITAS A
BATAS MARITIM, RUANG LAUT, DAN DIPLOMASI MARITIM

Program prioritas batas maritim, ruang laut, dan diplomasi maritim terdiri atas 4 (empat) kegiatan prioritas, yaitu: (1) Perundingan dan Penyelesaian Batas Maritim; (2) Penguatan Diplomasi Maritim; (3) Penyelesaian Toponimi; dan (4) Penataan Ruang Laut. Secara skematik, 4 (empat) kegiatan prioritas tersebut digambarkan sebagai berikut:



Isu dan Kondisi Saat ini

1. Perundingan dan Penyelesaian Batas Maritim

Penentuan batas maritim merupakan bagian penting dalam kaitan penegakan kedaulatan di wilayah laut Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki laut yang berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Penetapan batas maritim ini sangat dibutuhkan untuk memperoleh kepastian hukum guna mendukung berbagai kegiatan kelautan, seperti penegakan kedaulatan dan hukum di laut, perikanan, wisata bahari, eksplorasi lepas pantai (*offshore*), transportasi laut dan lainnya. Batas maritim Republik Indonesia dengan negara tetangga mencakup batas laut wilayah (*Territorial Sea*), batas

perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan batas Landas Kontinen. Belum selesainya penentuan batas maritim antara pemerintah Indonesia dengan negara tetangga dapat membuat daerah perbatasan laut menjadi rawan konflik. Saat ini penetapan batas maritim yang telah selesai dilakukan adalah batas maritim dengan Papua Nugini.

2. Penguatan Diplomasi Maritim

Diplomasi maritim memiliki peran penting dalam hubungan antarbangsa, termasuk dalam pengelolaan laut dan samudera yang saling berkaitan, kedaulatan dan kemandirian pangan, perebutan pengaruh dengan menggunakan matra laut, perbedaan kepentingan antarnegara di laut serta alokasi kedaulatan dan yurisdiksi di laut. Dengan luas laut 5,8 juta km² dan kekayaan yang berlimpah, Indonesia dapat menjalankan peran kepemimpinan dalam menata kerja sama ekonomi yang memperhatikan kelestarian laut, dan perdagangan global melalui laut.

Berdasarkan letak geostrategis dan geopolitis, Indonesia perlu memiliki posisi tawar yang kuat dalam melaksanakan politik luar negeri aktif di tengah percaturan regional dan global. *Smart power diplomacy* merupakan pendekatan yang tepat dan perlu dikembangkan dalam kerangka kerja sama maritim di kawasan. Antisipasi terhadap perkembangan situasi kemaritiman di kawasan perlu dilakukan, seperti konflik pemanfaatan sumber daya laut dan klaim kedaulatan di wilayah Laut China Selatan oleh beberapa negara, yang akan mempengaruhi keamanan kawasan dan dapat berdampak terhadap kedaulatan Indonesia di wilayah Laut Natuna dan sekitarnya. Unsur penting saat melakukan diplomasi maritim untuk mengatasi masalah perbatasan maritim adalah dengan memperhatikan aspek hukum internasional dan hukum nasional, serta mempertimbangkan *national interest* sebagai tujuan utamanya. Belum terbentuknya pemahaman yang sama antara Negara Pihak terhadap implementasi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang memuat hak dan kewajiban dalam mengelola sumber daya kelautan, menjadi suatu tantangan tersendiri dalam mengelola hubungan antarnegara di laut. Isu tentang kelautan dan kemaritiman telah menjadi pembahasan dalam berbagai forum kerja sama bilateral, regional, dan internasional. Peran kepemimpinan Indonesia dalam berbagai arsitektur

regional di kawasan *Indian Ocean Rim Association* (IORA), *Asean Maritime Forum*, dan *East Asia Summit Maritime Cooperation* perlu ditingkatkan.

3. Penyelesaian Toponimi

Penyelesaian toponimi pulau merupakan kebutuhan nasional Indonesia untuk mengetahui secara pasti jumlah, lokasi dan nama seluruh pulau yang berada dalam kedaulatan Indonesia. Proses toponimi mencakup penamaan dan penentuan posisi geografis di muka bumi, yang kemudian disusun dalam suatu daftar inventaris kondisi geografi wilayah kedaulatan negara. Indonesia telah mencatat sebanyak 17.504 pulau yang masuk dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 13.466 pulau telah selesai toponiminya, sisanya sebanyak 4.038 pulau masih memerlukan proses verifikasi dan validasi. Hasil proses tersebut selanjutnya akan didepositkan pada sidang PBB tentang Standardisasi Nama Geografis (*United Nations Conference on Standardization of Geographical Names/UNCSGN*).

4. Penataan Ruang Laut

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuan disusunnya penataan ruang kelautan nasional, diantaranya: (1) mempersiapkan dukungan bagi pengembangan kegiatan sumber daya alam pesisir dan laut, serta fungsi perlindungan lingkungan; (2) mempersiapkan wilayah pesisir dan laut untuk berperan dalam perkembangan global yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional; (3) membantu mengurangi kesenjangan perkembangan antarbagian wilayah nasional sesuai potensi dan daya dukung lingkungan, serta membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat marjinal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (4) memperkuat akses antarbagian wilayah nasional sebagai negara kesatuan, serta memperkuat kesatuan wilayah nasional melalui kawasan perbatasan dengan negara lain; serta (5) mempertahankan dan meningkatkan kelestarian lingkungan pesisir dan laut.

Penataan Ruang Laut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang amanatkan penyusunan perencanaan tata ruang laut nasional, sementara untuk pesisir diatur

dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang mengamanatkan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka terjadi perluasan kewenangan provinsi, dari semula 4-12 mil laut menjadi 0-12 mil laut. Dengan demikian, pemerintah kabupaten/kota yang semula memiliki kewenangan pengelolaan atas wilayah 0-4 mil di laut kini tidak lagi memiliki kewenangan. Terkait pengelolaan ruang laut, diperlukan segera penetapan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Ruang Laut Nasional sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta penyelesaian data/peta dasar dan tematik untuk mendukung penyelesaian RZWP-3-K.

Secara rinci, Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2016–2019 untuk program prioritas batas maritim, ruang laut, dan diplomasi maritim, dapat dilihat pada matriks sebagai berikut:

RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA 2016-2019											
PROGRAM PRIORITAS A. BATAS MARITIM, RUANG LAUT, DAN DIPLOMASI MARITIM											
Sasaran Utama:											
1. Tereleksaikkannya pembakuan nama pulau											
2. Peningkatan peran dan partisipasi aktif Indonesia											
NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG- GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
A.1 PERUNDINGAN DAN PENYELESAIAN BATAS MARITIM											
1.	Percepatan Perundingan Penetapan Batas Maritim Indonesia dengan Negara Tetangga	Optimalisasi diplomasi terkait dengan perjanjian politik, keamanan kewilayahan, dan kelautan	Penetapan Undang- Undang (UU) Ratifikasi Perjanjian Perbatasan Maritim Republik Indonesia (RI)	RI dan Singapura (segmen timur laut teritorial)	v	v	-	-	Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)	Kementerian Pertahanan (Kemahanan), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum- HAM), Kementerian Sekretariat Negara (Kemen- setneg), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG- GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
										Republik Indonesia (Polri), Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)	
				RI dan Filipina (Zona Ekonomi Eksklusif/ ZEE)	V	v	-	-	Kemenlu	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kemensetneg, Kemen- kumham, BIG	APBN
				Perundingan perbatasan maritim RI	-	v	v	v	Kemenlu	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen- ESDM), TNI, Polri, BIG	APBN
				RI dan Filipina (Landas Kontinen/LK)							
				Kesepakatan timeframe perundingan dan penetapan garis batas awal							
				RI dan Vietnam (ZEE) Kesepakatan kelanjutan perundingan	-	v	v	v	Kemenlu	KKP, TNI, Polri, BIG	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
				<i>common understanding</i> posisi dasar masing-masing							
				RI dan India (ZEE)	-	v	v	-	Kemenlu	KKP, TNI, BIG	APBN
				Kesepakatan <i>timeframe</i> perundingan dan penetapan garis batas awal							
				RI dan Palau (ZEE)	v	v	v	v	Kemenlu	KKP, TNI, BIG	APBN
				Melanjutkan perundingan							
				RI dan Timor Leste (Laut Teritorial)	-	v	v	v	Kemenlu	Kemenhan, Kemenhub, TNI, Polri, BIG	APBN
				Dimulainya proses pe-rundingan							
		Pemetaan batas wilayah	Terselenggara-nya pemetaan batas wilayah dalam mendukung diplomasi	4 dokumen teknis perundingan batas maritim antarnegara yang mutakhir	1	1	1	1	Kemenlu	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim),	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			batas maritim antarnegara							KKP, Kemenhan, Kemenhub, Kemen-ESDM, BIG, TNI, Polri	
			Pengembang-an teknologi dan data penginderaan jauh	Produk penelitian, pengembang-an, dan perekayasaan teknologi dan data penginderaan jauh	v	v	v	v	Lembaga Penerbang-an dan Antariksa Nasional (LAPAN)	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-dikti), KKP, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	APBN
2.	Percepatan Submisi Penetapan Ekstensi Landas Kontinen sesuai dengan Hukum Internasional	Optimalisasi diplomasi terkait dengan perjanjian politik, keamanan kewilayahan, dan kelautan	Survei landas kontinen di luar 200 mil laut	Terpetakannya landas kontinen di luar 200 mil laut	v	v	-	-	BIG	Kemen-ESDM, Kemenlu, TNI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), BPPT	APBN
			Penyiapan dokumen	Penyelesaian dokumen	v	v	v	-	Kemenlu	Kemen-ESDM, TNI, BIG	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			submisi	submisi							
			Penyampaian submisi ke PBB	Submisi diterima PBB	-	-	v	-	Kemenlu	Kemen-ESDM, TNI, BIG	APBN
A.2 PENGUATAN DIPLOMASI MARITIM											
1.	Peningkatan Kepemimpin-an di dalam Berbagai Kerja Sama Bidang Kelautan pada Tingkat Bilateral, Regional, dan Multilateral	Pelaksanaan diplomasi maritim yang komprehensif dengan berdasarkan politik luar negeri bebas aktif	Penyusunan buku putih diplomasi maritim	Terciptanya pelaksanaan diplomasi maritim yang komprehensif atas dasar politik luar negeri bebas aktif oleh semua pemangku kebijakan terkait	-	1	-	-	Kemenko Maritim, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko-polhukam), Kemenlu	Kemenhan, KKP, TNI, Polri, Badan Keamanan Laut (Bakamla)	APBN
		Optimalisasi diplomasi ter-kait dengan hukum dan perjanjian	Peran dan partisipasi aktif Indonesia	International Maritime Organization (IMO)	v	v	v	v	Kemenhub	Kemenko Maritim, Kemenlu	APBN
				State Parties on the Law of the Sea (SPLOS)	Delegasi	Delegasi	Unsur pimpin-an Presiden SPLOS	Delegasi	Kemenlu	Kemenko Maritim	APBN
				International	v	v	v	v	Kemenlu	Kemen-	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
				Seabed Authority (ISA)						ESDM, KKP, TNI, LIPI, BIG	
				Indian Ocean Rim Association (IORA)	Ketua	Ketua	v	v	Kemenlu	Kemenko Maritim, KKP, Polri	APBN
				ASEAN Maritime Forum	v	v	v	v	Kemenlu	Kemenhub, KKP, TNI, Polri	APBN
				Brunei Darussalam-Indonesia-Makaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)	v	v	v	v	Kemenlu	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomi-an (Kemenko Perekonomi-an), KKP, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kemenhub	APBN
				Pelaksanaan Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF)	v	v	v	v	KKP	Kemenlu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen-LHK), Kemendagri,	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		<i>Inter-governmental Oceanographic Commission (IOC) of UNESCO</i>	Terselenggaranya pelatihan internasional: <i>crustacean taxonomy</i> dan <i>ecosystem health</i> , serta kerja sama riset internasional dalam perubahan iklim	Meningkatnya kapasitas peneliti dan jaringan kerja sama di Kawasan Asia Pasifik	v	v	v	v	LIPI	Kemenko Maritim, KKP, BPPT, Perguruan Tinggi (PT)	APBN dan bantuan luar negeri
		Penyelenggaraan operasi militer selain perang TNI, penegakan hukum, dan penjagaan keamanan laut di wilayah laut yurisdiksi nasional	Meningkatnya penegakan hukum dan penjagaan keamanan di wilayah kedaulatan	Jumlah penyelenggaraan <i>Sail Bahari</i> (paket)	1	1	1	1	TNI	Kemenko-polhukam, Kemenlu, Polri	APBN
		Penyelenggaraan operasi militer selain perang dan	Meningkatnya penegakan hukum dan penjagaan keamanan di	Mewujudkan laut menjadi terkendali di ketiga Alur Laut	v	v	v	v	TNI	Kemenko Maritim, Kemenko-polhukam, KKP,	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		penegakan hukum di laut yurisdiksi nasional berupa patroli laut di kawasan Indonesia barat dan timur	wilayah kedaulatan berupa patroli laut di kawasan Indonesia barat dan timur	Kepulauan Indonesia (ALKI), demikian pula semua <i>choke point</i> di sekitar perairan Sabang, perairan Natuna, perairan Sangihe Talaud, perairan Halmahera, perairan laut Arafura						Kemenhub, Kemendagri, Polri	
2.	Peningkatan Peran Aktif dalam Upaya Menciptakan dan Menjaga Perdamaian dan Keamanan Dunia di Bidang Kelautan	Optimalisasi diplomasi terkait dengan hukum dan perjanjian kewilayahan	Terselenggaranya keamanan maritim di kawasan	Pengamanan Laut Sulawesi yang berada di <i>Tri Border Area</i> antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia	-	v	v	v	Kemenhan	Kemenlu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), KemenkumHAM, TNI, Polri	APBN
				Kerja sama atau latihan bersama antara TNI dengan Angkatan Laut negara kawasan secara bilate-	v	v	v	v	TNI	Kemenko-polhukam, Kemenhan, Kemenlu	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
				ral dan regio- nal							
				Kerja sama antara Ba- kamla dengan lembaga ke- amanan laut sipil di negara lain	v	v	v	v	Bakamla	Kemenko Maritim, Kemenko-polhukam, Kemenlu, Polri	APBN
			Keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan	<i>Tripartite Technical Expert Group (TTEG)</i>	v	v	v	v	Kemenhub	Kemenlu, Kemen-LHK, Polri	APBN
			Terjaganya kepentingan Indonesia dan penegakan kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan	Isu Kawasan Laut China Selatan	v	v	v	v	Kemenlu	Kemenko Maritim, Kemenko-polhukam, Kemenhan, KKP, Kemenhub, TNI, Polri, BIG	APBN
			Peran dan partisipasi aktif Indonesia	<i>ASEAN Regional Forum (ARF) Inter-Sessional Meeting on Maritime Security</i>	v	v	v	v	Kemenlu	Kemenko Maritim, Kemenhan, Kemenkeu, TNI, Polri	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
				Kerja sama ke- amanan laut	3 negara	3 negara	3 negara	3 negara	Bakamla	Kemenhan, Kemenlu, Kemenkeu, Kemenkum-HAM, TNI, Polri	
3.	Kepemimpin-an atau Peran Aktif dalam Penyusunan Berbagai Norma Internasional Bidang Kelautan	Optimalisasi diplomasi ter- kait dengan hukum dan perjanjian kewilayahan	Peran dan partisipasi aktif Indonesia	Pembentukan instrumen internasional <i>Conservation and Sustainable Use of Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction</i>	v	v	v	v	Kemenko Maritim, Kemenlu	Kemen-ESDM, Kemen-LHK, KKP, LPI	APBN
			Menggalang dukungan dengan inisiatif kepemimpinan Indonesia dari <i>like minded countries</i>	<i>Terbentuknya Regional Convention Against Illegal, Unreported, and Unregulated, (IUU) Fishing and Its Related Crimes</i>	v	v	-	-	Kemenko Maritim	Kemenlu, KKP, TNI, Polri	APBN
		Pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	Menjaga sumber daya ikan yang berkelan- jutan	<i>Regional Plan of Action (RPOA) IUU Fishing</i>	v	v	v	v	KKP	Kemenlu, Kemen-LHK, Polri, LPI	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
				Penetapan RPOA sebagai dasar kebijak-an penangan-an sumber da-ya ikan dan penanggulang-an, pencegah-an, dan pem-berantasan IUU Fishing							
		Pengelolaan sumber daya ikan	Menjaga sum-ber daya ikan yang berkelan-jutan	<i>Regional Fisheries Management Organization (RFMO)</i> Terjaganya kebijakan dan penetapan ketentuan yang berwa-wasan pemba-ngunan berke-lanjutan	v	v	v	v	Kemenlu, KKP	Kemen-LHK, LIPI	APBN
		Penelitian dan pengem-bangan iptek perikanan	Keblanjutan pembangunan sektor perikan-an di Asia Tenggara yang berkesinam-bungan	<i>Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAPDEC)</i>	v	v	v	v	KKP	Kemenlu, Kemen-LHK, Kemennstek-dikti, LIPI	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
				Kebijakan pembangunan perikanan Indonesia di kawasan terjaga							
4.	Peningkatan Penempatan Warga Negara Indonesia (WNI) di Berbagai Organisasi Internasional Bidang Kelautan	Pencalonan WNI di organisasi internasional kemaritiman	Pencalonan Hakim Mahka-mah Interna-sional untuk Hukum Laut (<i>International Tribunal for the Law of the Sea</i> - ITLOS)	Terpilihnya WNI sebagai Hakim ITLOS	v	v	-	-	Kemenlu	Kemenko Maritim, Kemenhub, KKP,Kemen-setneg, Sekretariat Kabinet (Setkab), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), BIG	APBN
			Perumusan kebijakan penempatan Aparatur Sipil Negara pada organisasi internasional	Penetapan kebijakan dan peraturan	-	v	v	v	Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)	Kemenhub, Kemen-ESDM, KKP, Kementerian Ketenaga-kerjaan (Kemnaker), Kemenlu, Kemen-setneg, Setkab, LIPI,	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
										BPPT	
A.3 PENYELESAIAN TOPONIMI											
1.	Pembakuan Nama Pulau	Pendaya-gunaan pulau-pulau kecil	Pulau kecil yang divalidasi pembakuan namanya		500 pulau	550 pulau	-	-	KKP	Kemenko Maritim, Kemendagri, BIG, BNPP	APBN
			Validasi dan penamaan pulau-pulau kecil			1.250 pulau	1.250 pulau	1.500 pulau	TNI	Kemenko Maritim, Kemendagri, KKP, BIG, BNPP	APBN
		Pemetaan rupabumi dan toponimi	Survei penamaan dan pendaftaran pulau		-	550 pulau	550 pulau	550 pulau	BIG	Kemenko Maritim, Kemendagri, KKP, BNPP	APBN
		Penataan wilayah administrasi, penegasan batas daerah, dan toponimi	Kebijakan bidang toponimi dan data wilayah		-	4 rumusan kebijakan	-	-	Kemendagri	BNPP	APBN
			Verifikasi dan terbakukan nama-nama pulau		-	1.100 pulau	-	-	Kemendagri	BNPP	

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG- GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
A.4 PENATAAN RUANG LAUT											
1.	Penciptaan Keterpaduan Lintas Program Antarsektor di Wilayah Laut	Review pro- gram kemari- timan nasio- nal	Teridentifikasi- nya program kemaritiman nasional dan berbagai per- masalahan	1 dokumen review kemari- timan	v	v	v	v	Kemenko Maritim	Kementerian/ Lembaga terkait	APBN
		Sinkronisasi program RPJMN	Sinkronnya RPJMN Kemaritiman	1 Perpres	v	v	v	v	Kemenko Maritim	Kementerian/ Lembaga terkait	APBN
		Sinkronisasi renja k/l	Sinkronnya renja k/l	Dokumen renja	v	v	v	v	Kemenko Maritim	Kementerian/ Lembaga terkait	APBN
2.	Percepatan Penetapan Rencana Tata Ruang Laut Nasional	Perencanaan Ruang Laut	Tersedianya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perencanaan Ruang Laut	1 PP	1 PP	-	-	-	KKP	Kemenko Maritim, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kemen- ATR), Kemenkum- HAM, Kemen-LHK, Kemendagri, Kemen- setneg, Setkab	APBN
			Tersedianya Peraturan Pemerintah (PP) tentang	1 PP	1 PP	-	-	-	KKP	Kemenko Maritim, Kemenko Perekonomi-	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			Rencana Tata Ruang Laut Nasional Tahun 2016-2036							an, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen-PPN/ Bappenas), Kemen-ATR, Kemenhub, Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Kemen-ESDM, Kemenhan, Kemenlu, Kemenkum-HAM, Kemen-setneg, Setkab, TNI, BIG, BNPP	
		Pemetaan tata ruang dan atlas	Terselenggaranya pemetaan tata ruang	8 Dokumen Strategis Percepatan Rencana Tata Ruang (RTR) dan Pembangunan Wilayah	2	2	2	2	BIG	Kemenko Maritim, Kemen-PPN/ Bappenas, Kemen-ATR, KKP, Kemenhub, Kementerian Peker-	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
										jaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUFR), TNI	
		Pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor	Terlaksananya <i>review</i> kelayakan dan terjaminnya kualitas analisis lingkungan bagi rencana tata ruang laut nasional dan zona pesisir	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tata ruang laut nasional dan zonasi wilayah pesisir layak dan terjamin kualitasnya berbasis daya dukung dan daya tampung	-	1 KLHS Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) dan 6 KLHS zonasi pesisir	-	-	Kemen-LHK	KKP, TNI	APBN
3.	Percepatan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)	Perencanaan Ruang Laut	Tersedianya peraturan daerah tentang RZWP-3-K Provinsi	34 dokumen final/ Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi WP-3-K	8	26	-	-	KKP	Kemendagri, Kemen-ATR, Kemen-PPN/ Bappenas, Pemerintah Daerah (Pemda)	APBN, APBD

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
4.	Percepatan Penyelesaian Rencana Zonasi (RZ) Kawasan Strategis Nasional (KSN), RZ Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), dan RZ Kawasan Antarwilayah	Perencanaan Ruang Laut	Tersedianya Perpres tentang RZ KSN, KSNT, Teluk, Selat, dan RZ Laut	31 Peraturan Menteri (Permen) KP tentang RZKSNT (Pulau-Pulau Kecil Terluar/PPKT)	5 PPKT	10 PPKT	5 PPKT	11 PPKT	KKP	Kemenko Maritim, Kemenko Perekonomi-an, Kemen-PPN/ Bappenas, Kemen-ATR, Kemenhub, Kemenpar, Kemen-ESDM, Kemenhan, Kemenkum-HAM, Kemenlu, Kemen-setneg, Setkab, TNI, Polri, BIG, BNPP	APBN
				14 Perpres KSN	1	2	4	7	KKP	Kemenpar, Kemen-ESDM, Kemenhan, Kemenkum-HAM, Kemenlu, Kemen-setneg, Setkab, TNI, Polri, BIG, BNPP	APBN
				15 Perpres RZ kawasan antarwilayah (Teluk, Selat, dan Laut)	2	2	4	7	KKP	Kemenpar, Kemen-ESDM, Kemenhan, Kemenkum-HAM, Kemenlu, Kemen-setneg, Setkab, TNI, Polri, BIG, BNPP	APBN
		Perumusan legislasi per-tahanan	Menetapkan wilayah latih-an militer TNI		-	v	v	v	TNI	Kemenko Maritim, Kemenko-polhukam, Kemenhan	APBN
5.	Penyediaan Data Informasi Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial	Pemetaan kelautan dan lingkungan pantai	Terselenggara-nya pemetaan Lingkungan Pantai Indone-sia (LPI) Skala 1:10K, 1:25K, 1:50K,	144 Nomor Lembar Peta (NLP) peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI)	24	40	40	40	BIG, TNI	KKP, Kemen-LHK	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
	Tematik Terpadu dalam Kerangka Kebijakan Satu Peta		dan 1:250K								
			Pemutakhiran peta Negara Kesatuan Re-publik Indone-sia termasuk batas Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zo-na Ekonomi Eksklusif, dan Landas Konti-nen		v	v	v	v	BIG, TNI	Kemenko Maritim, Kemenko-polhukam, Kemenlu, Kemenhan	APBN
			Terselenggara-nya Pemetaan Lingkungan Laut Nasional (LLN) 1:250K	260 NLP peta LLN	26	78	78	78	TNI	Kemenko Maritim, Kemenko-polhukam, Kemenlu, Kemenhan, KKP, BIG	APBN
			Terselenggara-nya pemuta-khiran peta LPI dan LLN	60 NLP peta LPI termuta-khir	20	0	20	20	TNI	Kemenko Maritim, Kemenko-polhukam, Kemenlu, Kemenhan, KKP, BIG	APBN
			Terselenggara-nya pemetaan garis pantai	9.060 Line Kilometer (LnKm)	1.440	2.540	2.540	2.540	BIG, TNI	Kemenko Maritim, LIPI, LAPAN,	APBN. BUMN

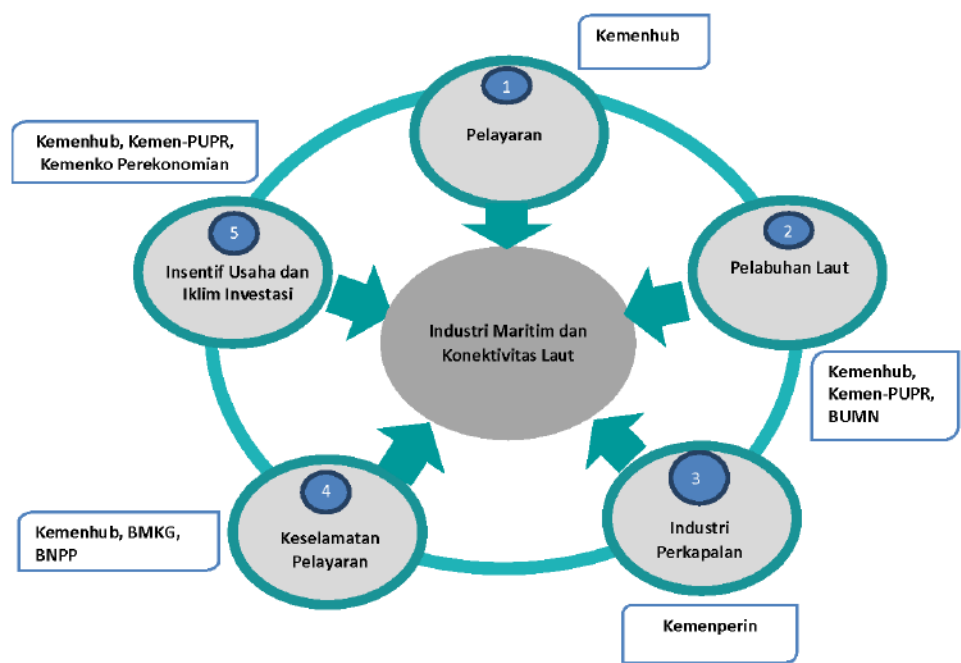
NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
6.	Penyeder-hanaan Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	Penyeder-hanaan perizinan di lingkungan Kementerian Perhubungan	Menurunnya waktu peng-urusan per-izinan	Pengalihan pengurusan perizinan dari manual men-jadi <i>online</i>	-	-	-	100%	Kemenhub	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen-kominfo)	APBN
		Perencanaan ruang laut	Tersedianya Peraturan Pemerintah tentang izin lokasi dan izin pengelolaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	1 Peraturan Pemerintah	-	1	-	-	KKP	Kemenko Maritim, Kemenhub, Kemen-ATR, Kemen-ESDM, Kemenkum-HAM, Kemensetneg, Setkab	APBN
			Tersedianya Peraturan Pemerintah tentang Bangunan dan Instalasi Laut	1 Peraturan Pemerintah	-	1	-	-	KKP	Kemenko Maritim, Kemenhub, Kemen-ESDM, Kemenkum-HAM, Kemen-PUPR, Kemen-ATR, Kemensetneg, Setkab, Polri	APBN
7.	Penguatan Pengelolaan Wilayah Daerah	Pendayagu-naan pesisir	Kawasan pesi-sir yang terfa-silitasi penge-lolaannya	16 kawasan	4	4	4	4	KKP	Kemenko Maritim, Kemendagri, Kemenpar,	APBN, APBD

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
	Aliran Sungai (DAS), Pesisir Laut, dan Pulau-Pulau Kecil melalui Manajemen Terpadu dan Berkelanjut-an		secara terpadu							Kemen-ESDM, Kemen-LHK, Kemen-PUPR, Kemen-PPN/ Bappenas, Pemda	

PROGRAM PRIORITAS B
INDUSTRI MARITIM DAN
KONEKTIVITAS LAUT

PROGRAM PRIORITAS B
INDUSTRI MARITIM DAN KONEKTIVITAS LAUT

Program prioritas industri maritim dan konektivitas laut terdiri dari 5 (lima) kegiatan prioritas, yaitu: (1) Pelayaran; (2) Pelabuhan Laut; (3) Industri Perkapalan; (4) Keselamatan Pelayaran; dan (5) Insentif Usaha dan Iklim Investasi. Secara skematik, 5 (lima) kegiatan prioritas tersebut digambarkan sebagai berikut:



Isu dan Kondisi Saat ini

Konektivitas laut (tol laut) yang handal merupakan kebutuhan, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas sehingga konektivitas laut harus mampu menghubungkan titik-titik penting dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu, konektivitas laut perlu didukung oleh penguatan infrastruktur dan industri maritim yang mencakup industri galangan kapal dan komponen perkapalan, pelabuhan dan jasa maritim, serta industri pelayaran.

Program pembangunan tol laut adalah salah satu upaya untuk mengurangi disparitas regional antara Wilayah Indonesia Bagian Barat dengan Wilayah Indonesia Bagian Timur yang telah mengakibatkan terjadinya

ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Tol laut diharapkan menjadi solusi untuk memperlancar arus pertukaran komoditas, meningkatkan mobilitas masyarakat, dan pemerataan pembangunan ekonomi. Disparitas harga yang sangat tinggi selama ini dirasakan oleh masyarakat di Wilayah Timur Indonesia karena biaya logistik yang tinggi, contohnya Papua. Hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Wilayah Indonesia Bagian Barat dengan Wilayah Indonesia Bagian Timur yang ditunjukkan oleh ketimpangan sebaran kontribusi PDB antarwilayah yang cukup tinggi. Pada tahun 2013, kontribusi PDB Sumatra mencapai 23,8%, Jawa mencapai 58,0%, Bali-Nusa Tenggara mencapai 2,5%, Kalimantan mencapai 8,7%, Sulawesi mencapai 4,8%, dan Papua mencapai 2,2 % (Bappenas, 2015).

Implementasi tol laut diantaranya bertujuan untuk meningkatkan kinerja transportasi laut melalui perbaikan jaringan pelayaran domestik dan internasional, serta meningkatkan peran transportasi laut Indonesia yang saat ini belum optimal, sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan berdampak terhadap terciptanya keunggulan kompetitif bangsa, terciptanya kekuatan industri nasional di seluruh *hinterland* pelabuhan strategis, serta disparitas harga yang rendah.

1. Pelayaran

Transportasi angkutan laut domestik masih terpusat melayani wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi yaitu di Wilayah Indonesia Bagian Barat. Di Wilayah Indonesia Bagian Timur, walaupun transportasi laut telah menjadi tulang punggung aktivitas pergerakannya namun saat ini pengembangannya belum optimal. Hal ini menyebabkan pergerakan atau distribusi barang antar kedua wilayah tidak berimbang.

Potensi ekonomi perhubungan laut diperkirakan mencapai USD 25 miliar/tahun, di mana Indonesia memiliki tiga jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang dilalui lebih dari 45% total barang dan komoditas perdagangan dunia dengan nilai sekitar USD 1.500 triliun/tahun yang diangkut oleh kapal-kapal niaga (UNCTAD, 2012). Namun demikian, potensi ini belum dimanfaatkan secara signifikan oleh pelabuhan-pelabuhan di sepanjang lokasi ALKI. Selain itu, penggunaan armada niaga nasional untuk angkutan ekspor dan impor juga masih rendah. Di sisi lain, terkait pelayaran rakyat (Pelra), masih belum sesuai dengan standar dan mayoritas kapal armada niaga nasional sudah berumur lebih dari 20 tahun.

Di samping itu, kinerja logistik nasional Indonesia masih tergolong rendah dan belum optimal, hal tersebut merujuk pada Indeks Kinerja Logistik Global (*Logistic Performance Index/LPI*) yang dikeluarkan oleh *World Bank* pada tahun 2014. Berdasarkan peringkat *Logistic Performance Index*, Indonesia menduduki peringkat ke-53 dari 160 negara yang disurvei. Biaya logistik di Indonesia yang tinggi, mencapai 24% dari PDB, menyebabkan rendahnya daya saing Indonesia secara umum.

2. Pelabuhan Laut

Pembangunan jaringan pelabuhan strategis yang siap menampung kapal-kapal ukuran besar merupakan salah satu kebutuhan yang perlu segera dipenuhi. Sebaran pelabuhan tersebut akan dihubungkan oleh jaringan pelayaran yang dapat mencakup segenap wilayah tanah air. Dalam RPJMN 2015-2019, direncanakan pengembangan dan pembangunan 24 pelabuhan strategis yang terintegrasi dalam konsep tol laut, terdiri atas pelabuhan *feeder* dan pelabuhan *hub*. Idealnya, beberapa pelabuhan harus mampu dilalui kapal-kapal besar berbobot 3.000-10.000 TEUs. Sementara rata-rata pelabuhan yang tersedia hanya memiliki kedalaman 9-12 meter, sehingga hanya dapat disinggahi kapal dengan bobot maksimal 4.000 TEUs.

Secara umum, isu utama yang dihadapi dalam pengembangan pelabuhan adalah terkait produktivitas bongkar muat (*dwelling time*) yang belum efisien; konektivitas intra dan antarinfrastruktur transportasi darat dan laut yang rendah; kedalaman alur pelayaran yang belum optimal; fasilitas pelabuhan, kapasitas dermaga, dan akses keluar masuk pelabuhan yang masih terbatas; kontribusi biaya di pelabuhan yang masih tinggi; serta kapasitas dan kualitas manajemen kawasan pelabuhan yang rendah.

3. Industri Perkapalan

Pasca penerapan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, penerapan *azas cabotage* memang berhasil meningkatkan armada nasional hingga 100% pada kurun waktu 2005-2015. Namun demikian, jumlah penambahan armada yang diproduksi oleh industri galangan kapal dalam negeri hanya mencapai kurang dari 10% dan impor kapal masih mendominasi, sehingga nilai

investasi pelayaran untuk pengadaan kapal menjadi tidak optimal. Tingginya impor kapal terjadi karena harga kapal impor lebih murah dibandingkan dengan harga kapal yang diproduksi oleh galangan kapal dalam negeri. Akibatnya, *utilisasi* atau rasio penggunaan terhadap kapasitas terpasang industri galangan kapal dalam negeri untuk membangun kapal baru hanya 60%.

Saat ini, industri galangan lebih banyak untuk pemeliharaan bukan pembuatan kapal baru, karena ketergantungan komponen pembuatan kapal dari impor mencapai 60%, serta penguasaan teknologi pembuatan kapal dan penyediaan infrastruktur pendukungnya masih rendah. Industri galangan kapal dominan berada di Kawasan Barat Indonesia. Isu dan permasalahan lainnya terkait pengembangan industri galangan kapal adalah tenaga kerja yang terbatas, industri komponen dalam negeri yang belum berkembang, kapasitas teknologi yang masih rendah, fasilitas produksi yang terbatas, regulasi yang belum kondusif, biaya energi yang mahal, kluster industri yang belum terbentuk, serta pasar yang tidak efisien. Tantangan lainnya yang terkait industri perkapalan adalah belum tersedianya kapal penangkap ikan yang “*ocean going*” untuk “mengisi kekosongan” pasca moratorium lebih dari 1.100 kapal penangkap ikan buatan luar negeri.

4. Keselamatan Pelayaran

Keselamatan pelayaran merupakan jaminan yang perlu diberikan bagi kapal-kapal yang melintasi wilayah laut Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki tiga jalur ALKI sebagai jalur perdagangan laut internasional yang cukup padat, maka kewajiban Indonesia untuk dapat memberikan kepastian bagi keselamatan pelayaran. Pemerintah telah menetapkan alur dan pelintasan melalui pelaksanaan penandaan terhadap bahaya kenavigasian, serta pemutakhiran kondisi perairan. Pemberian koridor pelayaran bagi kapal-kapal yang berlayar melintasi perairan Indonesia diikuti dengan penandaan bagi bahaya kenavigasian. Peraturan keamanan dan keselamatan di alur pelayaran merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang kelancaran transportasi laut dan mencegah terjadinya kecelakaan. Keselamatan pelayaran merupakan kebutuhan sehingga perlu segera diwujudkan dengan mengaktifkan fungsi-

fungsi keselamatan pelayaran melalui pembentukan lembaga dan manajemen serta fasilitas sarana dan prasarananya.

5. Insentif Usaha dan Iklim Investasi

Insentif dan iklim usaha investasi yang kondusif sangat dibutuhkan untuk menggairahkan usaha dan meningkatkan daya saing bisnis. Salah satu hal yang menghambat industri galangan kapal dalam negeri adalah tingginya suku bunga kredit perbankan yang mencapai 13-14%, sehingga memberatkan industri galangan untuk bersaing dengan industri galangan kapal negara lain yang memiliki tingkat suku bunga lebih kompetitif. Negara-negara dengan industri galangan kapal yang kuat memberikan bunga bank yang kompetitif, berkisar antara 5-6%. Untuk itu perlu diciptakan iklim investasi yang kompetitif dan pemberian insentif yang tepat bagi tumbuh kembangnya industri maritim nasional.

Secara rinci, Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2016–2019 untuk program prioritas industri maritim dan konektivitas laut, dapat dilihat pada matriks berikut:

RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA 2016–2019
PROGRAM PRIORITAS B. INDUSTRI MARITIM DAN KONEKTIVITAS LAUT

Sasaran Utama: Menurunnya biaya logistik dari 23,6% pada tahun 2015 menjadi 19,2% pada tahun 2019											
NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
B.1 PELAYARAN											
1.	Pengembangan Sistem Konektivitas Transportasi Kelautan melalui Peningkatan Pelayaran	Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan laut	Jumlah rute penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dalam rangka pelaksanaan tol laut	9 trayek (kumulatif)	6 trayek	9 trayek	9 trayek	9 trayek	Kemenhub	Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag)	APBN
		Tersedianya sarana, jasa, dan manajemen <i>cabotage</i>	Terjaminnya kapal-kapal milik Indonesia melayani angkutan komoditas di dalam negeri	Di dalam wilayah yurisdiksi RI	-	Semua rute dalam negeri	Semua rute dalam negeri	Semua rute dalam negeri	Kemenhub	Kemenko Maritim, Swasta	APBN, Swasta

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
	Laut		Penataan pelabuhan <i>hub</i> sebagai <i>global transshipment port</i> di Asia Tenggara		-	v	v	v	Kemenhub, Kemen-PUPR	Kemen-BUMN	APBN
		Pembangunan/lanjutan/ penyelesaian dan pengembangan pelabuhan laut non-komersial	Meningkatnya kapasitas sarana prasarana (sarpras) transportasi laut untuk mengurangi <i>backlog</i> dan <i>bottleneck</i>	100 pelabuhan (kumulatif)	93	95	98	100	Kemenhub	Kemen-PUPR, Kemenperin	APBN
		Pembangunan <i>dryport</i> di Jabodetabek, Semarang, dan Surabaya, serta survei jalur transportasi kereta api dan truk kontainer	Terbangunnya <i>dryport</i> dan terlaksananya survei jalur kereta api dan truk kontainer intermoda	Kawasan Barat: Jabodetabek Penambahan satu buah <i>dryport</i> lagi yang masing-masing berkapasitas 9 juta TEUS/tahun sehingga total 18 juta TEUS/tahun	-	v	v	v	Kemenhub, Kemen-PUPR	Kemenkeu (Bea Cukai), Kementan, KKP, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), BUMN	APBN, BUMN, Swasta, <i>Joint Venture</i>

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
				Pembangunan <i>dryport</i> di Surabaya, Gresik, Semarang, Belawan termasuk Kuala Tanjung, Sumatra Utara adalah untuk menurunkan <i>duelling time</i> dan kelancaran pergerakan container Kawasan Timur: Sorong dan Bitung (disurvei untuk lokasi <i>dryport</i> yang berdekatan dengan kawasan industri dan nilai pembebasan lahan yang masing-masing mampu menampung 12,5 juta TEUS/tahun)							
		Terbangunnya PLB (Pusat Logistik)	Terstruktur tatanan otoritas didalam	Memperlancar kirim, terima dan identifikasi		v	v	v	Kemenkeu	Kemenhub, Kemendag, Polri,	APBN, Swasta

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		Berikat)	PLB yang memiliki fungsi identifikasi kontainer dan hal ikhwal kepabeanan	si dan keamanan komo-diti di PLB						Swasta	
		Pelabuhan Kalibaru Jakarta	Meneruskan pembangunan infrastruktur tahap yang kedua di pulau N reklamasi Penataan dan pembangunan infrastruktur kepelabuhan-an di pulau O, P, dan Q (sekitar Kalibaru, Marunda bagian utara)	Terjaminnya kapasitas pelayanan dermaga/ <i>sea quay</i> pelabuhan di Jakarta sampai sekitar 16 juta TEUS/ tahun dan terbangunya jalur transportasi intermoda truk kontainer dan kereta api ke dan dari dua <i>dryport</i> di Jabodetabek		v	v	v	Kemenhub, Kemen-PUPR, BUMN	Pemda, Swasta	APBN, BUMN, BUMD, Swasta, <i>Joint Venture</i>
		Pengerukan alur pelayaran/ kolam pelabuhan	Kedalaman alur pelayaran sesuai dengan perencanaan penggunaan alur	82 lokasi pengerukan alur	11 lokasi	12 lokasi	33 lokasi	26 lokasi	Kemenhub	TNI, Polri, Swasta	APBN, Swasta, <i>Joint Venture</i>

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		Pembangunan dan peningkatan jalan akses menuju pelabuhan	Terbangunnya panjang jalan menuju pelabuhan Jalan dan rel kereta api menuju dan ke pelabuhan harus terpadu pada sistem intermoda transportasi terutama ke dan dari kawasan industri agar dapat menurunkan <i>dwelling time</i>	25 lokasi pelabuhan Jakarta (Tanjung Priok/ Kalibaru), Kabupaten Subang (Patimban), Surabaya (Tanjung Perak) dan Gresik, Semarang (Tanjung Mas), Sumatra Utara (Belawan dan Kuala Tanjung)	-	7 lokasi	14 lokasi	4 lokasi	Kemen-PUPR	Kemenhub, Pemda, Swasta	APBN, APBD, Swasta, BUMD, <i>Joint Venture</i>
		Peningkatan pemanfaatan jalur sungai, danau dan penyeberangan mendukung pelabuhan laut	Termanfaatkannya jalur sungai, danau dan penyeberangan ke daerah pedalaman untuk angkutan penumpang dan barang	Daerah Kalimantan	v	v	v	v	Kemenhub	Pemda	APBN, APBD
		Pengembangan infrastruktur keras dan lunak tekno-	Terintegrasi dan terlaksananya Indonesia <i>National</i>	Pelabuhan <i>hub</i> internasional	v	v	v	v	Kemenhub	Kemenko Maritim, Kemenkom-info,	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		logi informasi	Single Window (INSW) dengan Inaport khusus untuk pe-labuhan eks-por/impor internasional							Kemenhub, Kementan, Kemenkeu, Kemendag	
B.3 INDUSTRI PERKAPALAN											
1.	Pengembang-an Kemam-puan dan Ka-pasitas Ba-dan Usaha Nasional di Bidang Pem-bangunan dan Penge-lolaan Infra-struktur yang Berdaya Saing dan Bertaraf Internasional dengan Negara Mitra	Program standardisasi kapal	Meningkatnya produktivitas dan kualitas produk industri perkapalan domestik	a. Desain kapal:							
				1. Kajian desain standar kapal ikan	-	1 kajian	-	-	Kemenperin	Kemenhub, Kemen-BUMN, KKP	APBN
				2. Kajian desain standar kapal barang	-	1 kajian	-	-	Kemenperin	Kemenhub, Kemen-BUMN	APBN
				3. Kajian desain standar kapal penumpang	-	-	1 kajian	-	Kemenperin	Kemenhub, Kemen-BUMN	APBN
				4. Pembuatan desain kapal ikan, kapal barang, dan kapal penumpang	-	2 desain	3 desain	3 desain	Kemenperin	Kemenhub, KKP, Kemen-BUMN	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
				b. Rekomendasi kebijakan pengembangan desain kapal	-	Reko-mendasi kebijakan bea masuk kompo-nen kapal	-	Reko-mendasi kebijak-an in-sentif bagi peng-guna desain kapal standar	Kemenperin	Kemenhub, BUMN	APBN, BUMN
			Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) industri perkapalan	760 orang	140	160	200	260	Kemenperin	Kemenhub, BUMN, BPPT	APBN, BUMN
			Tumbuhnya industri komponen perkapalan	15 produk yang dikem-bangkan dalam bimbingan teknis industri komponen ka-pal	-	5 produk	5 produk	5 produk	Kemenperin	Kemenhub, BUMN	APBN, BUMN
			Meningkatnya akses pasar dan penguasaan teknologi industri perka-palan dalam negeri	Fasilitasi pertemuan bisnis dalam rangka mem-bangun ke-mitraan indus-tri perkapalan dalam negeri	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kemenperin	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
				dengan mitra bisnisnya di luar negeri							
			Meningkatnya sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di bidang industri perkapalan	30 sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) bidang perkapalan	-	10	10	10	Kemenperin	BUMN	APBN, BUMN
			Meningkatnya produktivitas dan kualitas produk industri perkapalan	Restrukturisasi galangan kapal dalam negeri (kajian dan kebijakan)	-	1 kajian	1 kebijakan	1 kebijakan	Kemenperin	KKP, Kemenhub, BKPM	APBN
B.4 KESELAMATAN PELAYARAN											
1.	Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Pelayaran di Laut, Penataan Pelabuhan Lama dan Pembangunan Pelabuhan Baru	Kenavigasian laut	Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	548 unit	137	137	137	137	Kemenhub	TNI	APBN
			Pembangunan dan <i>upgrade Vessel Traffic System</i> (VTS)	29 lokasi	3	4	20	2	Kemenhub	TNI	APBN
			Pembangunan dan <i>upgrade Global Mari-</i>	121 lokasi	23	55	26	17	Kemenhub	TNI	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			<i>time Distress Safety System</i> (GMDSS)								
			Pembangunan sistem telekomunikasi pelayaran	72 unit	17	18	18	19	Kemenhub	TNI	APBN
			Pembangunan baru/lanjutan/penyelesaian kapal kenavigasian	41 unit	5	10	15	11	Kemenhub	TNI	APBN
			Pembangunan Sarana Bantu Peramalan Cuaca Pelayaran (SBPCP)		v	v	v	v	Kemenhub	BMKG	APBN
		Penetapan Alur Pelayaran, contoh: <i>traffic separation scheme</i> (TSS)	Meningkatnya jumlah alur yang ditetapkan.	Ditetapkannya alur pelayaran di 4 pelabuhan utama (Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar), ditetapkannya TSS di Selat Lombok dan Selat Sunda, ditetap-	25%	25%	25%	25%	Kemenhub	TNI, Polri	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG- GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
				kannya Alur Pelayaran di jalur Tol Laut							
		Kawasan Indonesia Barat : Selat Malaka ke arah selatan, pembuatan alur pelayaran baru dan pendalaman alur sesuai standar internasional berikut tergelarnya <i>traffic separation scheme</i> (TSS) berdasarkan regulasi International Maritime Organization (IMO)	Mencairkan kepadatan jumlah kapal yang melintas di Selat Phillips dan Selat Malaka yang sempit dan amat bahaya	Meminimalisir terjadinya kecelakaan fatal dan pencemaran laut di Selat Malaka	v	v	v	v	Kemenhub	TNI, Polri	APBN
			1. Menjadi <i>multiplier effect</i> bagi ekonomi dipantai timur Sumatra sehingga arus pergerakan komoditi dari dalam negeri dan dari mancanegara dapat tersebar dengan aman dan lancar 2. Menata keselamatan bernavigasi di Selat Malaka sampai ke	Pendalaman alur-laut yang ada, pembuatan alur laut baru sampai kedalaman 22 meter <i>Low Water Spring</i> (LWS), area manuver dan area lego jangkar di sekitar pelabuhan/ alur laut	v	v	v	v	Kemenhub	Kemenko Maritim, KKP, TNI, Polri, Pemda, Swasta	APBN, APBD, Swasta, <i>Joint Venture</i>
				Lintas laut di alur ini pada poros: Pulau Karimun Kecil, Pulau Kundur,	v	v	v	v	Kemenhub	Kemenko Maritim, KKP, TNI, Polri, Pemda, Swasta	APBN, APBD, Swasta, <i>Joint Venture</i>

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG- GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			utara Selat Bangka dan sebaliknya	Selat Durian, laut sekitar Kabupaten Palalawan Indragiri Hilir, sampai di utara Selat Bangka atau sebaliknya							
			3. Pendalaman alur, pembuatan alur laut baru, area manuver, area lego jangkar serta manajemen alur dengan sistem perambuan sesuai standar internasional	Membuat pelabuhan baru di seputar titik belok di Selat Phillip di Pulau Karimun Kecil agar menjadi titik timbun sebar berbagai komoditas dari dan ke pasar domestik atau mancanegara	v	v	v	v	Kemenhub	Kemenko Maritim, KKP, TNI, Polri, Pemda, Swasta	APBN, APBD, Swasta, <i>Joint Venture</i>
				Membuat satu pelabuhan baru di Provinsi Riau (Kabupaten Palalawan atau Kabupaten Indragiri hilir) yang berlaut dalam sehing-	v	v	v	v	Kemenhub	Kemenko Maritim, KKP, TNI, Polri, Pemda, Swasta	APBN, APBD, Swasta, <i>Joint Venture</i>

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
				ga menaikkan pertumbuhan ekonomi							
		Kawasan Indonesia Timur: pe-ngembangan Sorong dan Bitung menjadi pelabuhan <i>hub</i>	Pengembangan pelabuhan Sorong dan Bitung sebagai pelabuhan <i>hub</i> di bagian ti-mur tol laut	Mengembang-kan kedua pelabuhan (Sorong dan Bitung) yang berlaut dalam, baik sebagai pelabuhan ekspor impor dan berpredi-kat titik tim-bun sebar komo-ditas di/ke domestik mau-pun yang ber-asal dari man-canegara	v	v	v	v	Kemenhub	Kemenko Maritim, Swasta	APBN, Swasta, <i>Joint Venture</i>
		Pengelolaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan peme-nuhan sara-na, prasara-na, operasi, dan informasi pencarian dan pertol-	Pengadaan sa-rana dan pra-sarana penca-rian dan pertol-ongan	Paket	35	35	35	35	Badan Nasional Pencarian dan Perto-longan		APBN
			Pengadaan <i>Rescue Boat</i>	Unit	5	5	5	5	Badan Nasional Pencarian dan Perto-longan		APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		longan yang memadai	Pengadaan <i>Rigid Inflatable Boat</i>	Unit	11	11	11	11	Badan Nasional Pencarian dan Perto-longan		APBN
			Pengadaan <i>Rubber Boat</i>	Unit	42	42	42	42	Badan Nasional Pencarian dan Perto-longan		APBN
			Pengadaan peralatan penca-rian dan pertolongan	Paket	1	1	1	1	Badan Nasional Pencarian dan Perto-longan		APBN
			Pengadaan Helikopter	Unit	2	3	2	3	Badan Nasional Pencarian dan Perto-longan		APBN
		Pendidikan dan pelatihan serta pema-syarakatan pencarian dan pertol-ongan	Penyelenggara-an pelatihan dan pendidik-an pema-syara-kan penca-rian dan pertol-ongan	Paket	35	35	35	35	Badan Nasional Pencarian dan Perto-longan		APBN

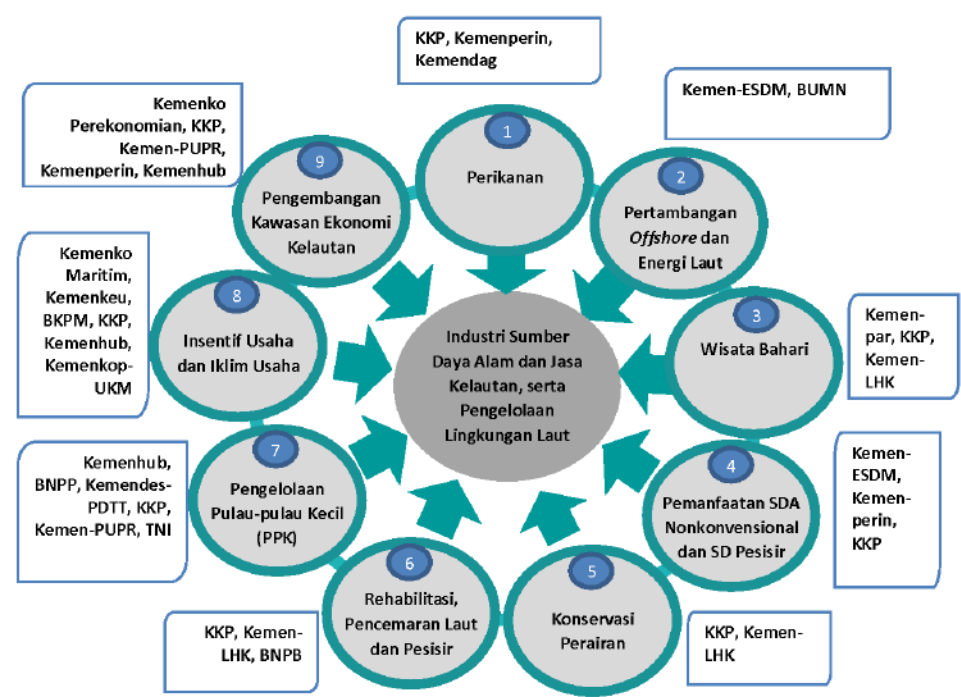
NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		Pengelolaan operasi dan latihan pencarian dan pertolongan	Pelaksanaan operasi dan latihan pencarian dan pertolongan	Paket	34	34	34	34	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		APBN
		Pengelolaan komunikasi pencarian dan pertolongan	Pengelolaan komunikasi pencarian dan pertolongan	Paket	35	35	35	35	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan		APBN
B.5 INSENTIF USAHA DAN IKLIM INVESTASI											
1.	Peningkatan Kemampuan Sumber Pendanaan Nasional untuk Pembangunan Infrastruktur Kelautan	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) melalui kerja sama pemanfaatan, perjanjian sewa, atau kerja sama operasi dengan badan usaha	Optimalisasi BMN dan Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kemenhub	Perjanjian	4	8	8	8	Kemenhub	Kemenkeu, Kemen-BUMN, BUMN	APBN, BUMN
2.	Penciptaan iklim Investasi yang Baik untuk Pembangunan dan Pengelolaan In-	Pelimpahan perizinan bidang transportasi laut melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Percepatan, penyederhanaan, dan kemudahan perizinan atau investasi	Peraturan Menteri	v	v	v	v	Kemenhub	BKPM	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
	frastruktur Kelautan	(PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal									
		Deregulasi persyaratan kepemilikan modal usaha di bidang transportasi laut	Peningkatan investasi dan pemanfaatan pembiayaan alternatif di bidang transportasi laut	Peraturan Menteri dan Perjanjian (Konsesi)	1 Permen dan 4 perjanjian konsesi	4 perjanjian konsesi	4 perjanjian konsesi	4 perjanjian konsesi	Kemenhub		APBN
3.	Peningkatan Kerja Sama Investasi Pembangunan Infrastruktur dengan Negara-Negara Mitra	Koordinasi kebijakan pengembangan investasi	Tersusunnya rekomendasi kebijakan		-	v	v	V	Kemenko Perekonomian, Kemen-PUPR	KKP, BKPM	APBN

PROGRAM PRIORITAS C
INDUSTRI SUMBER DAYA ALAM DAN
JASA KELAUTAN SERTA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN LAUT

PROGRAM PRIORITAS C
INDUSTRI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA KELAUTAN SERTA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN LAUT

Program prioritas industri sumber daya alam dan jasa kelautan serta pengelolaan lingkungan laut terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan prioritas, yaitu: (1) Perikanan; (2) Pertambangan *Offshore* dan Energi Laut; (3) Wisata Bahari; (4) Pemanfaatan Sumber Daya Alam Nonkonvensional dan Sumber Daya Pesisir Berkelanjutan; (5) Konservasi Perairan; (6) Rehabilitasi, Pencemaran Laut dan Pesisir; (7) Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil; (8) Insentif Usaha dan Iklim Usaha; dan (9) Pengembangan Kawasan Ekonomi Kelautan. Secara skematik, 9 (sembilan) kegiatan prioritas tersebut digambarkan sebagai berikut:



Isu dan Kondisi Saat ini

1. Perikanan

Sumber daya alam perikanan merupakan salah satu potensi unggulan perairan Indonesia. Sumber daya perikanan terbagi ke dalam dua

kelompok besar, yaitu tangkap dan budi daya. Perairan laut nusantara dibagi ke dalam 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sesuai karakteristik sumber daya ikan yang terdapat di dalamnya, dan karakteristik biofisik dinamika laut yang menunjang perikanan.

Indonesia merupakan salah satu negara produsen perikanan utama di dunia. Pada tahun 2014, untuk perikanan tangkap, Indonesia menempati urutan kedua dengan nilai volume 6,48 juta ton atau menyumbang 7,38% perikanan tangkap di dunia (*FAO, of Fisheries and Aquaculture 2016*), dengan komoditas utama Tuna, Tongkol, Cakalang dan Udang. Provinsi yang merupakan produsen perikanan tangkap yang terbesar adalah Maluku, Jawa Timur dan Sumatra Utara. Sementara itu, produksi perikanan budi daya pada tahun 2014 mencapai 14,5 juta ton dengan komoditas utamanya adalah produk rumput laut (70%). Indonesia merupakan produsen terbesar kedua di dunia untuk komoditas rumput laut dengan volume 10,08 juta ton, dan terbesar ketiga di dunia untuk komoditas ikan dengan volume 4,28 juta ton (*FAO, of Fisheries and Aquaculture 2016*). Pengembangan usaha perikanan budi daya laut dan payau masih terkendala oleh ketersediaan benih unggul dan tahan penyakit serta ketergantungan terhadap bahan baku impor untuk pakan. Selanjutnya, pertumbuhan PDB subsektor perikanan pada tahun 2015 mencapai angka 8,37%, melebihi angka pertumbuhan sektor pertanian, dengan kontribusi utama berasal dari PDB perikanan budi daya.

Tantangan yang dihadapi ke depan adalah terkait pengelolaan WPP dan peningkatan daya saing produk untuk mewujudkan perikanan yang berkelanjutan. Restrukturisasi armada adalah kebutuhan yang penting untuk meningkatkan kemampuan jelajah armada tangkap yang didominasi oleh kapal penangkap ikan berukuran kecil. Pada tahun 2014, lebih dari 600 ribu unit kapal ikan atau lebih dari 99% total armada penangkap ikan Indonesia beroperasi di perairan laut teritorial. Sementara di ZEE Indonesia, jumlahnya kurang dari 1% total armada. Selanjutnya, terdapat 816 pelabuhan perikanan yang operasional, sekitar 70% diantaranya berada di Kawasan Barat Indonesia dan sekitar 30% di Kawasan Timur Indonesia. Selain itu, terdapat sekitar 60 ribu unit pengolahan ikan (UPI), dimana hampir 70% diantaranya berada di Pulau Jawa dan Sumatra (KKP, 2015). Tantangan lainnya adalah restrukturisasi armada perikanan tangkap, memperbaiki manajemen dan

infrastruktur pelabuhan perikanan menuju standar dunia serta meningkatkan daya saing dan produktivitas industri perikanan di pasar global.

Selain itu, diperlukan pembangunan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) yang mampu menjamin ketersediaan pasokan komoditas ikan kepada konsumen (domestik/luar negeri) secara tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat kuantitas.

2. Pertambangan *Offshore* dan Energi Laut

Lautan Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam dan mineral dasar laut. Sumber daya migas dan mineral adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga memerlukan pengelolaan yang tepat supaya pemanfaatannya optimal dan berkelanjutan. Menurut data yang diolah BPPT, dari 60 cekungan minyak yang ada di Indonesia, hampir 70% atau sekitar 40 cekungan terdapat di laut yang berpotensi menghasilkan 106,2 miliar barel setara minyak. Dari jumlah tersebut diperkirakan 57,3 miliar barel terkandung di lepas pantai, termasuk sekitar 32,8 miliar barel diantaranya terdapat di laut dalam.

Saat ini 91% aktivitas pertambangan berada di wilayah Indonesia Bagian Barat dan hanya 9% yang berada di wilayah Indonesia Bagian Timur. Dari 317 wilayah kerja migas se-Indonesia, 115 wilayah kerja diantaranya atau sekitar 36,3% merupakan wilayah kerja *offshore*. Hal tersebut, salah satunya disebabkan oleh tingginya biaya eksplorasi pertambangan di laut dan rendahnya penguasaan teknologi *offshore*. Di samping itu, telah terjadi pergeseran dari eksplorasi minyak kepada gas alam bawah laut.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang 70% wilayahnya merupakan lautan. Salah satu potensi laut yang dapat dikembangkan adalah energi laut, terdiri atas empat jenis yaitu: (1) energi gelombang (*wave power*); (2) energi pasang surut (*tidal power*); (3) energi arus laut (*current power*); dan (4) energi panas laut (*ocean thermal energy conversion/OTEC*).

3. Wisata Bahari

Wisata bahari menjadi salah satu andalan pembangunan perekonomian berbasis kelautan. Tingginya minat wisatawan untuk dapat menikmati pariwisata bahari didasarkan pada keunikan kondisi alam laut

dan budaya pesisir yang ada di Indonesia. Daya tarik wisata budaya terutama adalah kebudayaan masyarakat pesisir yang khas dari berbagai suku bangsa dan keragaman budaya. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan wisata bahari adalah masih terbatasnya infrastruktur, fasilitas pendukung dan promosi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Infrastruktur utama yang paling penting dalam pengembangan pariwisata berbasis kelautan adalah pengembangan aksesibilitas. Kawasan wisata berbasis kelautan sebagian besar berada di wilayah yang sulit dijangkau dan memiliki aksesibilitas yang terbatas tanpa alternatif pilihan transportasi yang memadai. Beberapa faktor lainnya yang menjadi tantangan pengembangan antara lain lemahnya kebijakan dan regulasi, keberlanjutan lingkungan, aspek kesehatan dan sanitasi, kurangnya sumber daya manusia/tenaga kerja terampil dan terlatih, serta rendahnya kemampuan pengelolaan/manajemen wisata bahari.

4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Nonkonvensional dan Sumber Daya Pesisir

Pemanfaatan sumber daya kelautan nonkonvensional merupakan suatu hal baru yang perkembangannya sejalan dengan kemajuan inovasi teknologi dan semakin intensif dilakukan oleh negara-negara maju, seperti pemanfaatan beragam mineral dasar laut, pemanfaatan potensi *deep sea water*, dan pendayagunaan alga serta plankton untuk pengembangan farmasi dan kedokteran. Indonesia sebagai negara yang memiliki kandungan sumber daya alam nonkonvensional yang beragam, secara bertahap perlu meningkatkan kapasitas iptek kelautannya melalui kegiatan survei, riset, dan kolaborasi antarinstansi penelitian untuk menggali data, memetakan potensi, sekaligus mencari upaya untuk mendayagunakan potensi tersebut bagi kemajuan bangsa.

Pemanfaatan sumber daya pesisir sebagai ekosistem paling produktif di perairan, yang terdiri dari ekosistem lamun, bakau, terumbu karang, serta estuari diupayakan agar memberikan manfaat yang optimal dalam mendukung aktivitas masyarakat pesisir. Ekosistem sumber daya pesisir tersebut berperan strategis dalam menunjang adaptasi perubahan iklim, mencegah abrasi dan intrusi air laut, serta sebagai sumber nutrisi bagi organisme laut. Tantangannya adalah bagaimana menjaga keberlanjutan kondisi ekosistem pesisir dalam mendukung program pembangunan.

5. Konservasi Perairan

Konservasi perairan merupakan kawasan perairan yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan, serta keberlanjutan lingkungan dan ekosistem. Komitmen Indonesia dalam bidang konservasi dilakukan dengan menjadi anggota *Convention on Bio Diversity* (CBD) pada tahun 1992. Indonesia juga menandatangani Protokol Nagoya pada tahun 2011. Serta, berpartisipasi dalam *Conference of the Parties Convention on Biological Diversity* (CoP CBD) di Brazil tahun 2006. Selanjutnya, dalam CTI *Summit* di Manado tahun 2009, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan sasaran seluas 20 juta ha wilayah konservasi laut pada tahun 2020. Saat ini luasan kawasan konservasi perairan adalah 17,3 juta ha.

6. Rehabilitasi, Pencemaran Laut dan Pesisir

Saat ini, isu rehabilitasi dan pencegahan pencemaran laut mendapat perhatian yang semakin serius. Berdasarkan data lapangan, pencemaran lingkungan laut semakin banyak terjadi, baik yang berasal dari sampah plastik (*plastic debris*) mencapai 0,48-1,29 juta ton per tahun atau menempati urutan kedua tertinggi setelah Cina, sampah organik dari rumah tangga, *waste water disposal*, *balast water*, dan sedimentasi pesisir karena kerusakan bakau dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Indonesia termasuk negara yang memiliki polusi laut yang cukup tinggi. Selain itu, potensi pencemaran di perairan Indonesia juga meningkat seiring dengan peningkatan arus pelayaran domestik ataupun lintas negara yang memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Indonesia memiliki nilai *Ocean Health Index* sebesar 67, lebih baik dari beberapa negara di ASEAN lainnya. Selain pencemaran, kerusakan ekosistem laut dan pesisir juga meningkat yang ditandai dengan peningkatan kondisi kerusakan terumbu karang di Indonesia, abrasi pantai, dan *coral bleaching*. *Data series* dan informasi kualitas lingkungan laut yang tersedia masih terbatas dan belum memadai.

7. Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia didominasi oleh pulau-pulau kecil yang tersebar. Dari 17.504 pulau di Indonesia, 34 pulau diantaranya merupakan pulau besar, dengan luasan di atas 2.000 km²,

sementara 17.470 pulau lainnya merupakan pulau-pulau kecil dengan luasan lebih kecil atau sama dengan dari 2.000 km². Selanjutnya dari komposisi kependudukan, jumlah pulau yang berpenduduk hanya berjumlah 1.753 pulau. Sebanyak 111 pulau-pulau kecil terluar berada di wilayah perbatasan, di mana 31 diantaranya merupakan pulau berpenduduk. Pulau-pulau kecil terluar tersebut memerlukan perhatian khusus karena menjadi lokasi penempatan titik dasar penarikan garis batas laut. Selain itu, pulau-pulau kecil terluar juga memiliki nilai strategis dalam aspek pertahanan, keamanan, ekonomi, dan lingkungan, juga memiliki potensi wisata bahari, perikanan, dan jasa kelautan, sehingga isu kesejahteraan dan infrastruktur dasar menjadi hal yang perlu ditingkatkan.

8. Insentif Usaha dan Iklim Usaha

Penciptaan iklim usaha yang baik dan insentif usaha di bidang kelautan merupakan langkah yang diperlukan dalam pengembangan sektor kelautan. Berbagai skema pengurangan pajak dan kemudahan investasi telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk merangsang tumbuhnya usaha perikanan yang kompetitif. Pemerintah telah berupaya menciptakan iklim yang kondusif untuk pertumbuhan dunia usaha melalui pemberian insentif fiskal berupa fasilitas pajak penghasilan (*tax allowance*) untuk penanaman modal dan usaha di sektor kelautan dan perikanan.

9. Pengembangan Kawasan Ekonomi Kelautan

Pengembangan kawasan ekonomi kelautan merupakan pendekatan pembangunan kelautan berbasis keunggulan regional. Model ini merupakan pendekatan dalam rangka memadukan potensi kawasan untuk mempercepat pembangunan dan pergerakan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan sebagai penggerak utama (*prime mover*) kawasan. Pengembangan kawasan tersebut bertumpu pada prakarsa daerah dan masyarakat, potensi sumber daya unggulan, akses pasar, dan dampak pertumbuhan terhadap wilayah sekitarnya. Tantangan ke depan adalah membangun kawasan ekonomi kelautan yang mampu menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang kompetitif di tingkat regional.

Secara rinci, Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2016–2019 untuk program prioritas industri sumber daya alam dan jasa kelautan serta pengelolaan lingkungan laut, dapat dilihat pada matriks sebagai berikut:

RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA 2016-2019
PROGRAM PRIORITAS C. INDUSTRI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA KELAUTAN SERTA PENGELOLAAN LINGKUNGAN LAUT

Sasaran Utama: 1. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan rumput laut masing-masing menjadi sebesar 6,98 juta ton dan 19,54 juta ton 2. Peningkatan luasan kawasan konservasi perairan menjadi 20 juta ha											
NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
C.1 PERIKANAN											
1.	Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi, dan Penguatan Mutu Produk Perikanan mulai dari Proses Pra-produksi, Produksi, Pengolahan, sampai dengan Pemasaran	Pengembang-an perdagangan dalam negeri daerah	Produk unggul-an yang difasili-tasi pemasar-annya	Melaksanakan forum dagang	34 daerah	34 daerah	34 daerah	34 daerah	Kemendag	KKP, Pemda	APBN, APBD
		Pengembang-an produk ekspor	Produk potensi-al ekspor	1. Melaksana-kan identi-fikasi pro-duk 2. Melaksana-kan pengem-bangan produk eks-por 3. Melaksana-kan peman-tauan dan evaluasi	55 produk	56 produk	60 produk	60 produk	Kemendag	KKP, Kemenperin	APBN
		Pengembang-an pasar dan informasi	Informasi pasar ekspor	1. Melaksana-kan penyus-unan data	24 layanan	24 layanan	24 layanan	24 layanan	Kemendag	KKP, Badan Pusat Statistik	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		ekspor		dan infor-masi pasar ekspor 2. Melaksana-kan penye-baran infor-masi pasar ekspor						(BPS)	
		Produksi dan usaha pem-budidayaan ikan	Sertifikasi cara pembenihan ikan yang baik unit budi daya udang	2.013 unit budi daya udang berser-tifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB) (kumulatif)	-	1.139	1.664	2.013	KKP		APBN
		Penataan dan pemanfaatan jasa kelautan	Produksi dan kualitas garam yang mening-kat	Produksi ga-ram pada tahun 2019 sebesar 3,6 juta ton de-ngan kualitas sebesar 70%	3 juta ton; 50% kualitas	3,2 juta ton; 60% kualitas	3,4 juta ton; 65% kualitas	3,6 juta ton; 70% kualitas	KKP	Kemenperin Kemendag, BMKG, BPS, Pemda	APBN, APBD
		Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkap ikan, dan sertifikasi awak kapal	Kapal perikanan yang terbangun	10.664 unit kapal	1.719	2.500	3.275	3.170	KKP	Kementeri-an Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop-UKM), Kemenperin	APBN, APBD

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (<i>Hazard Analysis Critical Control Point/HACCP</i>) pada Unit Pengolahan Ikan	Sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (HACCP)	1.300	1.325	1.355	1.395	KKP		APBN
		Pengendalian sistem pengaran-tinaan ikan dan sistem jaminan mutu	Pengendalian dan pengawas-an sistem pe-ngarantinaan ikan, mutu, dan keamanan hayati ikan	Layanan dan pengawasan di <i>exit/entry point</i> perbatas-an	73 %	76%	81%	87%	KKP		APBN
		Penumbuhan dan pengem-bangan indus-tri makanan, hasil laut, dan perikanan	Terbangunnya industri penun-jang dan indus-tri pengolahan hasil laut dan perikanan	1 dokumen <i>Feasibility Study</i> dan <i>Detailed Engineering Design</i>	-	1	-	-	Kemenperin	KKP, Pemda	APBN, APBD
				1 unit pembe-kuan ikan dan 3 pabrik es	1 unit pembe-kuan ikan di Maluku	1 unit pabrik es	2 unit pabrik es	-	Kemenperin	KKP, Pemda	APBN, APBD

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			Terbangunnya industri peng-olahan rumput laut berbasis <i>Alkali Treated Gracilaria</i> (ATG) dengan kapasitas 3.200 ton di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan	1 dokumen <i>Feasibility Study</i> dan <i>Detailed Engineering Design</i>	1	-	-	-	Kemenperin	KKP, Pemda	APBN, APBD
			Industri pengolahan rumput laut dengan kapa-sitas 3.200 ton (kumulatif)		-	400 ton	1.200 ton	1.600 ton	Kemenperin	KKP, Pemda	APBN, APBD
			Terbangunnya industri cang-kang kapsul dengan kapa-sitas 250 ribu cangkang kap-sul	1 unit <i>pilot project</i> indus-tri cangkang kapsul	-	-	1 unit	-	Kemenperin	KKP, Kemen-ristekdikti, BPPT, Perguruan Tinggi	APBN
3.	Pengelolaan dan Peman-faatan Sum-ber Daya Perikanan secara Lestari	Pengendalian penangkapan ikan	Tersedianya data perizinan kapal perikan-an pusat-daerah yang terintegrasi	34 provinsi (kumulatif)	16	20	25	34	KKP	Kemenhub, Pemda	APBN, APBD
		Penelitian dan pengem-bangan iptek perikanan	Terkajinya stok ikan (<i>stock assess-ment</i>)	Kajian stok ikan pada 11 Wilayah Pengelolaan	7	11	11	11	KKP	LPI, BPPT, Perguruan Tinggi	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
				Perikanan (WPP)							
		Pengelolaan sumber daya ikan	Laut teritorial dan perairan kepulauan yang dikelola sumber daya ikannya	11 WPP (kumulatif)	7	9	10	11	KKP	Pemda	APBN, APBD
			Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang dikelola sumber daya ikannya	7 WPP (kumulatif)	4	4	7	7	KKP	Pemda	APBN, APBD
			Perairan yang dipantau dan dievaluasi pengelolaan sumber daya ikannya, termasuk alokasi izin usaha penangkapan	11 WPP	11	11	11	11	KKP	Pemda	APBN, APBD
			Kapal perikanan yang menerapkan <i>logbook</i> penangkapan ikan	1.250 unit kapal (kumulatif)	500	750	1.000	1.250	KKP	Pemda	APBN, APBD

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
C.2 PERTAMBANGAN LEPAS PANTAI DAN ENERGI LAUT											
1.	Pengembangan dan Pe-manfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai de-ngan Prinsip Ekonomi Bi-ru dengan Memperhati-kan Tekno-logi Ramah Lingkungan	Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Arus Laut	Terlaksananya pembangunan PLT Arus Laut	1 unit Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (2017) sebesar 10 KW	-	1 unit	-	-	Kemen-ESDM	KKP, Kemen-PUPR, BPPT, Pemda, Perguruan Tinggi	APBN, APBD
		Pembangun-an Pembang-kit Listrik aneka Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di wilayah perbatasan dan pulau terluar	Meningkatnya rasio elektrifikasi	Jumlah PLT aneka EBT yang dibangun	100 unit	128 unit	128 unit	128 unit	Kemen-ESDM	Kemenhan, BNPP, Pemda	APBN, APBD
		Persiapan <i>Product Sharing Contract</i> (PSC) Blok East Natuna	Meningkatnya produksi minyak dan gas (migas) nasi-onal	Dokumen studi <i>Technology Market Review</i> (TMR) untuk lapangan gas (2017); persiapan PSC (2018)	Pemba-hasan dan pe-nyusunan TMR untuk lapang-an gas (AL) per-tengah-an tahun	-	-	-	Kemen-ESDM	Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas), BUMN, Swasta	BUMN, Swasta, <i>Joint Venture</i>

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
					tangan PSC	2017					
		Pengembangan lapangan abadi wilayah kerja Masela	Meningkatnya produksi migas nasional	Persiapan produksi pada lapangan abadi wilayah kerja Masela	Keputusan pengembangan lapangan abadi wilayah kerja Masela dengan skema on-shore (darat)	Revisi Plan of Development (POD)	Front End Engineering Design (FEED) dan tender	Final investment decision	Kemen-ESDM	SKK Migas, BUMN, Swasta	BUMN, Swasta, Joint Venture
		Perpanjangan wilayah kerja Mahakam	Meningkatnya produksi migas nasional	Persiapan produksi migas wilayah kerja Mahakam	Persiapan alih kelola dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Persiapan alih kelola dari KKKS swasta ke BUMN	-	-	Kemen-ESDM	SKK Migas, BUMN, Swasta	BUMN, Swasta, Joint Venture
		Indonesian Deep Water Development (IDD) Bangka	Meningkatnya produksi migas nasional	IDD Bangka: 110 MMSCFD (2016-2017)	On-stream (produksi) 450 mmscfd 200	-	-	-	Kemen-ESDM	SKK Migas, Pemda, Swasta	APBN, APBD Swasta, Joint Venture

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
					bopd						
		Pengembangan lapangan Jangkrik dan Jangkrik North East (Jangkrik Complex) wilayah kerja Muara Bakau	Meningkatnya produksi migas nasional	Produksi migas wilayah kerja Muara Bakau	Pembangunan fasilitas produksi	On-stream (produksi)	-	-	Kemen-ESDM	SKK Migas, Pemda, Swasta	APBN, APBD Swasta, Joint Venture
		Fasilitasi konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas bagi kapal perikanan	Terlaksananya konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) bagi kapal perikanan yang dilaksanakan	Pemberian paket BBG (Liquefied Petroleum Gas) untuk kapal perikanan paket sebesar 68.000 paket	38.000	10.000	10.000	10.000	Kemen-ESDM	KKP, Pemda	APBN, APBD
		Penyediaan infrastruktur dasar ketenagalistrikan di pulau-pulau kecil	Pembangunan jaringan transmisi bawah laut untuk mendistribusikan listrik ke pulau-pulau kecil						Kemen-ESDM	Kemendagri, Kemenper, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-	APBN, BUMN, Swasta, Joint Venture

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
										PDTT), BUMN, Swasta	
		Peningkatan kapasitas produksi migas nasional	Peningkatan produksi migas untuk memperkuat ketahanan energi nasional	1. Produksi minyak bumi : 700 ribu barrel per hari 2. Produksi gas bumi : 1.295 ribu <i>barrel oil equivalent per day</i>	880 1.150	790 1.150	715 1.200	715 1.295	Kemen-ESDM, BUMN	Kemenperin, SKK Migas, Pelaku Industri (K-3-S), BUMN, Swasta	APBN, BUMN, Swasta, <i>Joint Venture</i>
			Meningkatkan kapasitas untuk mendukung ketersediaan energi di seluruh wilayah Indonesia	Pembangunan Kilang <ul style="list-style-type: none">• PLBC RU-IV Cilacap 2018• RDMP RU-V Balikpapan 2019• GRR West 1 (Tuban) 2021• RDMP RU-IV Cilacap 2022• RDMP RU-II	-	-	PLBC RU-IV Cilacap 2018	RDMP RU-V Balikpapan 2019	BUMN	Kemen-ESDM, Kemenperin, Pemda	APBN, APBD, BUMN, Swasta, <i>Joint Venture</i>

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
				Dumai, RDMP RU-VI Balongan, GRR East 1 (Bontang) 2023 <ul style="list-style-type: none">• GRR West 2 dan East 2 (2025-2030)							
			Rencana Induk Infrastruktur Gas Bumi Nasional	<i>Roadmap</i> Infrastruktur Gas Bumi Indonesia	1 Mini LNG Plant	1 <i>Floating Storage Re-gasification Unit</i> (FSRU)	1 Mini LNG Plant 1 LNG Terminal	1 <i>Floating Storage Re-gasification Unit</i> 2 LNG Terminal	Kemen-ESDM	Kemen-BUMN, Pemda	APBN, APBD
			Meningkatkan cadangan dan potensi migas nasional melalui peningkatan kegiatan eksplorasi	Meningkatnya jumlah potensi dan cadangan migas nasional	Meningkatkan kegiatan eksplorasi melalui kemudahan-	Cadangan minyak bumi sebesar 6.285 MMSTB	-	-	Kemen-ESDM	Bappenas, Kemenperin, SKK Migas, BUMN, Swasta	APBN, BUMN, Swasta, <i>Joint Venture</i>

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
				an akses data melalui revisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 27 / 2006		an gas bumi se- besar 145 TSCF (RKPF 2017)					
		Peningkatan nilai tambah industri mi- neral dan ba- tubara yang berkelanjutan	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara yang bernilai tam- bah melalui pembangunan fasilitas peng- olahan dan pe- murnian di da- lam negeri	Terbangunnya pelabuhan pengangkutan khusus	v	v	v	v	Kemen- ESDM	Kemenperin, BUMN, Swasta	APBN, BUMN, Swasta, <i>Joint Venture</i>

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			Pengelolaan pertambangan skala kecil yang bertanggung jawab	Pengawasan pertambangan tanpa izin (PETI)	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	Kemen- ESDM	Kemen-LHK, Kemendagri Kemenperin, Kementeri- an Kesehat- an (Kemen- kes), Polri	APBN
				Penelitian kondisi ling- kungan wila- yah pesisir dan lepas pan- tai Sumbawa bagian selatan sebagai wila- yah sektor pertambangan strategis	-	1 lokasi	-	-	Kemen- ESDM	Kemen-LHK	APBN
			Peningkatan jumlah cadang- an batubara untuk kebu- tuhan sektor pembangkit	Terbangunnya depo batubara di lokasi- lokasi tertentu	v	v	v	v	Kemen- ESDM	Kemenperin, BUMN, Swasta	APBN, BUMN, Swasta, <i>Joint Venture</i>
		Peningkatan data dan informasi	Terlaksananya survei Seismik 2D/3D kerja	2 wilayah di cekungan Flores dan	-	2 wilayah	-	-	Kemen- ESDM	Kemenko Maritim, TNI	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		potensi migas di Kawasan Indonesia Timur	sama antara Kementerian ESDM dengan TNI	cekungan Bali-Lombok							
		Penelitian dan Pengembangan Potensi Energi Laut	Peningkatan potensi energi laut yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan pulau-pulau kecil dan terluar	Penelitian Potensi <i>Ocean Thermal Energy Conversion</i> (OTEC)	-	1 wilayah (Pulau Morotai)	-	-	Kemen-ESDM	KKP, BPPT	APBN
C.3 WISATA BAHARI											
1.	Pengembang-an Pariwisata Bahari Berkelanjutan dengan Memperhati-kan Kepen-tingan Ma-syarakat Lokal, Kearifan Tradisional, Kawas-an Konser-vasi Perairan, dan Kelestarian	Penataan dan pengelolaan jasa kelautan	Kawasan yang dibangun/ dikembangkan sarana prasarana (sarpras) untuk wisata bahari	12 kabupaten/ kota	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	KKP	Kemenpar, Kemenhub, Kemen-PUPR, Pemda	APBN, APBD
		Pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional dan kawasan konservasi	Kawasan konser-vasi yang dimanfaatkan	Kawasan konservasi perairan yang difasilitasi upaya peman-faatannya untuk pening-	20	20	25	30	KKP	Kemenpar, Kemenhub, Kemen-PUPR, Pemda	APBN dan Coremap-CTI, APBD

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
	Lingkungan	perairan daerah		katan penda-patan masya-rakat							
		Konservasi sumber daya alam hayati	Meningkatnya kesiapan dan kualitas pelayanan wisata alam bahari pada kawasan konservasi laut nontaman nasional	Jumlah unit kawasan konservasi nontaman nasional yang siap dikun-jungi dengan sarpras yang layak sebagai objek dan daya tarik wisata alam bahari yang berkualitas	-	18 unit kawasan kon-servasi	18 unit kawasan kon-servasi	18 unit kawasan kon-servasi	Kemen-LHK	Kemenko Maritim, KKP, Kemendagri	APBN
		Pengelolaan taman nasional	Meningkatnya kesiapan dan kualitas pelayanan wisata alam bahari pada kawasan taman nasio-nal laut	Jumlah unit kawasan ta-man nasional yang siap di-kunjungi de-ngan sarpras yang layak sebagai objek dan daya tarik wisata alam bahari yang berkualitas	-	15 taman nasional	15 taman nasional	15 taman nasional	Kemen-LHK	Kemenko Maritim, KKP, Kemendagri	APBN
		Fasilitasi penerapan		Lokasi destinasi	10	10	10	10	Kemenpar	KKP, Kemen-	APBN,

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		<i>sustainable tourism development</i>		prioritas						PUPR, Kemenhub, Kemen-LHK, Pemda	APBD
		Fasilitasi dukungan pengembangan infrastruktur pariwisata		Lokasi destinasi prioritas	10	10	10	10	Kemenpar	KKP, Kemen-PUPR, Kemenhub, Kemen-LHK, Pemda	APBN, APBD
2.	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan untuk Pariwisata Bahari secara Berkelanjutan bagi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Peningkatan kapasitas usaha masyarakat di destinasi pariwisata termasuk kawasan perbatasan dan pulau kecil		Jumlah daerah yang difasilitasi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	Kemenpar	Pemda	APBN, APBD
		Bimbingan teknis sadar wisata dan potensi masyarakat		Jumlah daerah yang difasilitasi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	Kemenpar	Pemda	APBN, APBD
		Pengembangan segmen pasar perso-	Meningkatnya pengembangan pariwisata	Jumlah promosi wisata	44 kegiatan	44 kegiatan	44 kegiatan	44 kegiatan	Kemenpar	Kemenko Maritim	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		nal	segmen pasar personal	bahari							
		Pengembangan destinasi wisata alam dan buatan	Meningkatnya kualitas daya tarik wisata alam dan buatan di destinasi pariwisata	Pengembangan daya tarik wisata bahari dengan kriteria: 1) wisata pantai; 2) wisata bentang laut; dan 3) wisata bawah laut	25 lokasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)	10 destinasi prioritas/25 lokasi KSPN	10 destinasi prioritas/25 lokasi KSPN	10 destinasi prioritas/25 lokasi KSPN	Kemenpar	KKP, Kemen-PUPR, Kemenhub, Kemen-LHK, Pemda	APBN, APBD
C.4 PEMANFAATAN SDA NONKONVENSIONAL DAN SD PESISIR BERKELANJUTAN											
1.	Pemanfaatan secara Berkelanjutan Sumber Daya Alam Non-konvensional Berdasarkan Prinsip Kelestarian Lingkungan	Penawaran wilayah kerja migas non-konvensional	Percepatan pengembangan migas non-konvensional	4 wilayah kerja (2017)	-	4	-	-	Kemen-ESDM		APBN
		Pengembangan lokasi destinasi wisata prioritas nasional <i>Wonderful Indonesia</i>	Tersedianya informasi lokasi keragaman warisan dan perlindungan geologi	7 lokasi prioritas (5 lokasi berada di wilayah pesisir)	-	Toba; Kep. Seribu; Tg. Kelayang; Tg. Lesung; Bromo-Tengger-	-	-	Kemen-ESDM	Kemenko Maritim, Kemenpar, Bappenas, Kemen-PUPR, Kemen-LHK, Pemda	APBN, APBD

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
						Semeru; Mandali-ka; Labuan Bajo					
2.	Pengembang-an Industri Bioteknologi Kelautan dan Biofarmakologi Laut dengan Pemanfaatan Potensi Keanekar-gaman Hayati	Penelitian dan pengem-bangan teknologi industri agro	Berkembang-nya teknologi dan/atau produk industri farmasi dan kosmetik berbasis hasil laut dan perikanan	2 hasil riset teknologi dan/atau produk industri farmasi dan kosmetik berbasis hasil laut dan perikanan	-	-	1 hasil riset	1 hasil riset	Kemenperin	KKP, BPPT	APBN
		Penumbuhan dan pengem-bangan in-dustri kimia hilir	Tersusunnya profil investasi hasil laut dan perikanan untuk industri kosmetik dan farmasi	Profil investasi hasil laut dan perikanan untuk industri kosmetik dan farmasi	-	-	2 profil	3 profil	Kemenperin	KKP, BKPM, Penda	APBN, APBD
			Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) industri terkait cara produksi obat yang baik dan	Bimbingan teknis cara produksi obat yang baik dan bimbingan teknis cara produksi kosmetik yang	-	40 orang	200 orang	400 orang	Kemenperin	Kemenkes, BPOM	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			bimbingan teknis cara produksi kosmetik yang baik berbasis hasil laut dan perikanan	baik berbasis hasil laut dan perikanan bagi 640 orang SDM industri							
			Tersusunnya rancangan standar produk industri farmasi dan kosmetik berbasis hasil laut dan perikanan	12 rancangan standar produk industri farmasi dan kosmetik berbasis hasil laut dan perikanan	-	2 Rancang-an Stan-dar Nasio-nal Indo-nesia (RSNI)	4 RSNI	6 RSNI	Kemenperin	Badan Standardi-sasi Nasional (BSN), BPOM	APBN
			Tersusunnya rancangan standar kompetensi industri farmasi dan kosmetik berbasis hasil laut dan perikanan	6 rancangan standar kompetensi industri farmasi dan kosmetik berbasis hasil laut dan perikanan	-	1 Rancang-an Stan-dar Kom-petensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI)	2 RSKKNI	3 RSKKNI	Kemenperin	Kemnaker, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), BPOM	APBN
			Berkembang-nya brand produk industri	15 produk industri farmasi dan kosmetik	-	3 produk	5 produk	7 produk	Kemenperin	Kemendag, BPOM	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			farmasi dan kosmetik berbasis hasil laut dan perikanan	berbasis hasil laut dan perikanan							
			Meningkatnya Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk 8 produk bidang industri farmasi dan kosmetik berbasis hasil laut dan perikanan	35 produk industri farmasi berbasis hasil laut dan perikanan	-	5 produk	10 produk	20 produk	Kemenperin	Kemenkes, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP), BPOM	APBN
3.	Peningkatan Pengelolaan dan Peman-faatan Sum-ber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara Seimbang dan Berke-lanjutan	Pendayagu-naan pesisir	Fasilitasi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (lokasi)	16 kawasan	4	4	4	4	KKP	Pemda	APBN, APBD

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
C.5 KONSERVASI PERAIRAN											
1.	Peningkatan Pelindungan terhadap Kelestarian Keaneka-ragaman Hayati Laut melalui Konservasi Ekosistem, Jenis, dan Genetik	Pelindungan dan peman-faan kawa-san konserva-si dan keane-karagaman hayati laut	Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan	35 kawasan (kumulatif)	28	30	33	35	KKP	Kemen-LHK, LIPI, Pemda	APBN, APBD
		Pelindungan dan peman-faan kawa-san konserva-si dan keane-karagaman hayati laut	Peningkatan populasi dan pelindungan keanekaragam-an hayati laut	20 spesies (kumulatif)	15	19	19	20	KKP	LIPI	APBN
		Pembinaan konservasi ekosistem esensial	Terbentuknya dan berfungsinya forum kelembagaan pengelolaan ekosistem esensial	Jumlah kawasan bakau yang dikelola sebagai kawasan ekosistem esensial	-	6 kawa-san bakau di 2 eko-region (Sumatra dan Jawa)	-	-	Kemen-LHK	KKP, Pemda	APBN, APBD
		Pengelolaan kawasan konservasi	Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan konser-vasi (KPHK) nontaman na-	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi la-ut dan pesisir terbentuk dan beroperasi	-	10 unit	10 unit	10 unit	Kemen-LHK	KKP, Pemda	APBN, APBD

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			sional pada kawasan pesi- sir dan laut								
			Peningkatan efektivitas pengelolaan taman nasio- nal dan kawasan konservasi nontaman nasional di pesisir dan laut di tingkat tapak serta keaneka- ragaman hayati	Jumlah kawasan konservasi di pesisir dan laut yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks <i>Management Effectiveness Tracking Tool</i> (METT) minimal 70%	-	17	35	50	Kemen-LHK, KKP	LIPi, Pemda	APBN, APBD
		Konservasi spesies dan genetik	Peningkatan populasi keanekara- gaman hayati di taman nasional dan kawasan konservasi nontaman nasional	Peningkatan populasi penyu sisik, penyu belimbing, dan keaneka- ragaman jenis ikan di wilayah laut dan pesisir	-	2%	2%	2%	Kemen-LHK, KKP	LIPi, Pemda	APBN, APBD

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		Konservasi sumber daya alam hayati	pesisir dan laut								
			Terbentuk dan beroperasinya KPHK nontaman nasional di pesisir dan laut	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi laut dan pesisir terbentuk dan beroperasi	-	10	20	30	Kemen-LHK, KKP		APBN
			Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi nontaman nasional di pesisir dan laut di tingkat tapak serta keaneka- ragaman hayati	Jumlah kawasan konservasi laut dan pesisir (Cagar Alam Laut, Suaka Marga- satwa Laut dan Taman Wisata Alam Laut) yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya hingga memperoleh nilai indeks METT minimal 70%	-	10	20	30	Kemen-LHK, KKP	Pemda	APBN, APBD
			Meningkatnya populasi ke- anekaragaman	Peningkatan populasi pe- nyu dan ke-	-	2%	2%	2%	Kemen-LHK, KKP		APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			hayati di ka-wasan konser-vasi nontaman nasional pesir dan laut	anekaragaman jenis ikan di kawasan konser-vasi non-taman nasio-nal pesisir dan laut							
		Pengelolaan taman nasional	Terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasio-nal di pesisir dan laut di tingkat tapak serta keaneka-ragaman hayati	Jumlah taman nasional laut dan pesisir yang memper-oleh nilai indeks METT minimal 70%	-	20 taman nasional	-	-	Kemen-LHK, KKP		APBN
			Meningkatnya populasi ke-anekaragaman hayati di ta-man nasional pesisir dan laut	Peningkatan populasi penyusisik, penyubelimbing, dan keanekaragam-an jenis ikan di wilayah laut dan pesisir	-	2%	-	-	Kemen-LHK, KKP		APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
2.	Penguatan Konservasi Ekosistem, Jenis, dan Genetik	Pelindungan dan peman-faatan kawa-san konser-vasi dan keane-karagaman hayati laut	Fasilitasi penambahan luas kawasan konservasi	Penambahan luas kawasan konservasi sebesar 3,5 juta ha	0,6 juta ha	0,8 juta ha	0,9 juta ha	1,2 juta ha	KKP	Kemenko Maritim, Kemen-LHK, Pemda	APBN, APBD
		Penyeleng-garaan pela-tihan masya-rakat dan pengembang-an generasi lingkungan hidup	Meningkatnya kapasitas kader ling-kungan hidup	Jumlah kader lingkungan hidup yang dilatih me-ningkat kapa-sitasnya	-	600 orang	1800 orang	3000 orang	Kemen-LHK		APBN
		Konservasi sumber daya alam hayati	Terciptanya usaha ekonomi produktif di desa sekitar kawasan konservasi nontaman nasional	Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi nontaman nasional yang memiliki usaha ekonomi produktif	-	27 desa	27 desa	27 desa	Kemen-LHK	KKP, Pemda	APBN, APBD
3.	Pengembang-an Kerja Sama Bilateral, Regional, dan	Pelindungan dan peman-faatan kawa-san konser-vasi	Pembinaan kemitraan kawasan konser-vasi yang	Terciptanya jejaring pengelolaan kawasan	3	3	5	5	KKP	Kemenko Maritim, Kemen-LHK,	APBN, APBD

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
	Global di Bidang Pengelolaan Lingkungan Laut	si dan keane-karagaman hayati laut	mendukung pengelolaan efektif (lokal, regional, dan global)	konservasi						Pemda	
C.6 REHABILITASI, PENCEMARAN LAUT, DAN PESISIR											
1.	Pencegahan, Penang-gulangan, dan Pemulh-an Dampak Pencemaran dan Kerusak-an Lingkung-an Laut	Pendayagu-naan pulau-pulau kecil	Pulau-pulau kecil dan terluar yang tertata ling-kungannya dan tahan terhadap bencana dan perubahan iklim (pulau)	61 pulau	20	15	20	6	KKP	Kemenko Maritim, Kemen-ESDM, Kemen-PUPR, Kemen-kominfo, Kemen-dikbud, Kemenkes, Kemenhan, Kemenhub, Kemenlu, Kemendes-PDRT, Kemen-LHK, BNPP	APBN
		Pengendalian pencemaran dan kerusak-an pesisir dan laut	Meningkatnya kualitas eko-sistem pantai lamun, terum-bu karang, dan vegetasi	Jumlah kawasan yang dipulihkan ekosistemnya (pantai lamun, terumbu ka-	-	2 kawasan prioritas	-	-	Kemen-LHK	KKP	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			pantai pada kawasan pesisir dan laut	rang, dan ve-getasi pantai)							
			Meningkatnya sarana instalasi peng-olahan air lim-bah di per-kampungan nelayan wi-layah pesisir	Jumlah <i>pilot project</i> Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di perkampung-an nelayan yang terben-tuk	-	2 unit			Kemen-LHK	KKP	APBN
			<i>Clean up</i> di lokasi pesisir dan laut yang tercemar tumpahan minyak	Jumlah lokasi pesisir dan laut yang dila-kukan <i>clean up</i> akibat tumpahan minyak	-	2 lokasi	-	-	Kemen-LHK	KKP, Bakamla, Kemenhub	APBN
			Tersedianya peta, data pen-cemaran, dan sumber pen-cemaran pada kawasan pe-sisir	Jumlah kawasan pesisir yang dilaku-kan penentu-an <i>baseline</i> pencemar, pemantauan berkala, dan pemetaan sumber pencemar	-	3 kawasan pesisir (prioritas <i>National Capital Integrated Coastal Development</i> –	-	-	Kemen-LHK		APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
						NCICD: Jakarta dan Semarang					
2.	Penang-gulangan Bencana Kelautan	Penyeleng-garaan reha-bilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan, perencanaan daerah aliran sungai, serta pengendalian kerusakan perairan darat	Rehabilitasi kawasan hutan bakau	Luas areal rehabilitasi hutan bakau pada kawasan hutan	-	500 ha	-	-	Kemen-LHK	KKP	APBN
		Pendayagu-naan pesisir	Rehabilitasi dan pelindung-an kawasan pesisir di Pan-tura Jawa (bakau)	3,3 juta batang bakau (kumulatif)	400 ribu batang	900 ribu batang	2 juta batang	-	KKP	Pemda	APBN, APBD
		Penyiapan peralatan di kawasan ra-wan bencana	Pengadaan speedboat Manta dan speedboat Polyethylene	34 speedboat Manta dan 34 speedboat Polyethylene	-	34 speed-boat Manta dan 34	-	-	BNPB		APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
						speed-boat Poly-ethylene					
		Pengembang-an aplikasi teknologi in-formasi, ko-munikasi, dan kehumasan	Tersedianya data dan infor-masi kebenc-naan diguna-kan untuk kesiapsiagaan dan penang-gulangan bencana (ter-susunnya data dan informasi kebencanaan untuk pengelo-laan pulau-pulau kecil terluar)	4 wilayah	-	4 wilayah	-	-	BNPB	BMKG	APBN
3.	Pengembang-an Tata Guna dan Infrastruktur Pesisir dan Laut yang Berkelanjut-an	Pengembang-an sentra kelautan dan perikanan terpadu	Jumlah kawa-san yang di-kembangkan sebagai sentra kelautan dan perikanan terpadu	31 kawasan (kumulatif)	15	20	25	31	KKP	Kemenko Maritim, Kemenko Perekonomi-an, Kemenkeu, Kemenpar, Kemen-ATR, BKPM,	APBN, APBD

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
										Pemda	
C.7 PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL											
1.	Peningkatan Pembangunan-an Kawasan Perbatasan di Laut dan Pulau-Pulau Kecil Terluar	Pembangun-an/pengem-bangan fasil-litas kepela-buahanan pa-da wilayah perbatasan	Meningkatnya fasilitas ke-pelabuhanan pada wilayah perbatasan	7 lokasi	7 lokasi	5 lokasi lanjutan	2 lokasi lanjutan	-	Kemenhub, BNPP	KKP, Kemendes-PD TT, BPPT, BUMN	APBN, BUMN
		Peningkatan jaringan tra-yek angkutan perintis pada wilayah per-batasan, ter-luar, dan ter-tinggal	Meningkatnya jaringan trayek angkutan pada wilayah perba-tasan	7 trayek	v	v	v	v	Kemenhub, BNPP	KKP, Kemendes-PD TT, Kemendag	APBN
		Pengembang-an daerah pulau kecil dan terluar	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air bersih di pulau kecil terluar di daerah ter-tinggal	Jumlah sarana air bersih yang dibangun di pulau kecil terluar di daerah tertinggal	-	3 unit	3 unit	3 unit	Kemendes-PD TT	KKP, Kemen-PUPR	APBN
			Meningkatnya aksesibilitas di pulau kecil	Jumlah pela-buhan rakyat yang dibangun	-	2 unit	2 unit	2 unit	Kemendes-PD TT	KKP, Kemen-PUPR,	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			dan terluar	di pulau kecil dan terluar						Kemenhub	
				Jumlah tam-batan perahu yang dibangun	-	2 unit	2 unit	2 unit	Kemendes-PD TT	KKP, Kemen-PUPR	APBN
				Pembangunan kapal barang 30 GT	-	4 unit	4 unit	4 unit	Kemendes-PD TT	KKP, Kemen-PUPR, Kemenhub, BUMN	APBN, BUMN
				Pembangunan kapal penum-pang kapasi-tas 50 orang	7 unit	3 unit	3 unit	3 unit	Kemendes-PD TT	KKP, Kemen-PUPR, Kemenhub, BUMN	APBN, BUMN
		Pendayaguna-an pulau-pulau kecil	Terbangunnya PLTS di pulau kecil dan terlu-ar di daerah tertinggal	Jumlah pem-bangunan PLTS komunal di pulau kecil dan terluar di daerah terting-gal	-	4 PLTS terpusat	4 PLTS terpusat	4 PLTS terpusat	Kemendes-PD TT	KKP, Kemen-ESDM, Kemen-PUPR	APBN
			Pembangunan sarana prasa-rana (sarpras) Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)	31 PPKT	25	31	31	31	KKP	Kemenhan, Kemen-PUPR	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		Pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	Pembangunan jalan	Panjang jalan yang dibangun di pulau terluar/perbatasan	5.532 km	8.625 km	-	-	Kemen-PUPR	Pemda	APBN, APBD
			Pembangunan jembatan	Panjang jembatan yang terbangun (Jembatan Holtekamp)	100 m	100 m	100 m	100 m	Kemen-PUPR	Pemda	APBN, APBD
		Penyediaan rumah khusus dan pembangunan rumah negara	Pembangunan rumah khusus	100 unit rumah khusus yang terbangun di pulau terluar/perbatasan laut	50 unit	50 unit	-	-	Kemen-PUPR	Pemda	APBN, APBD
		Pembinaan dan pengembangan air minum	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan khusus	8 SPAM yang terbangun di pulau terluar	1 pulau terluar	1 pulau terluar	3 pulau terluar	3 pulau terluar	Kemen-PUPR	Pemda	APBN, APBD
		Peningkatan/ pengadaan fasilitas dan sarpras matra laut	Peningkatan kesiapan dan penambahan jumlah fasilitas serta sarana prasarana (sarpras)	Jumlah pos pulau terluar dan wilayah perbatasan yang diperbaiki	15 pos	14 pos	14 pos	14 pos	TNI	BNPP	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			Pangkalan TNI								
		Operasi Surya Bhaskara Jaya	Terlaksananya bakti sosial di pulau-pulau kecil yang terdiri dari pelayanan kesehatan dan peran Kapal Republik Indonesia (KRI) sebagai pasar apung, peng-angkut logis-tik, dan manu-sia	Meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat	-	2 kali	2 kali	2 kali	TNI	Kemenko Maritim, Kemenko PMK, Kemenkes, KKP, Kemen-dagri	APBN
C.8 INSENTIF USAHA DAN IKLIM USAHA											
1.	Penciptaan Iklim Investasi Usaha di Bidang Kelautan yang Kondusif dan Efisien	Peningkatan deregulasi kebijakan penanaman modal	Rekomendasi simplifikasi peraturan perizinan dan pelaporan di sektor kelaut-an (berorientasi ekspor dan padat karya)	Rumusan kebijakan penyederhana-an peraturan dan bisnis proses perizin-an di pusat	-	1 paket rumusan reko-mendasi	-	-	BKPM	Kemenkeu	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
2.	Pengembang-an Dunia Usaha di Bidang Kelautan yang Berda-ya Saing Internasional	Pengendalian penangkapan ikan	Waktu pelayan-an izin usaha penangkapan ikan (SIUP)	Lama penyele-saian izin (hari)	9	9	9	9	KKP	Kemenhub	APBN
			Waktu pelayan-an izin kapal penangk-pengangkut ikan (SIPI, SIKPI)	Lama penyele-saian izin (hari)	6	6	6	6	KKP	Kemenhub	APBN
		Akses pasar promosi hasil kelautan dan perikanan	Meningkatnya akses pasar dan promosi hasil kelautan dan perikanan	Peningkatan <i>market share</i> produk kela-utan dan per-ikanan utama di pasar tuju-an ekspor (%)	15	17,5	20	25	KKP	Kemendag	APBN
3.	Penataan Sistem Hukum Nasional di Bidang Kelautan	Percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mendukung pengembangan usaha di bidang perikanan tangkap	Tersusunnya peraturan bi-dang usaha perikanan yang mendukung pengembangan usaha di bi-dang perikan-an tangkap	3 peraturan setingkat menteri	1	1	1	-	KKP	Kemenhub, Kemenperin, Kemnaker	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		Pengelolaan sumber daya ikan	Tersusunnya dokumen Rancangan Pengelolaan Perikanan (RPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Ne-gara Republik Indonesia (WPP-NRI)	11 dokumen RPP WPP-NRI	5	2	2	2	KKP	Pemda	APBN, APBD
		Penyusunan produk hu-kum (peratur-an bersama k/l) turunan Perpres Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan <i>Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter, And Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing</i>	Tersusunnya prosedur operasi standar dan petunjuk pelaksanaan	2 produk hukum	1	1	-	-	KKP	Kemenhub, Kemen-kumham, Kemenkeu, Polri, TNI	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		(Persetujuan tentang Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan yang Ilegal, tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur)									
		Percepatan penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pen-jagaan laut dan pantai	Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran	1 Peraturan Pemerintah (PP)	v	v	v	v	Kemenhub	Kemenko Maritim, Kemenko-polhukam, KKP, Kemenkeu, Kemenpan-RB, Kemen-kum-HAM, Kemnaker, Kemen-setneg, Setkab, TNI, Polri	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
4.	Implementa-si Hukum Inter-nasional di Bidang Kelautan sesuai dengan Kepentingan Nasional	Ratifikasi konvensi internasional yang terkait dengan ke-selamatan dan keamanan pelayaran serta pelin-dungan ling-kungan mari-tim yang di-keuarkan oleh Organi-sasi Inter-Nasional (IMO)	Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran serta berdaya saing inter-nasional	Perpres	v	v	v	v	Kemenhub	Kemenlu, Kemenkum-HAM, Kemnaker, Kemen-setneg, Setkab	APBN
		Penyusunan regulasi ten-tang petunjuk pelaksanaan dari konvensi internasional di bidang pe-layaran yang telah dirati-fikasi	Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran serta berdaya saing internasio-nal	Peraturan Menteri	v	v	v	v	Kemenhub	Kemenlu, Kemenkum-HAM, Kemnaker, Kemen-setneg, Setkab	APBN
5.	Pembangunan Sistem Tata Kelola Kelautan Nasional yang	Pengelolaan sumber daya ikan	Inisiasi pem-bentukan ke-lemagaan WPP-NRI	4 kelembaga-an (kumulatif)	1	2	3	4	KKP	Pemda	APBN, APBD

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
	Baik, Transparan, dan Bertang-gung Jawab										
6.	Penyusunan dan Pengem-bangan Basis Data dan Infor-masi Ekonomi Kelautan	Penyusunan data/informa-si ekonomi maritim	Tersusunnya data/informasi ekonomi mari-tim	1	1	1	1	1	Kemenko Maritim	BPS, KKP	APBN
7.	Pengembang-an Kemitra-an Usaha di Bidang Kelautan yang Saling Menguntung-kan	Pengelolaan kenelayanan	Tersedianya akses penda-naan usaha bagi nelayan	34 provinsi	34	34	34	34	KKP	Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BUMN	APBN, BUMN
			Meningkatnya kelembagaan usaha nelayan	2.200 kelompok	2.050	2.100	2.150	2.200	KKP	Pemda	APBN, APBD
		Penyuluhan dan Pendam-pingan Perko-perasian	Keblanjutan usaha mikro melalui Kope-rasi untuk mendukung kemaritiman	Kelompok usaha bersa-ma pra kope-rasi yang di-dampingi un-tuk memben-tuk koperasi	-	100 kelompok pra koperasi	225 kelompok pra koperasi	225 kelompok pra koperasi	Kemenkop-UKM	KKP	APBN
		Percepatan perjanjian konsesi ter-hadap termi-	Mendorong pembangunan infrastruktur dan pening-	Perjanjian (konsesi)	v	v	v	v	Kemenhub	Kemenkeu, Swasta	APBN, Swasta, Joint Venture

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		nal eksisting (yang telah dibangun) dalam rangka penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepela-buahan oleh Badan Usaha Pelabuhan	katan investasi melalui pembiayaan badan usaha								
C.9 PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KELAUTAN											
1.	Pembangun-an Kawasan Ekonomi Kelautan Secara Terpadu dengan Menggunakan Prinsip Ekonomi Biru (Blue Economy) di Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Pulau-pulau Terluar, dan Perairan Laut Indonesia secara	Pengelolaan kenelayanan	Tersedianya kawasan sentra/kam-pung nelayan yang tertata dan terinte-grasi	200 kawasan sentra nelayan (kumulatif)	100	110	200	200	KKP	Kemen-PUPR, Pemda	APBN, APBD
		Pembinaan dan pengem-bangan ka-wasan per-mukiman	Pembangunan dan pengem-bangan kawasan permukiman perkotaan	Penataan kampung nelayan di 11 kawasan	-	6 kawasan	5 kawasan	-	Kemen-PUPR	KKP	APBN
		Pengelolaan pelabuhan perikanan	Tersedianya pelabuhan perikanan yang ramah lingkungan/	4 pelabuhan ramah ling-kungan	-	-	4	4	KKP	Kemen-LHK	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
	Realistis		ecoport								
		Penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah pangan, barang dari kayu, dan furnitur	Berkembangnya sentra industri kecil menengah berbasis pengolahan hasil laut dan perikanan yang direvitalisasi	17 sentra	4	4	4	5	Kemenperin	KKP	APBN
		Pengembangan wilayah industri I dan II	Tersedianya sarana dan prasarana di dalam Kawasan Industri Bitung-Sulawesi Utara dengan produk unggulan pengolahan hasil laut dan perikanan	4 paket sarana dan prasarana	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Kemenperin	KKP	APBN
			Terbangunnya sentra industri kecil dan menengah berbasis pengolahan hasil	11 dokumen feasibility study	7	3	1	-	Kemenperin	KKP	APBN
				8 dokumen detailed engineering	2	5	1	-	Kemenperin	KKP	APBN

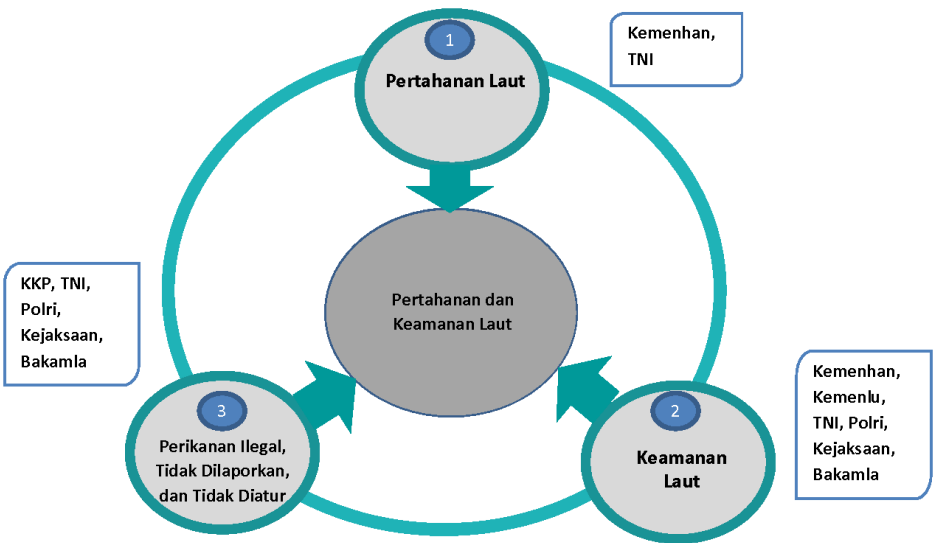
NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			laut dan perikanan	design							
				4 sentra industri kecil dan menengah	1	1	1	1	Kemenperin	KKP	APBN
		Pembangunan kawasan industri berbasis hasil laut dan perikanan		Pembangunan sarana dan prasarana dalam kawasan industri Bitung	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	Kemenperin	KKP, Kemen-PUPR	APBN
		Pengembangan pelabuhan perikanan	Tersedianya pelabuhan perikanan yang mengacu pada rencana induk pelabuhan perikanan nasional	816 pelabuhan perikanan (KEPMENKP No.45 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional)	200	200	200	216	KKP	Kemenhub, Kemen-PUPR, BPPT	APBN
2.	Optimalisasi Penyediaan Fasilitas Infrastruktur yang Dibutuhkan Dunia Usaha dan Pelaku Usaha	Pembangunan/lanjutan/ penyelesaian armada kapal negara angkutan laut perintis	Meningkatnya kapasitas sarana prasarana (sarpras) transportasi laut untuk mengurangi	100 unit	30	70	-	-	Kemenhub	Kemen-PUPR	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET / OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
	Kela-utan Teruta-ma Nelayan		backlog dan bottleneck								
3.	Pengembang-an Kerja Sama Ekonomi Berkelanjut-an dengan Negara Maritim Strategis Bidang Kelautan	Pengelolaan kerja sama kelautan dan perikanan dan hubungan masyarakat	Terwujudnya kerja sama internasional dan antar-lembaga yang implementatif	Jumlah dokumen kerja sama dan perjanjian bidang kelaut-an dan per-ikanan yang telah disepa-kati dan diim-plementasikan	30 dokumen	31 dokumen	31 dokumen	31 dokumen	KKP	Kemenlu	APBN
4.	Sinergi Kepentingan Nasional Strategis dalam Me-nentukan Kawasan Pengembangan Infra-struktur Kelautan	Pembangun-an pusat pertumbuhan industri dan maritim	Terbangunnya kawasan in-dustri Kawa-san Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan/sentra industri		-	v	v	v	Kemenko Perekonomi-an	Kemenperin, Kemen-PUPR, Kemenhub, KKP, Penda	APBN, APBD

**PROGRAM PRIORITAS D
PERTAHANAN DAN KEAMANAN LAUT**

PROGRAM PRIORITAS D
PERTAHANAN DAN KEAMANAN LAUT

Program prioritas pertahanan dan keamanan laut terdiri dari 3 (tiga) kegiatan prioritas, yaitu: (1) Pertahanan Laut; (2) Keamanan Laut; dan (3) Perikanan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*). Secara skematik, 3 (tiga) kegiatan prioritas tersebut digambarkan sebagai berikut:



Isu dan Kondisi Saat ini

1. Pertahanan Laut

Posisi geografis dan geopolitis Indonesia yang sangat strategis membentang dari timur Samudera Hindia hingga barat Samudera Pasifik, dengan luas wilayah perairan dan yurisdiksi laut mencapai 5,8 juta km² atau merupakan 70% dari total wilayah Indonesia, yang terdiri dari 3,1 juta km² perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial dan 2,7 km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEL), serta berbatasan maritim dengan 10 (sepuluh) negara tetangga Hal tersebut menjadikan posisi Indonesia sebagai persinggungan berbagai kepentingan pihak/negara lain, sehingga kemampuan pertahanan laut yang kuat menjadi sebuah

kebutuhan untuk mengagakkan kedaulatan nasional dari berbagai ancaman yang muncul.

Berbagai kepentingan yang akan saling bertemu di wilayah laut Indonesia, mengharuskan adanya kekuatan pertahanan laut yang kuat dan efektif dalam menjaga kedaulatan bangsa. Sengketa perbatasan laut dan adanya kapal-kapal asing yang berlayar tanpa memerlukan izin melalui wilayah kedaulatan RI merupakan beberapa tantangan yang harus selalu diperhitungkan. Kemampuan TNI sebagai penjaga kedaulatan perlu didukung dengan alutsista yang memadai sejalan dengan luasnya cakupan wilayah operasi. Pemenuhan *minimum essential force* merupakan program pemerintah untuk modernisasi militer Indonesia sebagai suatu kebutuhan yang penting menuju sistem pertahanan dan keamanan laut yang kuat dengan postur yang proporsional sesuai dengan luas wilayah dan ancaman yang dihadapi.

Sistem pertahanan negara Indonesia pada dasarnya merupakan sistem pertahanan semesta (sishanta) yang terdiri dari komponen utama (TNI), komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen cadangan/pendukung matra laut dapat berupa kapal-kapal pemerintah, kapal-kapal sipil, kapal nelayan, dan masyarakat maritim. Untuk itu, kemampuan sistem pertahanan semesta merupakan sebuah keharusan.

2. Keamanan Laut

Keamanan laut yang diharapkan adalah terciptanya kondisi laut yang bebas dari ancaman kekerasan, ancaman terhadap sumber daya laut dan lingkungan, ancaman pelanggaran hukum. Keamanan laut/maritim menjadi unsur penting pembangunan kemaritiman. Secara garis besar, tantangan dan isu-isu utama dari ancaman keamanan maritim di Indonesia adalah: (1) perompakan, kekerasan dan tindak kejahatan di laut, serta *trans-national crimes*; (2) klaim kedaulatan; (3) pengamanan navigasi laut baik yang melalui ALKI ataupun alur laut lainnya dalam laut wilayah dan laut perairan kepulauan Indonesia; (4) belum optimalnya sumber daya pertahanan laut Indonesia, yang terdiri atas sumber daya manusia, alutsista dan infrastruktur pengawasan, teknologi pertahanan, serta data dan informasi pertahanan. Tantangan lainnya, dibutuhkan sebuah *National Integrated Surveillance System* (NISS) yang mampu mengoptimalkan sumber daya dalam sebuah Sistem Komando Pengambilan

Keputusan. Saat ini, penjagaan terhadap keamanan laut masih dihadapkan pada kendala keterbatasan sistem dan informasi serta sarana dan prasarana dalam pengawasan dan penindakan, serta belum optimalnya keterpaduan antar pemangku kepentingan dalam menangani masalah keamanan laut.

Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan akan terus ada sejalan dengan perkembangan di bidang ekonomi serta teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itulah dalam konteks keamanan laut/maritim ini dibutuhkan peran TNI yang kuat sebagai penjaga kedaulatan dan mempunyai kemampuan *deterrence effect* terhadap negara lain yang berani mencoba mengusik kedaulatan di wilayah Indonesia.

3. Perikanan Ilegal, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diatur (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*) dan Kejahatan Perikanan (*Fisheries Crimes*)

Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing (IUU Fishing) adalah praktek eksploitasi sumber daya perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan dan melanggar aturan. Indonesia telah menjadi sasaran praktek *IUU Fishing* sejak lama sehingga menimbulkan kerugian sangat besar. *IUU Fishing* dapat terjadi pada semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan, dan intensitas eksploitasi, baik pada perikanan skala kecil maupun industri, di zona yurisdiksi nasional maupun internasional seperti *high seas*.

Selanjutnya, perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai kejahatan yang serius seperti pemalsuan dokumen, penyelundupan dan perdagangan orang dalam mata rantai *IUU Fishing* atau yang disebut sebagai kejahatan perikanan yang memerlukan penanganan terpadu.

Secara rinci, Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2016–2019 untuk program prioritas pertahanan dan keamanan laut, dapat dilihat pada matriks berikut:

RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA 2016-2019 PROGRAM PRIORITAS D. PERTAHANAN DAN KEAMANAN LAUT											
Sasaran Utama: Menurunnya pelanggaran di wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia											
NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG- GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
D.1 PERTAHANAN LAUT; D.2 KEAMANAN LAUT; D.3 PERIKANAN YANG ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN, DAN TIDAK DIATUR (IUU FISHING)											
1	Pembangun- an Pertahan- an dan Ke- amanan Laut yang Tang- guh;	Modernisasi alat utama sistem perta- hanan (alut- sista) dan non-alutsista serta pengem- bangan fasili- tas sarana dan prasara- na	Peningkatan dan pengada- an fasilitas sarana dan prasarana	Pembangunan pangkalan Angkatan Laut di Kepulauan Natuna	-	1 pangkal- an	-	-	Kemenhan	TNI	APBN
				Pembangunan dermaga	-	10 dermaga	-	-	Kemenhan	TNI	APBN
		Pengadaan <i>Landing Helicopter Dock</i> (LHD)	1 paket	-	-	-	-	Kemenhan	TNI	APBN	
		Peningkatan/ pengadaan senjata elek- tronika dan amunisi	Terpenuhinya senjata dan amunisi	Amunisi Kapal Republik Indonesia (KRI)	-	8 jenis (27.274 butir)	-	-	Kemenhan	TNI	APBN
		Peningkatan/ pengadaan	Peningkatan kesiapan dan	Jumlah der- maga yang di-	10 dermaga	12 dermaga	10 dermaga	10 dermaga	TNI		APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		fasilitas dan sarana pasarana matra laut	penambahan jumlah fasilitas serta sarana prasarana Pangkalan TNI	bangun dan direhabilitasi							
				Jumlah pembangunan dan peningkatan fasilitas dan sarpras pangkalan TNI	253 paket	253 paket	253 paket	253 paket	TNI		APBN
				Pembangunan dalam rangka mendukung pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan)	-	13 paket	13 paket	13 paket	TNI		APBN
				Pembangunan fasilitas dan sarpras Lapangan Udara Angkatan Laut (Lanudal)	-	1 paket	1 paket	1 paket	TNI		APBN
				Jumlah pembangunan fasilitas dan	-	1 paket	-	-	TNI		APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		Peningkatan/ pengadaan peralatan surta hidro-oceanografi (hidros)	Meningkatnya kemampuan dan penambahan peralatan surta hidros	sarpras <i>naval cyber command</i> (NCC)							
				Jumlah pengadaan peralatan surta hidros dan alat ukur <i>workshop</i> veranautika	9 paket	9 paket	9 paket	9 paket	TNI		APBN
				Jumlah pengadaan KRI, KAL, alpung, ranpur dan rantis	157 unit	130 unit	85 unit	85 unit	TNI		APBN
				Jumlah pengadaan peralatan pendukung dan suku cadang (sucad) KRI, KAL, alpung, ranpur dan rantis	37 paket	48 paket	37 paket	37 paket	TNI		APBN
				Jumlah peng-	6 paket	6 paket	6 paket	6 paket	TNI		APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG- GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
				adaa amuni- si KRI, KAL, alpung, ran- pur dan rantis							
2	Pembangun- an Karakter Bangsa yang Berorientasi Kelautan da- lam Upaya Bela Negara	Pembinaan kesadaran bela negara	Penerapan nilai-nilai ke- sadaran bela negara pada masyarakat	Wilayah yang menerima pembentukan kader bela negara	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kemenhan	Kementerian/ Lembaga terkait, Pemda	APBN, APBD
				Pedoman penataan dan pembinaan kesadaran bela negara	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kemenhan	Kementerian/ Lembaga terkait, Pemda	APBN, APBD
				Wilayah yang menerima bimbingan teknis, aktu- alisasi, imple- mentasi, revita- lisasi pembi- naan kesadar- an bela negara	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kemenhan	Kementerian/ Lembaga terkait, Pemda	APBN, APBD
3	Peningkatan Kemampuan	Penyelengga- raan kepolisi-	Meningkatnya patroli di wila-		-	179.850 kegiatan	-	-	Polri		APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
	dan Kinerja Pertahanan dan Keamanan secara Terpadu di Seluruh Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi, serta di Luar Wilayah Yurisdiksi sesuai Hukum Internasional	an perairan	yah perairan								
		Peningkatan operasi keamanan dan keselamatan laut	Terselenggara-nya operasi bersama keamanan laut terintegrasi		-	27 operasi	-	-	Bakamla	Kemenhub, KKP, Kemenkum-HAM, Kemenkeu, Polri	APBN
4	Peningkatan Peran Aktif Indonesia dalam Kerja Sama Pertahanan dan Keamanan Laut Baik di Tingkat Regional	Pencapaian kepentingan nasional dalam bidang pertahanan di forum internasional	Terwujudnya kerja sama pertahanan dengan negara sahabat	Kegiatan kerja sama perta-hanan yang mengacu pada politik bebas aktif dan jati diri sebagai bangsa maritim di forum internasional	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kemenhan, Kemenlu	TNI	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
	maupun Inter-nasional		Keikutsertaan dalam pasu-kan perdamai-an dunia di berbagai kawa-san sebagai wujud dalam menjaga per-damaian dunia	Kegiatan pe-ngiriman pa-sukan perda-maian dunia sesuai dengan standar yang dipersyarat-kan dalam rangka mewu-judkan keikut-sertaan untuk menjaga per-damaian du-nia	-	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Kemenhan, TNI	Kemenlu	APBN
			Diplomasi pertahanan yang mampu mendukung kepentingan nasional	Kegiatan diplomasi pertahanan yang mampu mendukung kepentingan nasional	20% -	20% 1 kegiatan	20% 1 kegiatan	20% 1 kegiatan	Kemenhan, Kemenlu		APBN
5	Penegakan Kedaulatan dan Hukum di Wilayah Perairan dan Wilayah	Mewujudkan penegakan kedaulatan dan hukum di seluruh wilayah per-	Tergelarnya kekuatan per-tahanan dan keamanan (darat, laut, dan udara)	Persentase gelar kekuat-an darat, laut, dan udara yang sinergis	80%	85%	90%	95%	Kemenhan, TNI	Kemenko Maritim, Kemenko-polhukam, KKP, Kemenhub,	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
	Yurisdiksi	airan yuris-diksi	yang sinergis dan terintegra-si	dan teritegrasi						Kemenkeu, Kemen-LHK, Kemenkum-HAM, Polri	
			Terwujudnya keamanan di seluruh objek vital nasional yang bersifat strategis	Persentase penurunan pelanggaran hukum dan gangguan keamanan wilayah laut yurisdiksi nasional	17%	14%	11%	8%	Kemenhan, TNI	Kemenko Maritim, Kemenko-polhukam, KKP, Kemenhub, Kemenkeu, Kemen-LHK, Kemenkum-HAM, Polri	APBN
				Persentase ob-jek vital nasio-nal bersifat strategis yang dinyatakan aman	100%	100%	100%	100%	Polri		APBN
		Penyelengga-raan operasi militer selain perang dan penegakan hukum serta penjagaan keamanan	Meningkatnya penegakan hu-kum dan pen-jagaan keaman-an di wilayah laut yurisdiksi nasional	Penyelenggara-an Operasi Militer Selain Perang (OMSP)	-	1 kali	1 kali	1 kali	TNI	Kemenhan	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		wilayah laut yurisdiksi nasional									
		Pemeliharaan dan perawatan pesawat udara	Meningkatnya kesiapan dan keberhasilan pusat penerbang TNI dalam mendukung tugas operasi	Pemeliharaan dan perawatan pesawat udara AL	-	8 unit	8 unit	8 unit	TNI	Kemenhan	APBN
		Peningkatan pengelolaan informasi, hukum, dan kerja sama keamanan dan keselamatan laut		Penyelesaian kasus tindak pidana di laut	15 kasus	45 kasus	15 kasus	15 kasus	Bakamla	Polri	APBN
6	Optimalisasi Sistem Komando, Kendali, Komunikasi, Komputersisasi, In-	Pemeliharaan/ perawatan peralatan komunikasi dan elektronika (komlek)	Meningkatnya kesiapan sarana dan prasarana komunikasi, persandian, dan perang elektronika	Pemeliharaan dan perawatan alat komunikasi pendirian darat (pendirat)	-	7 set	7 set	7 set	TNI		APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
	telijen, Pengawasan, dan Pengintaian (K-4-IPP)		(pernika)								
			Kesiapan alat komuniasi TNI	Pemeliharaan dan perawatan alat komunikasi	-	99 set	99 set	99 set	TNI		APBN
		Pemeliharaan dan perawatan senjata elektronik	Meningkatkan kesiapan peralatan senjata	Pemeliharaan dan perawatan senjata	-	30 unit	30 unit	30 unit	TNI		APBN
		(senlek) dan amunisi	Kesiapan senjata dan alat elektronik	Pemeliharaan dan perawatan senjata elektronik dan pendirat	-	9 unit	9 unit	9 unit	TNI		APBN
		Pemeliharaan/ perawatan al-pung, kapal angkut, KRI, dan ranpur	Meningkatnya kesiapan KRI dan ranpur	Pemeliharaan dan perawatan kapal pendukung	-	42 unit	42 unit	42 unit	TNI		APBN
				Pemeliharaan dan perawatan kapal patroli	-	30 unit	30 unit	30 unit	TNI		APBN
				Pemeliharaan dan perawatan ranpur	-	378 unit	378 unit	378 unit	TNI		APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			Kesiapan kapal dan kendaraan tempur/taktis	marinir							
				Pemeliharaan dan perawatan kapal pemukul	-	45 unit	45 unit	45 unit	TNI		APBN
				Pemeliharaan dan perawatan alat komunikasi KRI	-	99 set	99 set	99 set	TNI		APBN
				Pemeliharaan senlek KRI	-	94 unit	94 unit	94 unit	TNI		APBN
		Pemeliharaan non-alutsista integratif	Meningkatkan kualitas pemeliharaan Komando, Kendali Komunikasi, Komputer dan Internet (K-4-I)	Jumlah K-4-I yang dipelihara	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	TNI, Bakamla	Kemenhub, KKP, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN)	APBN
7	Pemberantasan Kejahatan Perikanan	Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dan peningkatan infrastruktur pengawasan	Bertambahnya jumlah sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Jumlah kapal pengawas	4 kapal pengawas tipe A	1 kapal pengawas tipe A	1 kapal pengawas tipe A	1 kapal tipe A (lama), 2 unit kapal tipe A (baru)	KKP	Kemenhan, Kemenhub	APBN

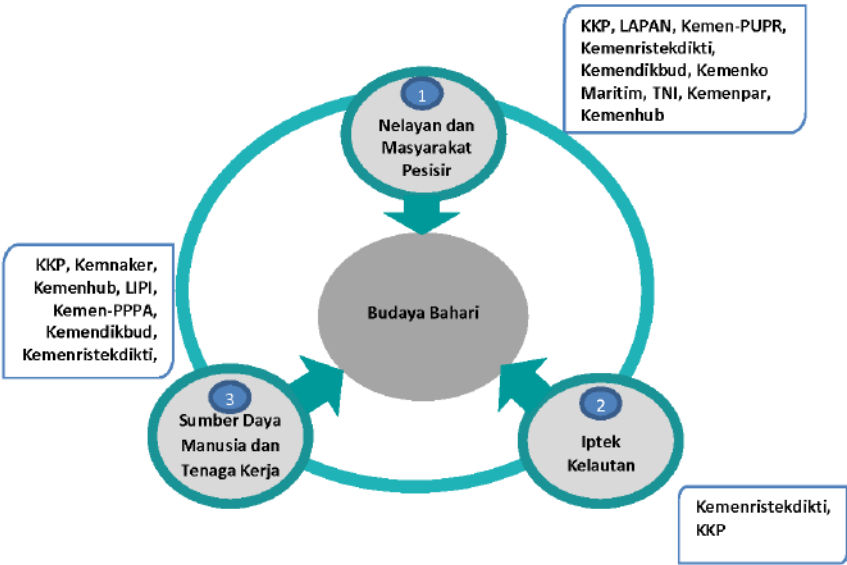
NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		Pengoperasi-an kapal pengawas	Meningkatnya kepatuhan pe-laku usaha ke-lautan dan perikanan ter-hadap keten-tuan peraturan perundang-undangan	150 hari operasi kapal pengawas	144 hari operasi	150 hari operasi	150 hari operasi	150 hari operasi	KKP	TNI, Bakamla, Polri	APBN
		Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksa-naan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Operasi terpa-du untuk pe-nanggulangan <i>Illegal Unreported Unregulated</i> (IUU) <i>Fishing</i> di perairan Indonesia	40 hari operasi	-	40 hari operasi	40 hari operasi	40 hari operasi	KKP	TNI, Bakamla, Polri	APBN
		Penanganan perkara pida-na umum di Kejaksaan Tinggi (Kejati)/ Kejaksaan Ne-	Meningkatnya penanganan perkara pidana umum secara tepat dan	Jumlah perkara tindak pidana umum (termasuk tindak pidana perikanan)	-	116.624 perkara	-	-	Kejaksaan Republik Indonesia	KKP	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		geri (Kejari) dan Cabang Kejaksaan Ne-geri (Cabjari)	akuntabel	yang diselesai-kan dalam tahap pra-penuntutan, penuntutan dan tahap eksekusi di Kejati, Kejari dan Cabjari							
		Peningkatan operasi ke-amanan dan keselamatan laut		Operasi ber-sama keaman-an laut terin-tegrasi nasio-nal	9 operasi	27 operasi	9 operasi	9 operasi	Bakamla	KKP, TNI, Polri, Kemenkeu, Kemenhub, Kemenkum-HAM	APBN

PROGRAM PRIORITAS E
BUDAYA BAHARI

PROGRAM PRIORITAS E
BUDAYA BAHARI

Program prioritas budaya bahari terdiri dari 3 (tiga) kegiatan prioritas, yaitu: (1) Nelayan dan Masyarakat Pesisir; (2) Iptek Kelautan; dan (3) Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja. Secara skematik, 3 (tiga) kegiatan prioritas tersebut digambarkan sebagai berikut:



Isu dan Kondisi Saat ini

1. Nelayan dan Masyarakat Pesisir

Nelayan merupakan pelaku penting dalam sektor perikanan. Jumlah Rumah Tangga Nelayan berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013 sebanyak 864.485 Rumah Tangga atau mengalami penurunan sebanyak hampir 50% dalam kurun waktu 10 tahun. Total tenaga kerja di sektor perikanan berjumlah sekitar 13 juta orang, sebanyak 51% beraktivitas di produksi (perikanan tangkap dan budi daya), 38% di pemasaran dan hanya 11% di sektor pengolahan. Dengan demikian, komponen hulu (produksi) menjadi tumpuan dalam aktivitas mata pencaharian. Permasalahan yang timbul selanjutnya adalah tekanan terhadap lingkungan pesisir. Terdapat 12.827 desa pesisir (17%) yang langsung berbatasan dengan laut dan sampai

dengan tahun 2012 sebanyak 7,9 juta penduduk pesisir hidup masih berada di bawah garis kemiskinan. Angka ketimpangan penghasilan rumah tangga nelayan/ masyarakat pesisir cukup tinggi, diperkirakan dengan Indeks Gini sebesar 0,54 (Bappenas, 2015). Hal ini karena minimnya ketersediaan pelayanan dasar pada wilayah pesisir yang sulit dijangkau.

Persoalan yang sering muncul terkait nelayan antara lain keterbatasan keterampilan dan penguasaan teknologi, rendahnya akses terhadap modal produktif, rantai niaga yang merugikan, rendahnya penguasaan manajemen usaha, dan tidak adanya perlindungan sosial. Kondisi kemiskinan yang terus melekat pada nelayan menyebabkan terjadinya penurunan preferensi terhadap profesi nelayan. Untuk memperbaiki kesejahteraan nelayan, diperlukan penguatan daya saing industri (sektor pengolahan) sehingga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan nilai tambah produk, insentif program hilirisasi, serta skema pembiayaan yang berpihak pada nelayan dan pembudi daya. Nelayan dapat menjadi mitra pemerintah dalam pengelolaan perikanan (*co-management*), namun perlu didukung dengan penguatan kelembagaan nelayan (kelompok dan koperasi), pendampingan melalui penyuluh perikanan, serta pendidikan formal dan informal.

2. Iptek Kelautan

Iptek kelautan merupakan salah satu wahana yang harus dikuasai agar pendayagunaan potensi kelautan optimal. Inovasi teknologi kelautan merupakan keharusan untuk menjawab tantangan di dalam pengelolaan sumber daya kelautan secara efektif dan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya laut membutuhkan teknik yang semakin efisien, peralatan yang semakin maju, dan sumber daya manusia yang semakin terlatih. Penguasaan iptek erat kaitannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang nantinya berperan sebagai pelaku utama inovasi dan juga sekaligus tenaga utama yang akan menggerakkan sektor kelautan.

Selain itu, perlu memberikan pembinaan sejak dini kepada generasi muda mengenai kelautan agar terpacu untuk mencintai laut dan lebih mudah mendalami ilmu kelautan. Untuk itu, kurikulum pendidikan kelautan perlu dimasukkan agar dapat memacu peningkatan iptek kelautan. Pemerintah perlu membangun dan memperluas lembaga penelitian dan perguruan tinggi di bidang kelautan. Di sisi lain, para

peneliti kelautan perlu didorong untuk menghasilkan inovasi baru yang penting bagi kemajuan bidang kelautan. Aktivitas riset yang diindikasikan melalui publikasi hasil riset terkait sumber daya kelautan masih sangat terbatas. Peneliti Indonesia maupun peneliti asing yang melakukan kegiatan riset terkait sumber daya kelautan Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah riset yang dilakukan di wilayah daratan. Saat ini riset kelautan masih belum terintegrasi dalam konsep pembangunan Riset Nasional. Selain itu, jejaring riset kelautan nasional yang melibatkan lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku riset lainnya masih belum terbangun dengan baik. Begitu pula dengan infrastruktur pendukung riset dan survey kelautan, yang ketersediaannya masih rendah. Agenda kegiatan penelitian yang menggunakan kapal riset belum terpadu. Saat ini Indonesia baru memiliki 12 unit kapal riset yang tersebar di lima institusi.

3. Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja

Pada tahun 2020-2030, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, di mana penduduk dengan umur produktif sangat besar, sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak. Jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) pada 2020-2030 akan mendekati 70%. Dilihat dari jumlahnya, penduduk usia produktif akan mencapai sekitar 180 juta jiwa, sementara usia nonproduktif hanya 60 juta jiwa (BKKBN, 2013). Untuk itu perlu ditekankan supaya melimpahnya jumlah penduduk usia produktif bisa memberikan keuntungan optimal bagi pembangunan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, termasuk sektor ekonomi kelautan dan kemaritiman supaya menjadi lebih produktif dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

Melimpahnya penduduk usia produktif yang tinggi akan berdampak positif apabila diimbangi dengan peningkatan produktivitas, kapasitas, dan kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, saat ini mayoritas nelayan dan pembudi daya ikan Indonesia berpendidikan sekolah dasar, sehingga memerlukan berbagai program pendidikan dan pemberdayaan diantaranya melalui pendampingan yang intensif dari penyuluh perikanan terkait peningkatan keterampilan maupun diseminasi teknologi yang efisien dan efektif. Selanjutnya, masih dibutuhkan jumlah tenaga kerja kepelautan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri, yang semakin meningkat, termasuk kebutuhan sumber daya manusia kepelabuhanan untuk pelabuhan umum, pelabuhan khusus, dan

pelabuhan perikanan. Permasalahan lainnya terkait sumber daya manusia adalah masih terbatasnya sertifikasi kompetensi bagi anak buah kapal dan nahkoda.

Secara rinci, Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2016–2019 untuk program prioritas budaya bahari, dapat dilihat pada matriks berikut:

RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA 2016–2019
PROGRAM PRIORITAS E. BUDAYA BAHARI

Sasaran Utama:
1. Meningkatnya wawasan bahari dan kesejahteraan nelayan
2. Meningkatnya jumlah pemanfaatan hasil inovasi dan difusi iptek kelautan di industri

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG- GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
E.1 NELAYAN DAN MASYARAKAT PESISIR											
1.	Penguatan Sistem Data dan Informasi Kelautan, Inventarisasi, dan Evaluasi Sumber Daya Kelautan	Pengelolaan data statistik dan informasi kelautan perikanan	Terwujudnya pengembangan satu data kelautan dan perikanan	Satu data kelautan dan perikanan	1	1	1	1	KKP	kelautan dan perikanan	APBN
			Pengelolaan kelayakan: pembangunan sistem informasi nelayan di sentra nelayan	20 sentra nelayan	20	20	20	20	KKP		APBN
			Investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan: pembangunan sistem informasi pemasaran hasil per-	1 buah	1	1	1	1	1	KKP	

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG- GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			ikanan								
		Pengembangan pemanfaatan penginderaan jauh	Layanan peng- guna bidang pemanfaatan penginderaan jauh	Operasionalisasi sistem otomatisasi zona potensi penangkapan	v	v	v	v	LAPAN	KKP, BPPT	APBN
2.	Pembangunan Prasarana dan Sarana yang Dibutuhkan dalam Pengembangan Usaha bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	Pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, air tanah, rawa, dan tambak	Jaringan irigasi tambak yang direhabilitasi/ditingkatkan	524 km jaringan irigasi tambak yang direhabilitasi/ditingkatkan	252 km	91 km	99 km	82 km	Kemen-PUPR	KKP, Pemda	APBN, APBD
		Kawasan perikanan budi daya	Peningkatan produksi perikanan budi daya untuk komoditas air payau dan laut dengan peng- adaan Keramba Jaring Apung (KJA)	1.150 unit KJA	250	275	300	325	KKP	Kemen-PUPR	APBN
			Revitalisasi tambak	20 kawasan (kumulatif)	-	10	15	20	KKP	Kemen-PUPR	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG- GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		Pembinaan dan pengembangan air minum	Pembangunan SPAM di kawasan khusus	Pembangunan SPAM di 9 kawasan nelayan	4 kawasan nelayan	1 kawasan nelayan	2 kawasan nelayan	2 kawasan nelayan	Kemen-PUPR	KKP, Pemda	APBN, APBD
		Pembinaan dan pengembangan kawasan permukiman	Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan	Peningkatan kualitas kawasan di 121 permukiman agro/minapolitan	32 kawasan	36 kawasan	28 kawasan	25 kawasan	Kemen-PUPR	KKP, Pemda	APBN, APBD
		Penyediaan rumah khusus dan pembinaan rumah negara	Pembangunan rumah khusus	4.974 unit rumah khusus nelayan yang terbangun	1.626 unit	3.348 unit	-	-	Kemen-PUPR	KKP, Pemda	APBN, APBD
		Konservasi, pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan keamanan pantai	<i>Breakwater</i> yang dibangun/ditingkatkan	230,6 km bangunan pemecah gelombang (<i>breakwater</i>) di kawasan nelayan	38 km	18,6 km	94 km	80 km	Kemen-PUPR	BPPT, Pemda	APBN, APBD
		Pembangunan rumah swadaya nelayan	Rumah nelayan meningkat kualitasnya	1.800 unit rumah yang diperbaiki	253 unit	400 unit	600 unit	547 unit	Kemen-PUPR dan KKP	Pemda	APBN, APBD

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
3.	Peningkatan Kemampuan dan Kapasitas bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	Pengelolaan kapal perikanan, alat penangkap ikan, dan sertifikasi awak kapal perikanan	Awak kapal perikanan yang tersertifikasi berdasarkan keahlian dan keterampilan	5.800 awak kapal (kumulatif)	2.299	3.400	4.600	5.800	KKP	Kemnaker, Kemenhub	APBN
		Pengelolaan kenelayanan	Nelayan memiliki tanah yang bersertifikat	70.000 bidang tanah	20.000	20.000	15.000	15.000	KKP	Kemen-ATR, Pemda	APBN, APBD
			Kelembagaan usaha nelayan yang meningkat kapasitasnya	2.200 lembaga usaha (kumulatif)	2.050	2.100	2.150	2.200	KKP	Pemda	APBN, APBD
		Produksi dan usaha pembudidayaan ikan	Fasilitasi peningkatan kelembagaan pembudi daya ikan	1.000 lembaga (kumulatif)	700	800	900	1.000	KKP		APBN
4.	Penyediaan Kemudahan Akses terhadap Ilmu	Program penyediaan akses iptek, lahan, dan	Jumlah penelitian di bidang perikanan	130 penelitian di bidang perikanan (kumulatif)	113	120	125	130	Kemenristek-dikti	KKP	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
	Pengetahuan, Teknologi Informasi, Lahan, dan Pembiayaan untuk Kepentingan Pengembangan Usaha bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	pembiayaan bagi pengembangan usaha nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam	Jumlah teknologi yang dikembangkan	40 teknologi yang dikembangkan (kumulatif)	30	32	35	40	Kemenristek-dikti	KKP	APBN
5.	Peningkatan Pendidikan dan Penyadaran Masyarakat Kelautan yang Diwujudkan melalui Semua Jalur, Jenis, dan Jenjang Pendidikan	Pendidikan kelautan dan perikanan	Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten	28.250 orang peserta pendidikan kelautan dan perikanan	6.725 unit	6.950 unit	7.250 unit	7.325 unit	KKP	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kemenristek-dikti	APBN
6.	Membangkitkan Pemanahan Wawasan dan Budaya Bahari	Penyempurnaan kurikulum, sistem pembelajaran, dan perbukuan	Penyisipan materi muatan lokal bahari (pengenalan lingkungan laut, penge-	Meningkatnya pengetahuan tentang budaya bahari pada level Pendidikan Anak	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Kemendikbud	KKP	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG- GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			nalan aktivitas budaya bahari) pada kurikulum, sistem pembelajaran, dan buku untuk semua tingkat pendidikan mulai dari usia dini, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan nonformal, dan informal	Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, menengah, nonformal, dan informal							
		Pelatihan kelautan dan perikanan	Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih	170.000 orang kelautan dan perikanan yang dilatih	35.000 orang	40.000 orang	45.000 orang	50.000 orang	KKP	Kemnaker, Pemda	APBN, APBD
		Koordinasi budaya, seni, dan olahraga bahari	Terciptanya kreativitas dan sinergi penyelenggaraan budaya/olahraga bahari yang mendorong penguatan karakter bahari	Acara budaya/olahraga bahari yang dikoordinasikan/diselenggarakan	-	5	5	8	Kemenko Maritim	Kemenpar, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		Pengembang-an destinasi wisata budaya	Meningkatnya kualitas desti-nasi wisata bu-daya	Jumlah desti-nasi wisata budaya yang dikembang-kan dan mem-perkuat nilai sejarah dae-rahnya	10	10	10	10	Kemenpar	Kemendik-bud, Pemda	APBN, APBD
		Penyeleng-garaan pem-berdayaan wilayah per-tahanan laut	Meningkatnya pemberdayaan dan pembina-an wilayah pertahanan negara matra laut	Jumlah kegiatan pembinaan potensi maritim	2	2	2	2	TNI		APBN
				Jumlah pem-bangunan fasilitas dan pengadaan peralatan potensi mari-tim (paket)	4	4	4	4	TNI		APBN
7.	Identifikasi dan Inven-tarisasi Nilai Budaya dan Sistem Sosi-al Kelautan di Wilayah NKRI sebagai Bagian dari Sistem Ke-budayaan	Pengelolaan warisan dan diplomasi budaya	Terpeliharanya warisan budaya	Perahu pinisi dari Sulawesi Selatan	v	v	v	v	Kemendik-bud	KKP, Kemenhub	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
	Nasional										
8.	Harmonisasi dan Pengem-bangan Un-sur Kearifan Lokal ke da-lam Sistem Pengelolaan dan Peman-faan Sumber Daya Kelautan yang Lestari	Pendayagu-naan pulau-pulau kecil	Terevitalisasi-nya masyara-kat hukum adat, tradisio-nal, dan lokal di pulau-pulau kecil (komuni-tas)	15 komunitas	5	3	2	5	KKP	Kemendik-bud, Pemda	APBN, APBD
		Pengembang-an produk inovasi yang mendukung pengembang-an industri strategis perikanan	Inovasi peran-cangan dan komponen kapal angkut ikan	8 desain kapal angkut dan 6 komponennya (untuk ikan segar dan ikan beku)	8 desain	2 komponen	2 komponen	2 komponen	Kemen-ristekdikti	KKP, BUMN	APBN, BUMN
			Inovasi penang-kapan ikan	1 alat untuk mengumpul-kan ikan pada alat tangkap ikan (Ledikan)	1	-	-	-	Kemen-ristekdikti	KKP	APBN
			Inovasi tekno-logi pengolah-an perikanan	6 inovasi teknologi pengolah-an perikanan	-	2	2	2	Kemen-ristekdikti	KKP	APBN
9.	Memperta-hankan, Mengem-bangkan, dan Meningkat-	Pengembang-an sejarah	Penulisan buku atlas pelabuhan bersejarah di Indonesia	1 dokumen	1	1	1	1	Kemendikbud		APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
	kan Peran Kota Pelabuhan Bersejarah										
E.2 IPTEK KELAUTAN											
1.	Peningkatan dan Penguatan Peranan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Pengembangan Sistem Informasi Kelautan	Peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung pengembangan industri perikanan	Jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang menerima beasiswa	150 dosen dan tenaga kependidikan yang menerima beasiswa	20	30	50	50	Kemen-ristekdikti	Kemenkeu	APBN
		Pengelolaan pelabuhan perikanan	Pelabuhan perikanan yang menerapkan sistem informasi dan ke-terpaduan	165 pelabuhan perikanan (kumulatif)	120	135	150	165	KKP	Pemda	APBN, APBD
		Penelitian dan pengembangan iptek sumber daya laut dan pesisir	Berkembang-nya inovasi teknologi ke-lautan	30 inovasi teknologi kelautan (kumulatif)	15	20	25	30	KKP	Kemenristek-dikti, BPPT, LIPI	APBN
2.	Peningkatan Kolaborasi Riset Kelaut-	Pengembang-an taman sains dan	Science Techno Park (STP) Jepara di bi-	90% STP Jepara menuju	20%	50%	70%	90%	Kemen-ristekdikti	Kemenko Maritim, KKP, BPPT,	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
	an dan Pengembangan Pusat Keunggulan Kelautan	teknologi dan lembaga pe-nunjang lainnya	dang kelautan dan perikanan yang <i>mature</i>	<i>mature</i>						LJPI	
3.	Peningkatan Tata Kelola Iptek, Pengembangan Sarana dan Prasara-na Ilmu Pengetahuan dan Tekno-logi Kelaut-an, dan Agenda Riset Kelautan Strategis	Pengembang-an sarana dan prasara-na pendidik-an tinggi	Jumlah sar-pras perguruan tinggi yang direvitalisasi	15 sarpras perguruan tinggi	3	4	4	4	Kemen-ristekdikti	Kemenperin, KKP, LJPI	APBN
E.3 SUMBER DAYA MANUSIA DAN TENAGA KERJA											
1.	Peningkatan Jasa di Bidang Kelautan yang Diimbangi dengan Ketersediaan Lapangan Kerja	Penetapan standar kompetensi kerja	Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi	175 program di tahun 2019 (kumulatif)	100 program	125 program	150 program	175 program	Kemnaker	Kemendag, Kemenperin, KKP, BNSP, Pemda	APBN, APBD
		Jumlah loka-si identifikasi persediaan dan permin-taan tenaga kerja di ka-	Tersedianya data persedia-an dan per-mintaan per sektor sesuai dengan potensi	23 lokasi	23 lokasi	23 lokasi	23 lokasi	23 lokasi	Kemnaker	BPS, Pemda	APBN, APBD

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		bupaten/kota	daerah								
		Jumlah tena-ga kerja yang diberdayakan melalui kegi-atan wirausaha	Terwujudnya perluasan ke-sempatan kerja melalui padat karya dan wirausaha	50.000 orang pada tahun 2019 (kumulatif)	26.000 orang	31.000 orang	39.000 orang	50.000 orang	Kemnaker	Pemda	APBN, APBD
		Penataan dan pemanfaatan jasa kelautan	Kawasan yang dibangun atau dikembangkan sarana pra-sarana (sarpras) untuk wisata bahari	12 kawasan	3	3	3	3	KKP	Kemenpar, Kemenhub, Kemen-PUPR, Pemda	APBN, APBD
2.	Pengembang-an Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Kelautan	Pengembang-an sumber daya manu-sia laut	Pusat pengem-bangan sumber daya manusia perhubungan laut	Lulusan Pela-tihan sumber daya manusia Perhubungan Laut	1.050 orang	600 orang	630 orang	480 orang	Kemenhub		APBN
			Lulusan Dik-lat Pengem-bangan dan Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia Perhubungan		10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	Kemenhub		APBN
		Balai Besar Pendidikan Penyebaran	Lulusan Pendidikan Penjenjangan		5.310	5.370	6.480	6.990	Kemenhub		APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG- GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			dan Pening- katan Ilmu Pelayaran (BP- 3-IP)	sumber daya manusia Perhubungan Laut (orang)							
				Lulusan Pendidikan Penyegaran (<i>Refreshing</i>) sumber daya manusia Perhubungan Laut (orang)	4.200	2.100	900	600	Kemenhub		APBN
				Lulusan Pela- tihan sumber daya manusia Perhubungan Laut (orang)	10.332	11.786	11.270	11.257	Kemenhub		APBN
				Lulusan Diklat Pengembang- an dan Pening- katan sumber daya manusia Perhubungan (orang)	150	150	150	150	Kemenhub		APBN
			Balai pendidik- an dan pela- tihan trans- portasi laut	Lulusan Pela- tihan sumber daya manusia Perhubungan Laut (orang)	1.350	1.350	1.350	1.350	Kemenhub		APBN
		Mendorong pemenuhan	Meningkatnya standar kom-	Ratifikasi	-	-	1 Konven-	-	Kemenhub	Kemenko Maritim,	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		ketentuan peraturan internasional dengan mera-tifikasi kon-vensi inter-nasional yang terkait dengan standar kom-petensi sumber daya manusia di bidang Kepelautan, antara lain <i>Standards of Training, Certification and Watch-keeping for Fishing Vessel Personnel</i> (STCW-F)	petensi sumber daya manusia di bidang kepelautan	STCW-F			si STCW-F			Kemenlu, KKP, Kemen-setneg, Setkab	
		Penanganan pelanggaran bidang ke-lautan dan perikanan	Penyidik Pega-wai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan/ Aparat Pene-gak Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan yang ditingkatkan	Jumlah PPNS	60	60	60	60	KKP	Polri	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			kemampuan teknisnya								
		Pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Polsus PWP-3-K) yang kompeten	Jumlah Polsus PWP-3-K	100	100	100	100	KKP		APBN
			Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam membantu pengawasan SDKP	Jumlah Pokmaswas	1.639	1.655	1.671	1.687	KKP		APBN
		<i>Regional Training and Research Centre (RTRC) on marine biodiversity and eco-system health</i>	Terlaksananya pelatihan ber-basis kompe-tensi keaneka-ragaman haya-ti laut	Bertambahnya ahli di bidang kompetensi keanekara-gaman hayati laut Indonesia di bidang tak-sonomi kela-utan	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	LIPI	Kemenkeu, KKP, Kemen-LHK, BPPT, Perguruan Tinggi	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
3.	Peningkatan Gizi Masyarakat Kelautan	Peningkatan konsumsi ikan rata-rata per kapita	Meningkatkan kualitas gizi masyarakat kelautan (pelaku utama perikanan)	Konsumsi ikan masyarakat mencapai 54,49 kg per kapita per tahun pada tahun 2019	43,88 kg per kapita per tahun	47,12 kg per kapita per tahun	50,65 kg per kapita per tahun	54,49 kg per kapita per tahun	KKP	Kemenkes, Kementan, Kemenperin, Kemendag	APBN
		Akses pasar dan promosi hasil kelautan dan perikanan	Promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri yang dilaksanakan	Festival Perikanan Nusantara dan Lomba Aneka Masakan pada 34 Provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	KKP	Kemenkes, Kemenperin, Kemendag	APBN
			Sentra kuliner hasil perikanan yang disediakan dan dikelola	5 sentra kuliner perikanan	5	5	5	5	KKP	Kemenkes, Kemenperin, Kemendag, BPOM	APBN
4.	Peningkatan Pelindungan Ketenagakerjaan	Peningkatan jaminan sosial (jamsos) tenaga kerja	Meningkatnya program pelindungan jamsos bagi pekerja	Target untuk jamsos pekerja semua sektor	22 juta	25 juta	29 juta	33,5 juta	Kemnaker	Kementeri-an Sosial (Kemensos), Kemenkes, BPJS Ketenagakerjaan	APBN
		pelayanan perizinan penggunaan tenaga kerja asing yang efektif dan	terlaksananya pelayanan yang transparan bagi tenaga kerja asing	120 lokasi	30	30	30	30	Kemnaker		APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG- GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		efisien de- ngan fasilitas sistem <i>online</i>									
		Peningkatan penerapan syarat-syarat kerja dan prinsip- prinsip nondiskrimi- nasi	Meningkatnya perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan (PP)	25,89% pada tahun 2019 (kumulatif)	22,60%	23,61%	24,72%	25,89%	Kemnaker		APBN
			Meningkatnya perusahaan yang membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	6,57% di tahun 2019 (kumulatif)	6,12%	6,26%	6,41%	6,57%	Kemnaker		APBN
		Penarikan Pekerja Anak dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA)	Meningkatnya fasilitasi miti- gasi dampak pelanggaran norma ketena- gakerjaan	18 ribu di tahun 2019 (kumulatif)	16,5 ribu	17 ribu	17,5 ribu	18 ribu	Kementerian Pemberdaya- an Perempu- an dan Per- lindungan Anak (Kemen- PPPA)	Kemensos, Kemnaker, Kemen- dikbud, Pusat Pela- yanan Terpa- du Pember- dayaan Perempuan dan Anak (P-2-TP-2-A)	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG- GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		Penerapan norma peng- hapusan dis- kriminasi ter- hadap tenaga kerja perem- puan	Meningkatnya para pelaku hubungan in- dustrial yang mendapatkan pemahaman tentang kese- taraan di tempat kerja	perusahaan- perusahaan yang mempe- kerjakan tena- ga kerja pe- rempuan	200	220	240	260	Kemnaker	Kemen- PPPA, KKP, P-2-TP-2-A, Pemda	APBN, APBD
		Penerapan norma Kese- lamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Jumlah per- usahaan yang menerapkan norma K3 dan Sistem Mana- jemen Kesela- matan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	Perusahaan/ <i>stakeholders</i>	2010	2230	2460	2680	Kemnaker	Kemenperin, Kemenkes, KKP, Dewan Keselamat- an dan Kesehatan Kerja Nasional (DK-3-N), Pemda	APBN, APBD
		Penyusunan standar Kese- lamatan dan Kesehatan Kerja (K-3)	Meningkatnya kualitas pengembangan dan pengujian K-3	Perusahaan/ <i>stakeholders</i>	440	460	480	500	Kemnaker	Kemenkes, Kemenperin, KKP, DK-3-N, Pemda	APBN, APBD
		Pengelolaan kenelayanan	Nelayan yang terlindungi dengan asu- ransi	2,7 juta nela- yan yang ter- lindungi de- ngan asuransi	600.000	1.000.000	1.000.000	100.000	KKP	BUMN	APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
5.	Peningkatan Pendidikan dan Penyadaran Masyarakat Kelautan yang Diwujudkan melalui Semua Jalur, Jenis, dan Jenjang Pendidikan	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Sinkronisasi dan penyeselarasan kurikulum kemaritiman sesuai dengan kebutuhan DU/DI	Kurikulum kemaritiman sesuai dengan kebutuhan DU/DI	1	1	1	1	Kemendikbud	Kemenhub, KKP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Pemda	APBN, APBD, investasi
			Ketersediaan SMK kelautan/maritim yang dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing	Berdirinya SMK Maritim/ Kelautan	140	140	140	140	Kemendikbud	Kemenhub, KKP, Pemda	APBN, APBD
6.	Penyusunan Kurikulum Pendidikan yang Berorientasi Kelautan		Terbentuknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 di SMK Kemaritiman dan terciptanya asesor guru SMK	Terbentuknya LSP P1 Kemaritiman	194	194	194	194	Kemendikbud	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Pemda	APBN, APBD
			Mengkaji regulasi terkait dengan pendidikan kemaritiman	Regulasi terkait pendidikan kemaritiman	1	1	1	1	Kemendikbud	Pemda	APBN, APBD

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
		Pembinaan guru pendidikan menengah	Ketersediaan jumlah guru SMK maritim/kelautan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan	Alih fungsi/ keahlian ganda	124 orang	124 orang	-	-	Kemendikbud	KKP, Kemenhub, BNSP, Pemda, Swasta	APBN, APBD, Swasta, Joint Venture
			Tersedianya regulasi terkait cara pemenuhan guru produktif di SMK	Regulasi terkait Percepatan Pemenuhan Guru Produktif di SMK	1	1	1	1	Kemendikbud	Pemda, Swasta	APBN, APBD, Swasta, Joint Venture
7.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perguruan Tinggi Bidang Kelautan	Peningkatan program studi perguruan tinggi yang mampu mendukung pengembangan industri perikanan	Jumlah program studi perguruan tinggi yang terinventarisasi dan mampu mendukung pengembangan industri strategis perikanan	176 program studi berbasis perikanan (kumulatif)	161	166	171	176	Kemenristekdikti	KKP	APBN
		Revitalisasi politeknik yang mendukung perikanan	Jumlah politeknik yang direvitalisasi	10 Politeknik yang direvitalisasi (kumulatif)	3	6	8	10	Kemenristekdikti		APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
8.	Penyediaan Insentif dan Bantuan Pendidikan Bidang Kelautan dan Riset Strategis Kelautan	Penyediaan beasiswa di bidang kelautan	Anak pelaku utama (nelayan, pembudidaya, petambak garam, pengolah, pemasar)	Persentase anak pelaku perikanan yang mendapat bantuan beasiswa	44%	46%	48%	50%	KKP	Kemenkeu, Kemendikbud, Kemenristekdikti	APBN
9.	Pengembangan Kualitas dan Kuantitas Sekolah Pelayaran dan Perikanan	Pendidikan sumber daya manusia perhubungan laut	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)	Jumlah Lulusan (orang)	2.835	2.910	2.880	2.850	Kemenhub		APBN
			Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya	Jumlah Lulusan (orang)	510	510	510	510	Kemenhub		APBN
			Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang	Jumlah Lulusan (orang)	2.075	2.075	1.985	1.985	Kemenhub		APBN
			Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar	Jumlah Lulusan (orang)	1.680	1.854	2.012	2.187	Kemenhub		APBN
			Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP-2-IP) Malahayati	Jumlah Lulusan (orang)	890	845	865	885	Kemenhub		APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG- GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			Balai Pendidik- an dan Pelatih- an Ilmu Pela- yaran (BP-2-IP) Tangerang	Jumlah Lulusan (orang)	1.020	1.020	1.200	1.380	Kemenhub		APBN
		Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang terstandar	Jumlah Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang terstandar (unit)	13 unit	14 unit	17 unit	17 unit	KKP	Kemendik- bud, Kemnaker	APBN
			Balai Pendidik- an dan Pelatih- an Ilmu Pela- yaran (BP-2-IP) Barombong	Jumlah Lulusan (orang)	480	600	720	720	Kemenhub		APBN
			Balai Pendidik- an dan Pelatih- an Ilmu Pela- yaran (BP-2-IP) Sorong	Jumlah Lulusan (orang)	600	600	600	600	Kemenhub		APBN
			Balai Pendidik- an dan Pelatih- an Ilmu Pela- yaran (BP-2-IP) Padang Paria- man	Jumlah Lulusan (orang)	890	652	890	845	Kemenhub		APBN

NO.	KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGI	KEGIATAN	SASARAN	TARGET/ OUTPUT	JANGKA WAKTU				PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	SUMBER DANA
					2016	2017	2018	2019			
			Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelajaran (BP-2-IP) Minahasa Selatan	Jumlah Lulusan (orang)	890	652	890	845	Kemenhub		APBN
10.	Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha bagi Sumber Masyarakat di Bidang Kelautan, Khususnya pada Sektor Perikanan, Energi dan Pariwisata Bahari	Peningkatan kapasitas pemandu wisata selam	Meningkatnya jumlah sumber daya manusia wisata selam yang berkompeten dan berdaya saing global	Jumlah daerah yang difasilitasi	-	7 kabupaten/kota	7 kabupaten/kota	7 kabupaten/kota	Kemenpar	Pemda	APBN, APBD

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO